



Edi Cahyono

Pekalongan 1830-1870:  
Transformasi Petani  
Menjadi Buruh Industri  
Perkebunan

Pekalongan 1830-1870:  
Transformasi Petani  
Menjadi Buruh Industri  
Perkebunan

Edi Cahyono

Modified & Authorised by: Edi Cahyono, Webmaster  
Disclaimer & Copyright Notice © 2005 Edi Cahyono's Experience

EDI CAHYONO'S EXPERIENCE

# Sekapur Sirih

Pada awalnya karya ini adalah skripsi sarjana S1 pada Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang diujikan pada 29 Juni 1988, dengan judul, “Karesidenan Pekalongan Kurun *Cultuurstelsel*: Masyarakat Pribumi Menyongsong Pabrik Gula.”

Dua hal utama yang menyebabkan dipilihnya Jawa menjadi lahan penanaman modal oleh negara kolonial Hindia Belanda adalah terdapatnya tenaga kerja dan tanah yang murah, atau dengan kata lain biaya produksi yang rendah. Prasyarat pembentukan kondisi tersebut diletakan dalam kurun *Cultuurstelsel* (atau Sistem Pembudidayaan Tanaman Ekspor—secara salah kaprah sering juga disebut sebagai Kurun Tanam Paksa). Yaitu, ketika berbagai kendala politik dan ekonomi menemukan bentuknya dalam wadah penggunaan kekuasaan para penguasa bumiputra sebagai mediasi bagi pengerahan tenagakerja.

Bagi masyarakat bumiputra hadirnya modal mulai dirasakan ketika didirikan industri perkebunan. Muncul pola kerja industri yang merupakan gabungan kerja agrikultur penanaman tanaman ekspor, dengan kerja manufaktur. Wujud kongkritnya adalah pabrik gula.

Dinamika masyarakat bumiputra Jawa, khususnya di Karesidenan Pekalongan, dalam menyongsong hadirnya pabrik gula di lingkungan mereka, pada abad ke-19 begitu kentara hubungan-hubungan antara gubernemen (negara kolonial), pihak *fabriekant* atau pemilik pabrik, dan petani yang menjadi buruh dari sistem pembudidayaan tanaman ekspor. Kalau gubernemen dan *fabriekant* sampai batas-batas tertentu dapat dilihat sebagai kesatuan kepentingan untuk menjarah tanah koloni, maka lain halnya dengan masyarakat bumiputra yang menjadi obyek penjarahan kolonial tersebut. Karena kolonialisme telah memberi bekas-bekas yang tak terhapuskan dalam masyarakat pasca kolonial—khususnya dalam hal karakter kapitalisme yang berkembang, di mana unsur modal dan definisi dari investasi sangat tergantung pada keputusan-keputusan dari luar (imperialisme global) ketimbang dari dalam negeri—, maka menjadi cukup penting untuk menjelaskan apa dan bagaimana masyarakat bumiputra diintegrasikan ke dalam lingkungan baru, industri—pabrik—gula,

selama kurun *cultuurstelsel*. Juga bahwa produksi barang-dagangan untuk pasar dunia tersebut memporakporandakan produksi lama untuk dikonsumsi sendiri (subsisten) yang berarti mengubah pola hidup masyarakat menjadi penyedia kebutuhan pasar dan harus membeli kebutuhan dari pasar pula.

Dalam pengoperasian pabrik-pabrik gula di Pekalongan, persoalan yang timbul terutama pada cara bagaimana gubernemen mengkondisikan berbagai lapisan sosial dari elit teratas hingga kaum petani kecil diserap untuk mendukung berjalannya proyek-proyek penanaman di *onderneming-onderneming* dan proses pengolahan tebu menjadi gula.

Bila ada dugaan bahwa mekanisme kerja hanya bisa berjalan jika terdapat keterlibatan langsung dari para elit bumiputra—dengan menggunakan pengaruhnya—hal tersebut sebenarnya tidak berlaku mutlak. Memang, hingga paruh pertama abad 19, berbagai ikatan perhambaan menjadi alat utama sistem perekrutan tenaga kerja. Namun, perkembangan setelah 1850-an ternyata lain sama sekali, dengan munculnya apa yang disebut “kerja bebas”.

Gejala “kerja bebas” muncul akibat menjadi efektifnya sistem upah yang diintensifkan oleh pabrik gula. Selain juga disebabkan oleh runtuhnya sistem perekonomian pedesaan yang menjadi tidak sanggup “mensejahterakan” penduduknya, akibat penyerapan berlebih dari negara kolonial dalam penggunaan tanah dan *terutama* tenaga kerja.

Demikianlah masyarakat bumiputra mulai menapaki “dunia baru”, melepas hubungan kerja “irasional”—feodal—, sementara itu mereka didorong untuk menyambut kerja “rasional”—kapitalistik—sebuah masyarakat industri yang khas kolonial, pabrik *onderneming*—gula. Sebuah proses perubahan sosial yang perlahan tetapi pasti menyergap kaum tani Jawa untuk menjadi buruh-upahan.

Dalam proses penulisan buku ini tak terelakkan dukungan dari berbagai pihak. Secara khusus keberadaan lembaga penyedia data, Arsip Nasional di Jalan Gajahmada 111, Jakarta, dan, perpustakaan dan museum Pabrik Gula Gondang Baru, Klaten, Jawa Tengah, sangat penting dalam pengumpulan dan pembacaan sumber primer (data mentah).

Secara umum tentu saja seluruh staf pengajar Fakultas Sastra UI perlu mendapat ucapan terima kasih, mengingat proses studi yang berlangsung mempunyai andil dalam pembentukan diri penulis sebagai seorang sejarawan. Secara khusus beberapa pihak yang terlibat langsung dalam proses penulisan buku ini antara lain adalah Ibu Dra. M.P.B. Manus, Bapak Dr. A.B. Lopian, Bapak Dr. Onghokham, Ibu Sudarini, SS., Mas Iman Hilman, SS. Tak dapat dilupakan peranan Woro dalam membantu menterjemahkan naskah-naskah Jawa lama; dan Om Soepardi sekeluarga (kini telah almarhum), di Pekalongan, yang menampung penulis selama kunjungan ke kabupaten tersebut; staf Pabrik Sragie (Pekalongan)—yang telah beroperasi lebih dari satu setengah abad dan tetap tegar hingga kini); dan teman-teman di Yayasan Studi Masyarakat (Pasar Minggu). Dengan berbagai cara sejak membaca, memberikan saran maupun membantu data-data dan berdiskusi adalah bagian yang tak dapat diabaikan dalam mewujudkan tulisan ini. Kepada mereka penulis menyampaikan rasa terima kasih setulusnya.

Namun, bagaimanapun juga, tanggung jawab akhir dari penulisan ini ada pada penulis.

Sebagai penutup penulis berharap, semoga tulisan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tertarik dengan masalah yang akan diuraikan di bawah.

*Edi Cahyono*

# Daftar Isi

Sekapur Sirih	ii
Daftar Isi	v
Daftar Kata-kata	viii
Bab I: Pendahuluan	I
Latar Belakang Permasalahan	
Metode Penulisan	
Sumber-sumber Penulisan	
Pembabakan Tulisan	
Bab II: Industri Gula Di Jawa	12
Industri Gula <i>Ommelanden</i> -Batavia	
Industri Gula Pamanukan-Ciasem	
Pencanangan Politik-Ekonomi <i>Cultuurstelsel</i>	
Bab III: Produksi Barang Dagangan Di Pekalongan	26
Pengantar	
Batas Geografis dan Jumlah Penduduk lahan pertanian	
Hancurnya Beras Sebagai Barang-Dagangan Pekalongan	
• kopi	
• nila	
Basis Ekonomi Bupati	
Diferensiasi Petani di Pedesaan di Lingkungan <i>Onderneming</i> Gula	
Stratifikasi Sosial	
Distribusi dan Pemilikan Tanah	
Bab IV: Organisasi Produksi Industri Gula	67
Pengantar	
Modal	
Tenaga Kerja	
Tanah	
Kerja <i>anderneming</i>	
a. Menanam dan merawat tebu	
b. Memanen tebu	
Transportasi, Kerja Pabrik, dan Kerja Pengrajin	
Persetujuan-Bebas Pabrik dengan Petani	
Petani dan persetujuan kerja	
a. Transportasi	
b. “Kerja bebas”	
Bab V: Planter Menggugat Upah	90
Pengantar	
Upah Kurun <i>Cultuurstelsel</i>	
<i>Planter</i> Menggugat Upah	

Analisa Gubernemen demi tegaknya *Rust en Orde*  
Upah Riil

Bab VI: Kesimpulan

103

Kepustakaan

109

# Daftar Kata-Kata

<i>amat</i>	: 1.000 pon = 453,59 kilogram
<i>bau</i>	: 7.096,49 meter-persegi = 0,71 hektar
<i>bujang</i>	: petani tak bertanah, bekerja untuk upah, tinggal dalam keluarga <i>sikep</i>
<i>cacah</i>	: kesatuan masyarakat terkecil dikepalai seorang <i>sikep</i>
<i>cengkal</i> (Belanda : <i>rode</i> ):	3,75 meter-persegi
<i>cultuurdienst</i> nila	: kerja penanaman tanaman ekspor untuk tebu dan nila
<i>cultuur-procent</i>	: prosentase yang diberikan oleh gubernemen kepada para elit bumiputra untuk jerih-payah mengumpulkan hasil tanaman ekspor dari petani
<i>demang</i> (Belanda: <i>onder-colecteur</i> ):	pengumpul pajak
distrik	: sekarang dapat disamakan dengan kawedanaan/kecamatan
<i>fabriekant</i>	: pengusaha pabrik gula
<i>gantang</i>	: 8,58 liter
<i>gogol</i>	: petani penguasa tanah sementara ( <i>tijdelijk grondbezit</i> )
<i>heerendienst</i>	: kerja rodi pembangunan fasilitas umum
<i>jonk</i>	: 4 <i>bau</i> = 28.386 meter-persegi
<i>kabayan</i>	: jurutulis
<i>kamitua</i>	: pemuka desa
<i>kattie</i>	: 617,613 gram
<i>koelie</i> (kuli)	: buruh upah harian sama dengan <i>wong boeroeh</i>
kontrolir :	pejabat Belanda di bawah, pembantu residen
<i>koyang</i>	: (beras) 28 <i>pikul</i> atau 1729,319 kilogram (di Semarang)
<i>Iebe</i>	: semacam kepala desa/kepala desa “informal”
Lurah	: kepala desa
<i>Menumpang</i>	: petani tak-bertanah, tinggal dalam keluarga <i>sikep</i>
<i>missive</i>	: surat dinas



- ondernemer* : pengusaha pabrik gula setelah tahun 1850
- onderneming* : perusahaan perkebunan
- paal* : 1.506,943 meter
- pikul* : 1.851,851 kilogram
- planter*
1. pengusaha pabrik gula swasta Inggris di Pamanukan-Ciasem, dan sebutan pengusaha perkebunan dalam kurun pasca 1870.
  2. buruh bumiputra di *onderneming* gula kurun *cultuurstelsel*
- Proces Verbaal* : berita acara
- rappoe* : buruh pemanen tebu
- rendemen*: kadar gula dalam tebu
- residen : pejabat Belanda, berkedudukan antara gubernur dan pembantu residen (kontrolir)
- rijksdaalder* : mata uang Belanda senilai duasetengah *gulden*
- rondo kiesie* : harfiah: janda kaya; istri *sikep* yang ditinggal mati suaminya dan mewarisi kekayaan dan pengaruh suami.
- sikep* : petani kaya, penguasa tanah
- suiker-campagne* : kampanye kerja pada musim “pesta” giling
- suiker-contract* : kontrak yang diajukan gubernemen untuk mendapatkan tanah dan tenaga kerja dari desa-desa
- Tumenggung (Tommongong): gelar kebangsawanan, biasanya gelar seorang bupati
- vadem* : 1, 88 meter
- vrijwilliger* : pekerja “sukarela” di *onderneming* gula, tidak direkrut melalui *suiker-contract*.
- wedono* (wedana): kepala distrik bumiputra
- wong boeroeh* : buruh upah harian

# Bab I: Pendahuluan

## Latar Belakang Permasalahan

Pada jaman kolonial di Jawa terdapat tiga fase (kurun) sejarah perkembangan industri gula. Fase *pertama* adalah industri gula yang didirikan dari abad 17 hingga 18 di sekitar (*ommelanden*) sebelah Selatan Batavia. Fase *kedua* antara tahun 1830 sampai 1870 yang biasa disebut sebagai kurun *cultuurstelsel*, bercirikan perusahaan negara; dan fase *ketiga* adalah pasca 1870. Para investor swasta mencirikan fase ketiga ini, peranan negara (kolonial) sangat diperkecil, muncul korporasi-korporasi gula dengan investasi besar.

Kalau dalam fase pertama, tidak terdapat hal-hal yang istimewa, disebabkan para pengolah belum melihat kemungkinan gula sebagai barang-dagangan yang menguntungkan, akibat tipisnya kesempatan untuk mendominasi pasar internasional. Selain itu ada keengganan atau ketidakmampuan organisasi perdagangan VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*) berkompetisi di Eropa, sehingga di beberapa pulau di nusantara gula hanya diproduksi dalam batas-batas permintaan tertentu saja.

Perkembangan yang terjadi dalam fase kedua menunjukkan kemajuan yang berarti, gula telah menjadi barang-dagangan yang dikonsumsi secara luas, dan yang pasti ada celah pasar. Van den Bosch,<sup>1</sup> konseptor atau pencetus *cultuurstelsel*, tentu saja memperhitungkan kesempatan kecil yang ada untuk memasuki pasar Eropa. Celah pasar di Eropa terjadi karena industri gula di India mengalami kemunduran, dikarenakan para investornya bangkrut akibat kegagalan investasi industri gula di Pamanukan-Ciasem.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal pada Oktober 1828, namun ia tidak segera datang ke Jawa, sebab menunggu penyelesaian dari Willem I dalam mengalihkan kebijaksanaan daerah koloni dari tangan swasta ke pihak pemerintah. Baru pada Maret 1829 ada kepastian dari kalangan swasta yang diwakili oleh Elout, bahwa mereka mengundurkan diri dari pengelolaan koloni di Jawa. Akhir Juli 1829 Bosch berangkat dari Niderland, dan tiba di Batavia tanggal 2 Januari 1830.

<sup>2</sup> Untuk Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam bab-2 di bawah.

Sedang proses-proses yang berlangsung selama fase ketiga sebenarnya berlangsung di atas landasan yang telah dibentuk selama fase kedua (kurun *cultuurstelsel*). Yang terjadi antara tahun 1830-70 adalah eksploitasi negara; sedangkan untuk fase pasca 1870 adalah eksploitasi swasta. Hal yang cukup penting dalam fase ketiga adalah terjadinya krisis-krisis pada pemasaran gula di Eropa.<sup>3</sup> Krisis-krisis ini mendorong dilakukan pemadatan modal sehingga gula muncul sebagai barang-dagangan terpenting dari Pulau Jawa. Bergabungnya beberapa bank yang menjadi pemasok dana utama industri gula; dan dibentuknya *Algemeen Syndikaat van Suikerfabriekanten in Ned-Indie* (didirikan tahun 1894) sangat berarti dalam penguatan industri gula di Jawa. Lembaga ini menjamin pasaran gula pasokan Jawa. Gula pada waktu itu merupakan tiga perempat produksi ekspor dari Jawa, yang menghasilkan seperempat jumlah pendapatan negara kolonial.

Garis besar perkembangan sejarah industri gula yang diulas di atas baru merupakan kulit luar yang melingkupi pengembangan modal di Jawa. Berbagai sisi hubungan sosial-ekonomi internal antar manusia yang berperan dalam produksi barang-dagangan tersebut perlu mendapatkan perhatian, mengingat fondasi kapitalisme yang kemudian menjadi karakter produksi barang-dagangan di Jawa dibentuk di dalam kurun ini. Apa yang sebenarnya terjadi pada kaum tani Jawa pada masa kolonial dengan kehadiran modal dan industri perkebunan gula? Bagaimana proses pembongkaran masyarakat petani dan pengintegrasian mereka ke dalam industri gula?

<sup>3</sup> Lembaga-lembaga ini menjadi sangat menguat ketika terjadi krisis tahun 1880-an, pada saat pasaran gula jatuh di Eropa disebabkan diproduksi gula *bit* secara besar-besaran oleh kaum *farmer* Eropa. Peralihan menuju pembuatan gula *bit* di Eropa disebabkan pasaran gandum *farmer* Eropa dihancurkan oleh Amerika. Bagi pengusaha gula Jawa, kondisi pasar gula *bit* musti dikurangi, cara satu-satunya yang dipilih adalah memasok Eropa dengan gula tebu sebanyak mungkin. Untuk itu beberapa bank seperti NHM (*Nederlansche Handelmaatschappij*), *Internatio* dan *Kolonial Bank* bergabung untuk menciptakan dana yang besar. Selain masalah modal, muncul persoalan lain yakni dengan berjangkitnya penyakit sereh (semacam jamur) yang menyerang tanaman tebu terutama dalam karesidenan Cirebon. Untuk menanggulangi ini para kapitalis gula sepakat mendirikan beberapa *Proefstation* (pusat penelitian) antara lain di Semarang (1886), Pekalongan dan terbesar di Pasuruan (1887) (Allen dan Donnithorne, 1957, *Western Enterprise in Indonesia and Malaya: a study in Economic Development*, hal. 83-4).

Memang ada yang telah menjawab pertanyaan tersebut dengan menyatakan bahwa masyarakat bumiputera terlalu *statis* dalam menanggapi perubahan-perubahan yang dipaksakan oleh kolonialisme, sehingga berkembang struktur ekonomi ganda (*dual*). Karena, penduduk bumiputera tidak terintegrasi ke dalam ekonomi perkebunan maka perkembangan masyarakat Jawa menjadi involutif. Paling tidak pandangan ini telah bertahan agak lama, dan mempengaruhi tulisan-tulisan tentang Jawa yang dilakukan dalam dua dekade setelah pertengahan abad ke-20. Inti dari penjelasan ekonomi ganda dalam melihat Jawa adalah, tidak terjadinya perubahan penting pada masyarakat ini segera setelah hadirnya kolonialisme, atau seperti dikatakan oleh salah seorang pakar pendekatan ini, Geertz, kolonialisme hanya:

“Menumpangkan” ... karena apa yang pada dasarnya dilakukan oleh Belanda, dari tahun 1619 sampai tahun 1924, adalah mencari produk pertanian dari Indonesia, khususnya Jawa, yang dapat dijual di pasaran dunia tanpa merubah struktur ekonomi pribumi secara asasi.<sup>4</sup>

Menurut Geertz memang terjadi perkembangan kapitalisme dalam bentuk kantung-kantung (*enclave*), namun demikian pada bagian lain masyarakat petani bumiputera yang homogen tidak terusik dengan kehadiran kapitalisme:

Dalam sektor ekspor terdapat kapitalisme administratif; suatu sistem di mana pemegang modal — orang-orang Belanda — mengatur penjualan dan upah, mengontrol output, dan bahkan juga mendiktekan proses produksi.<sup>5</sup>

Di lain sisi:

... Orang-orang Jawa tidak dapat menjadi bagian dari ekonomi perkebunan sendiri, dan mereka tak dapat mengubah bentuk pola umum pertanian mereka ..., karena mereka tak punya modal.<sup>6</sup>

Sejauh mana posisi orang Jawa terlepas ketimbang terintegrasi ke dalam kantung-kantung perkebunan yang padat modal, telah

<sup>4</sup> Geertz, 1976, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, hal. 51.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 52-3.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 87.

ditinjau kembali oleh Gordon R. Knight.<sup>7</sup> Ia menelaah masalah ini dan menemukan bahwa masyarakat bumiputera telah kehilangan sifat-sifat pra-kapitalisnya<sup>8</sup> karena mereka terlibat dalam produksi barang-dagangan selama paruh pertama abad-19. Dalam pengembangan produksi barang-dagangan tersebut organisasi produksinya digunakan ikatan-ikatan sosial pedesaan. Dalam ikatan-ikatan sosial di desa masih perlu diperhatikan pilah-pilah antara petani kaya (bertanah) dengan petani gurem (tak bertanah), suatu bentuk kesenjangan sosial yang dianut di Jawa. Kesenjangan sosial ini menentukan pembagian kerja di dalam desa.

Ketika negara kolonial mulai membentuk industri perkebunan, kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat desa sifatnya diubah. Karena industri perkebunan (khususnya gula) mengintensifkan pemasyarakatan uang (*moneterized*). Uang membuat interaksi kerja gaya lama, bagi-hasil (*bouwdeel*) atau pun penyerahan “sukarela” (secara paksa/upeti), menghilang. Sebagai gantinya kini setiap kerja akan diberi ganti atau dilakukan dalam lalu lintas uang.

Pemasyarakatan uang menjadi hal yang sangat penting untuk menjelaskan perkembangan lebih lanjut dari *cultuurstelsel* yaitu dengan munculnya apa yang disebut gejala “kerja bebas” yang terpaut demi kelangsungan kerja *onderneming* gula.<sup>9</sup> Uang telah melepaskan kaum tani-gurem dari ikatan-ikatan sosial lama, yang bekerja dalam pengaruh perhambaan, kini berubah menjadi

<sup>7</sup> Dua buah artikel ditulis Knight terutama yang membahas struktur masyarakat di Jawa saat munculnya pabrik-pabrik gula adalah, pertama pada 1980, “From Plantation to Padi-field: The Origin of the Nineteenth Century Transformation of Java’s Sugar Industry”, dan kedua 1982, “Capitalism and Commodity Production in Java.”

<sup>8</sup> Untuk menjelaskan fenomena ini Knight (*Ibid.*) menggunakan istilah *gentry*; sedang Kolff dalam tulisannya “An Economic Case Study: Sugar and Welfare in Java”, 1953, menyebut dengan *yeoman*. Kedua istilah tersebut merupakan kategori sosial khas Eropa, khususnya dari Inggris. Istilah-istilah asing ini dipakai untuk menjelaskan bahwa ada segelintir bumiputera yang menguasai tanah-tanah skala besar dan menanamkan uangnya untuk memproduksi barang-dagangan tertentu. Sedang hasil yang diperoleh dari proses tersebut diperjual-belikan secara bebas, tidak diserahkan sebagai upeti kepada siapapun.

<sup>9</sup> Lihat Elson, 1984, *Javanese Peasants and the Colonial Sugar Industry: Impact and Change in an East Java Residency, 1830-1940*, khususnya bab IV, “The Transformation to ‘Free’ Wage Labour,” hal. 103-26.

penjual tenaga kerja di pabrik gula. Di lain sisi, kaum tani-kaya bisa menyewakan hewan-hewan penarik gerobak ke pihak pabrik.

Artinya secara langsung ataupun tidak langsung tesis Geertz dalam menginterpretasikan masyarakat Jawa dengan mengabaikan diferensiasi petani,<sup>10</sup> menjadi sangat diragukan kevalidannya.

Aspek *cultuurstelsel* inilah yang penting dan perlu dibicarakan kembali. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kurun ini. Dan, apakah masih tepat mempertahankan pandangan yang menyatakan:

Buruh tebu di Jawa adalah tetap petani yang sekaligus juga menjadi kuli, tetap petani rumah tangga yang berorientasi komunitas dan sekaligus juga buruh upahan. Kakinya yang sebelah tertancap di lumpur sawah, yang sebelah lagi menginjak lantai pabrik. Dan agar petani dapat mempertahankan kedudukannya yang serba ringkih dan sulit itu, maka bukan hanya onderneming saja yang harus menyesuaikan diri dengan desa ... tetapi desa itupun harus menyesuaikan diri, secara lebih menyeluruh, pada onderneming.<sup>11</sup>

Dengan asumsi bahwa telah terjadi kemencengan mendasar dalam melihat perubahan masyarakat Jawa, terutama dengan hadirnya industri gula, maka penulis merasa perlu melihat kembali dengan melakukan rekonstruksi ulang terhadap fakta-fakta untuk menjernihkan kembali tentang makna dari perubahan.

Beberapa peneliti memang telah membongkar asumsi-asumsi pendekatan model Geertzian karena dianggap terlalu menyederhanakan masalah yang sebetulnya bisa didapati dalam studi-studi empiris. Mereka mulai mengkaji kembali pertanyaan-pertanyaan di seputar pengrusakan masyarakat oleh kolonialisme.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Penolakan Geertz untuk memperhatikan diferensiasi petani Jawa dapat diikuti dalam kutipan berikut ini:

“... struktur pemilikan tanah itu tak lebih hanyalah suatu *petunjuk yang tak begitu besar artinya untuk mengetahui pola sosial dari eksploitasi pertanian*; bentuk yang spesifik dari pola sosial itu hanya menampakkan diri dalam ukir-ukiran kelembagaan yang rumit, di mana tanah dan tenaga kerja itu sungguh-sungguh terhimpun bersama.” (1976, *op.cit.*, hal. 109; kursif dari penulis)

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 98-9.

<sup>12</sup> Untuk suatu rangkuman atas penulis-penulis yang menolak Geertz, dapat diikuti dalam White, 1989, “Involusi Pertanian’: Sebuah Obsesi dalam Studi

Misalnya Alavi yang mencoba mengajukan perpektif baru dalam melihat hakekat produksi kolonial, mengatakan:

Firstly, the effect of the impact of capitalism in breaking down the self-sufficiency of the peasant economy and drawing it increasingly into the circuit of generalized commodity production generated by the capitalist economy and, secondly, on the increasing migration of peasant who, as consequence of the disintegration of the peasant economy, have to look for outside employment to supplement the bankrupt farm economy and subsidize the livelihood of those who depend on it.<sup>13</sup>

(Pertama, efek dampak kapitalisme dalam meruntuhkan perekonomian secukup-hidup (*self-sufficiency*) petani dan menariknya melebarkan ke dalam lingkaran produksi barang-dagangan yang diperluas dibangkitkan oleh perekonomian kapitalis dan, kedua, tentang meningkatnya migrasi petani yang, sebagai konsekuensi disintegrasi dari perekonomian petani, harus dicari di luar kesempatan-kerja menambah bangkrut ekonomi bertani (*farm*) dan mensubsidi kehidupan mereka yang tergantung padanya.)

Lebih lanjut Alavi menegaskan, akibat tidak bisa dihindarkannya akumulasi modal melalui investasi dalam industri agrikultur skala besar, telah memaksa petani pindah ke pekerjaan luar. Dengan kata lain *petani dipaksa menjadi pekerja bebas* (klas buruh) dan diletakkan dalam pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, uang menjadi diperlukan untuk menolong perekonomian kaum tani yang bangkrut. Namun terdapat logika ekonomi tertentu yang mengakibatkan kaum tani dapat bertahan dari perubahan-perubahan yang terjadi yaitu dengan melakukan penanggungan mengkonsumsi barang selain kebutuhan pokok.<sup>14</sup>

Dari sini mungkin dapat dipahami perubahan mendasar yang diletakkan oleh *cultuurstelsel* bagi masyarakat Jawa, yaitu *cultuurstelsel* telah memberi jalan bagi kondisi-kondisi masyarakat yang untuk mudahnya di dalam tulisan ini disebut sebagai perkembangan kapitalisme yang cacat.<sup>15</sup> Asumsi ini melihat kepada

Masyarakat Pedesaan Jawa.”

<sup>13</sup> Alavi, 1982, “The Structure of Peripheral Capitalism,” hal. 187.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 189-90.

<sup>15</sup> Persoalan mendasar yang memberi sifat suatu sistem sebagai bercorak kapitalis

perubahan yang ditancapkan oleh kolonialisme tidak menghasilkan struktur sosial ganda melainkan tunggal sebagai akan menjadi jelas dalam pemaparan bab-bab di bawah, dalam hal menyatunya masyarakat bumiputera pada ekonomi perkebunan yang dibentuk oleh kolonialisme.

Menurut penulis persoalan ini dapat dilihat dalam perkembangan industri gula yang di satu sisi ada *heerendienst* (kerja rodi) dan kontraktual (*suiker-contract*)—diperkenalkan dalam pertengahan tahun 1830—di lain sisi terdapat upah, yang mengandaikan tersedianya buruh sebagai dapat disediakan oleh bursa tenaga kerja. *Cultuurstelsel* sebagai representasi dari kapitalisme negara, melakukan penempatan mata rantai antara penggunaan tenaga kerja dengan akumulasi modal terutama dalam industri gula.

Untuk mempersempit permasalahan, penulis berusaha melacak petani bumiputera melalui pertanyaan-pertanyaan berikut, pertama, apakah diferensiasi petani, yang telah terbentuk sebelum hadirnya kolonialisme, memang tidak berpengaruh dalam pembagian kerja di *onderneming*? Kedua, bagaimana desa mempersiapkan tenaga kerja? Ketiga, bagaimana peranan upah dalam lingkup kurun yang terkenal dengan kerja tak berupah ini? Sehingga dapat diungkap sejauhmana dampak pabrik gula pada pembongkaran struktur sosial masyarakat pedesaan. Diharapkan dengan pembahasan hubungan-hubungan yang terjalin antara tenaga kerja bumiputera, negara (gubernemen)<sup>16</sup> dan pabrik gula, pertanyaan-pertanyaan

adalah, terdapatnya produksi barang-dagangan yang diperluas (*generalized*); dan bahwa modal dijadikan sumber peningkatan kekayaan, atau laba yang didapatkan dijadikan modal akumulatif. Selain itu, seluruh hasil produksi yang didapatkan diambil oleh pemilik modal. Dalam masyarakat-masyarakat yang berstruktur pra-kapitalis dengan diperkenalkannya tata hubungan produksi seperti ini akan memunculkan bentuk kerja bebas (tenaga kerja menjadi barang-dagangan). Yaitu dilepaskannya petani dari tanah miliknya. (Alavi, *ibid.*; S.H. Alatas, 1988, *Mitos Pribumi Malas: Citra orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam Kapitalisme Kolonial*, hal. 5) Namun perkembangan yang terjadi dalam masyarakat kolonial seringkali berbeda, seperti tidak ditemukannya kerja bebas, meskipun produksi tidak terlepas dari sifat pokok sistem kapitalis. Jadi terdapat pelestarian bentuk-bentuk kerja bukan-kapitalis dalam produksi barang-dagangan. Seperti di Jawa kurun *cultuurstelsel*, tenaga kerja tidak dilepaskan dari penguasaan faktor produksi (tanah); dan diberlakukannya pengaruh ikatan-ikatan “adat” (kerja menghamba) dalam mobilisasi tenaga kerja.

<sup>16</sup> Untuk selanjutnya akan banyak ditemui istilah gubernemen ini. Istilah ini



tersebut dapat terjawab.

Pemilihan Karesidenan Pekalongan sebagai subyek bahasan disebabkan di karesidenan ini ada kekhasan yang mewarnai daerah pesisir ini. Seperti, para penguasa bumiputera setempat telah terlibat produksi barang-dagangan sejak awal abad ke-19, sehingga gubernemen banyak mengalami kesulitan ketika harus menerapkan sistemnya.

## Metode Penulisan

Studi ini tidak bermaksud menjelaskan berbagai masalah seperti yang sering dijumpai dalam penulisan sejarah lokal,<sup>17</sup> meskipun ruang lingkup dari tema tulisan ini adalah Karesidenan Pekalongan. Dirujuknya karesidenan sebagai batasan geografis atau politik-administratif sudah sejak awal penulisan dirasakan terlalu luas. Meskipun demikian pendataan yang telah dibuat oleh arsip-arsip kolonial memang tidak dapat membatasi diri untuk meneliti secara lebih sempit, seperti dalam batas-batas distrik atau pun desa.

Tetapi, dengan menjelajahi arsip karesidenan ini, membuat penulis menemukan beberapa masalah lain yang pada awalnya di luar rencana penulisan. Karena soal-soal tersebut dianggap relevan untuk dibicarakan, maka di dalam penjelasan di bawah akan pula ditemui penjelasan barang-dagangan lain non gula. Tentunya penjelasan ini tidak dimaksudkan sekedar tempel, akan tetapi diharapkan dapat memberi gambaran bagaimana kondisi-kondisi barang-dagangan utama lainnya—kopi dan nila—yang dibudidayakan di dalam karesidenan ini. Maksudnya untuk meninjau sampai sejauh mana penyerapan tenaga kerja dalam produksi tanaman ekspor tersebut berpengaruh terhadap kelangsungan industri gula.

sebenarnya merupakan peng-Indonesiaan dari bahasa Belanda *Gouvernement* yang dalam bahasa Indonesia bisa disamakan dengan pemerintahan, atau politik-tertinggi yang berkuasa. Secara riil istilah ini menunjuk pada Gubernur Jendral, dan hirarkhi-hirarkhi yang ada di bawahnya (tidak termasuk hirarkhi para penguasa bumiputera). Dalam tulisan ini akan tetap dipertahankan istilah gubernemen, untuk menunjuk kekhasan sejarah saja.

<sup>17</sup> Kalau pun tulisan ini masih dapat dikategorikan dalam sejarah lokal seperti diulas oleh Abdullah, hanya mencakup: “masalah ‘perbatasan’ (lokalitas) dan ‘penggalan’ (waktu).” (Abdullah, 1985, “Ke Arah Penulisan Sejarah Nasional di Tingkat Lokal,” hal. 320-2)

Karena tulisan ini menyangkut masalah yang bersifat tematis, dan bukan mengutamakan pada penjelasan peristiwa tertentu, maka penggunaan urutan waktu tidak dilakukan secara ketat. Meskipun hal ini terbuka untuk dipersoalkan kembali. Bagaimanapun kondisi data yang sangat fragmentaris, pembundelan arsip yang “tanpa” melihat satu-persatu kelaikannya untuk dikumpulkan dalam satu tema tertentu, menjadi cukup menyulitkan dalam mencari data-data yang diinginkan.

Metode penulisan yang digunakan adalah deskripsi fakta yang dikelompokkan dalam bab maupun sub-bab. Sedangkan pendekatan ekonomi-politik yang diajukan Hamzah Alavi<sup>18</sup> dalam mengkaji persoalan perubahan sosial, penulis anggap cukup relevan untuk meninjau kembali permasalahan yang berkaitan dengan sistem produksi kolonial di Jawa.<sup>19</sup>

## Sumber-sumber Penulisan

Katalogus Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jalan Gajahmada 111, Jakarta, yang dikelompokkan per karesidenan sangat membantu bagi pengumpulan sumber-sumber primer. Meskipun demikian, memang tidak dapat dihindarkan, bahwa terdapat celah-celah yang dapat menjadi sangat mengganggu dalam merekonstruksi kembali apa yang diinginkan. Walaupun cukup fragmentaris, penulis berupaya sedapat mungkin menggali data-data tersebut. Guna memudahkan, untuk pengelompokan ANRI akan dibuat penyingkatan-penyingkatan, seperti *Residentie Archieve “Pasar Ikan” 1800-1920*, digunakan singkatan RA; *Archieven Cultures 1816-1900*, digunakan singkatan AC; sedang katalogus ANRI Pekalongan dengan nomor sudut kanan atas 9, digunakan singkatan AKP (Arsip Karesidenan Pekalongan). Untuk *besluit-besluit* karena tidak ada penomoran (katalogus) arsipnya, maka tetap disebutkan penomoran *besluit* sesuai dengan yang diberikan oleh *Algemeene Secretarie*.

Juga, dalam penulisan ini digunakan sumber-sumber sejamin seperti tulisan-tulisan L. Vitalis, pejabat *Inspecteur der Cultures*

<sup>18</sup> Alavi, 1982, *op.cit.*

<sup>19</sup> Upaya menjelaskan Jawa dengan kerangka acuan Alavi, telah dilakukan pula oleh Breman, 1986, *Penguasaan Tanah Dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*.

(Inspektur Penanaman) di karesidenan-karesidenan pesisir Utara Jawa Tengah tahun 1834-37, dan penulis-penulis lain yang telah dikumpulkan, diedit dan diterbitkan kembali oleh C.L.M. Penders (1977). Dan juga *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda tahun 1839-1844* terbitan ANRI ke-5, yang sangat membantu dalam ringkasan-ringkasan isi dari beberapa *besluit*, untuk memahami beberapa peristiwa di berbagai karesidenan, termasuk Pekalongan. Selain itu turut pula digunakan *Eindresume van het bij Gouvernements besluit dd. 10 Juli 1867 no. 2 bevolen Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op den Grond op Java en Madoera*, diterbitkan oleh Bergsma antara 1876 sampai 1896, merupakan hasil penelitian tentang keadaan pemilikan dan atau penguasaan tanah bumiputera yang dilakukan sampai akhir 1860-an (1868-1869). Terbitan-terbitan resmi ini, sebagai sumber sekunder, besar manfaatnya untuk melihat persoalan-persoalan secara lebih mendalam dan menyeluruh. Walaupun terbitan-terbitan ini seringkali disusun dengan prasangka-prasangka dan kepentingan-kepentingan tertentu.

## Pembabakan Tulisan

Bab I: Pendahuluan, membicarakan latar belakang permasalahan pemilihan tema tulisan ini, termasuk juga metode dan bahan-bahan yang digunakan.

Bab II, Industri Gula di Jawa, memberikan garis besar perkembangan industri sejak didirikan pada sekitar pertengahan abad ke-17 hingga kurun *cultuurstelsel*, termasuk kehidupan singkat industri gula di Pamanukan-Ciasem (Jawa Barat).

Bab III, Produksi Barang Dagangan di Pekalongan, memperlihatkan kekuatan-kekuatan sosial bumiputra yang telah melibatkan diri dalam produksi barang-dagangan di luar gubernemen. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan, karena memang terjadi dua kekuatan mengorganisir barang-dagangan, dan sama-sama menyerap tenaga kerja bumiputera. Dalam bab ini pula dibahas perekonomian bupati setempat; dan juga diferensiasi petani di pedesaan Karesidenan Pekalongan.

Bab IV, Organisasi Produksi Industri Gula, menjabarkan jaringan kerja industri gula, yang meliputi tiga sektor yang berkaitan, antara

gubernemen, petani dan pabrik, terutama dalam memobilisasi tenaga kerja dan tanah; dan bagi-modal antara gubernemen dengan pihak pemilik pabrik.

Bab V, *Planter Menggugat Upah*, mengangkat satu kasus keresahan *planter onderneming* gula di tahun 1842 yang menuntut kenaikan upah. Dilanjutkan dengan cara gubernemen menganalisa dan menanggapi peristiwa tersebut. Dan diakhiri dengan sub-bab upah riil, merupakan analisa penulis terhadap peristiwa tersebut, yaitu bagaimana memperhitungkan upah dengan kebutuhan sehari-hari para *planter*. Maksud pemaparan peristiwa tersebut dalam rangka melihat kembali kerja industri modern, yang ditunjukkan dalam pengoperasian upah sebagai pembayar kerja yang telah diambil oleh *onderneming* dari masyarakat bumiputera. Dan, bahwa dalam proses penyerapan tenaga kerja tersebut kaum tani telah menggunakan perhitungan rasional dalam menghitung jumlah besarnya upah mereka.

Bab VI, Kesimpulan.

# Bab II: Industri Gula Di Jawa

## Pengantar

Tidak ada kepastian di mana tanah asal tanaman tebu gula (*suikerriet*). Andrew van Hook melacak dan memperkirakan ada dua tempat, dari mana asal tebu, yaitu India Timur dan Pasifik Selatan.<sup>1</sup> Sejarah penyebaran tebu gula mungkin dimulai oleh orang-orang Cina dan Arab sekitar abad ke-8. Sebagai pedagang, mereka menyebarkan tebu India yang dibawa dari daerah Sungai Gangga ke wilayah Selatan Samudera Hindia, dan mungkin dalam perjalanan perdagangan tersebut, mereka sempat menyebarkannya ke pulau Jawa.

Sebelum abad ke-14 gula merupakan barang mewah, yang dikonsumsi secara terbatas. Pada waktu itu terdapat jenis pemanis lain, seperti madu dan tanaman semacam umbi bit, yang dipakai sebelum digunakan tebu.<sup>2</sup> Namun kemudian dengan dikonsumsinya kopi, teh dan coklat, gula tebu lambat laun menjadi kebutuhan masyarakat yang mengkonsumsi produk tersebut sebagai bahan pemanisnya.

Sekitar abad ke-14 dan 15, para pedagang Cina menemukan bentuk industri awal dari seni pemurnian tebu di sekitar Laut Tengah yang diusahakan oleh para tentara yang terlibat Perang Salib, mereka menanami wilayah-wilayah Tripoli (kota pelabuhan di wilayah Utara Libanon), Mesopotamia (sekarang Irak: sekitar Sungai Tigris), Palestina dan sebagainya, sedang hasilnya diperdagangkan ke Venesia dan Genoa.

Hal ini mendorong bangsa-bangsa lain untuk juga melibatkan diri dengan memproduksi gula. Seperti, orang-orang Portugis dan Spanyol, dengan menggunakan budak-budak negro dari Afrika yang dibawa ke Hindia Barat dan Amerika Selatan untuk mengelola kilang-kilang pengepres yang telah mereka dirikan.<sup>3</sup> Sejak abad-abad ini gula muncul menjadi barang-dagangan yang

<sup>1</sup> Hook, 1964, "Sugar Growing and Sugar Making," hal. 804-5.

<sup>2</sup> Mikusch, 1953, "Sugar," hal. 450.

<sup>3</sup> "Suikerindustrie", 1921, hal. 176-7.

dikonsumsi luas terutama di daratan Asia dan Eropa.

Perkembangan penggilingan atau pengepresan tebu di Jawa, secara agak besar dimulai pertama kali pada pertengahan abad-17 di dataran rendah Batavia, dikelola oleh orang-orang Tionghoa. Meskipun produksinya tidak pernah sampai mendominasi pasaran dunia, namun bentuk industri gula awal ini bisa bertahan sampai satu abad.

Kemudian di awal abad-19 muncul industri gula modern di Pamanukan-Ciasem, Jawa Barat, yang dikelola oleh para pedagang-besar dari Inggris. Tetapi industri besar dan modern ini hanya bisa bertahan satu dasawarsa. Hal ini terjadi dikarenakan kesalahan memilih lokasi industri, lokasi yang berpenduduk sangat jarang.

Kehancuran industri gula Inggris (Pamanukan-Ciasem) digantikan industri gula Belanda dalam kurun *cultuurstelsel*. Sistem ini lahir sebagai sarana untuk menjadikan Jawa sebagai lahan eksploitasi negara (Belanda). Pencetus sistem ini, Van den Bosch, menggunakan ikatan-ikatan perhambaan bumiputra yang ada dalam pembudidayaan tanaman ekspor. Ternyata sistem ini berhasil baik, laba yang didapatkan bisa membangun negeri Belanda dari kehancuran ekonominya. Sejalan dengan membaiknya perekonomian Negeri Belanda, golongan swasta Belanda menuntut agar Jawa dibuka bagi eksploitasi swasta. Tuntutan ini berhasil dan disahkan pada tahun 1870.

## Industri Gula *Ommelanden*-Batavia

Sepanjang abad ke-18, tebu gula mulai dibudidayakan secara luas di sekitar (*ommelanden*) sebelah Selatan Batavia. Orang-orang Tionghoa kaya,<sup>4</sup> bersama dengan para pejabat VOC yang menjadi pedagang besar membiayai penggilingan-penggilingan ini, dan

<sup>4</sup> Ada satu contoh orang Tionghoa kaya Ni Hoe Kong, Kapitein Cina di Batavia tahun 1740, (yang diduga menjadi motor pemberontakan Cina 1740-an). Ada persyaratan untuk dapat menjadi seorang Kapitein yaitu “moesti mempoenjai harta”, dan ini dibuktikan dengan pemilikan beberapa potong tanah yang di dalamnya terdapat 13 atau 14 penggilingan tebu, yang ia sewakan kepada orang-orang Tionghoa, selain itu Hoe Kong juga memiliki sejumlah uang kontan dan rumah. (Hoetink, 1923, *Ni Hoe Kong Kapitein Tionghoa di Betawie dalem tahun 1740*, hal. 3)

berhasil menghidupkan industri gula. VOC mulai melakukan pengiriman gula Batavia sejak 1637 ke Eropa, dengan jumlah ekspor per tahun lebih dari 10.000 *pikul*.<sup>5</sup>

Sayangnya, awal yang begitu baik ini tidak didukung kemampuan dalam melakukan kompetisi pasar. Ketika India, koloni Inggris, juga memasok gula ke Eropa, VOC surut dari percaturan perdagangan gula. Penggilingan yang aktif merosot menjadi hanya tinggal sepuluh buah pada tahun 1660.<sup>6</sup>

Mundurinya VOC dari perdagangan gula ke Eropa, tidak menurunkan semangat orang-orang Tionghoa dalam pengusaha gula. Hal ini bisa dibuktikan oleh kegigihan mereka untuk tetap mengusahakan pengepresan gula, yang pada tahun 1710 mencapai sejumlah 130 buah penggilingan, dengan produksi rata-rata setiap penggilingan sekitar 300 *pikul*. Meskipun demikian pada masa-masa selanjutnya terjadi pasang surut pada jumlah penggilingan maupun produksinya, seperti dalam tahun 1745 terdapat 65 penggilingan, sedang pada 1750 naik menjadi 80, dan diakhir abad ke-18 merosot tinggal 55 penggilingan yang memasok sekitar 100.000 *pikul* gula.<sup>7</sup>

Tentu muncul pertanyaan apa yang menyebabkan jumlah penggilingan di atas mengalami pasang-surut sangat drastis? Ada kemungkinan karena sederhananya penggilingan atau pengepres gula tersebut sehingga dapat dipindah-pindahkan. Bentuk dan teknologi pengepres tebu ini, hanya terdiri dari dua buah selinder batu atau kayu yang diletakkan berhimpitan, dengan salah satu selinder diberi tonggak sedang pada ujung tonggak diikatkan ternak, atau digunakan tenaga manusia (digerakkan secara manual) untuk memutar selinder. Sementara itu pada salah satu sisi pengepres biasanya satu orang atau lebih memasokkan tebu. Kemudian hasil pengepresan dialirkan ke kuali besar yang terletak tepat di bawah selinder. Mudah pengoperasiannya dan dapat dipindah-pindahkan menurut kebutuhan. Di masa panen tebu, penggilingan-penggilingan ini akan dibawa menghampiri kebun

<sup>5</sup> VOC biasanya membeli dari para manufaktur Tionghoa, dengan harga setiap *pikul* antara empat hingga enam *rijksdaalder* (tergantung kualitasnya).

<sup>6</sup> Geerligs, 1912, *The World's Cane Sugar Industry Past & Present*, hal. 117.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 117.

yang sedang panen.<sup>8</sup>

Sedang tenaga kerja yang digunakan penggilingan penggilingan Tionghoa ini, dikerahkan buruh-buruh etnis Tionghoa yang sangat banyak,<sup>9</sup> dan buruh-buruh Jawa yang didatangkan dari karesidenan-karesidenan pesisir Utara Jawa Tengah, terutama dari Cirebon, Tegal dan Pekalongan.

Ada dua dugaan tentang sebab-sebab merosot hingga berakhirnya penggilingan-penggilingan ini. Pertama, diajukan oleh Knight yang melihat bahwa, faktor-faktor ekologis cukup besar pengaruhnya sehingga menyebabkan keruntuhan industri gula *Ommelanden*. Sebagaimana diketahui, dalam proses pemasakan gula sangat banyak diperlukan kayu bakar. Rupa-rupanya orang-orang Tionghoa, dalam periode hampir seabad, telah dengan sangat intensif, menggunduli pohon-pohon dan fertilitas dataran rendah Batavia.<sup>10</sup> Sedang dugaan lain dapat diikuti dari “Geschiedenis van de suiker op Java” (Sejarah Gula di Jawa), yang memberi sepenggal informasi yang menyatakan bahwa penggilingan *ommelanden* sangat tergantung pada modal yang disediakan oleh *Compagnie (Vereenigde Oost-Indische Compagnie—VOC)*. *Compagnie*, setiap tahunnya, menyediakan dana untuk uang panjar atau persekot sebesar 8.000 *gulden*. Dan bantuan keuangan ini terhenti dengan terjadinya peperangan di Eropa (oleh Napoleon).<sup>11</sup> Bagi penulis kedua dugaan tersebut bisa saling berkorelasi. Meskipun dugaan yang pertama akan sulit untuk dibuktikan, karena belum ada penelitian untuk mendukung pendapat tersebut. Sedang pendapat kedua mungkin lebih mendekati kebenaran. Sebab berhentinya penggilingan-penggilingan Tionghoa ini juga bersamaan waktunya ketika VOC bubar di akhir abad 18.

Namun demikian, bagaimanapun juga, gula atau sirup (*molasses*) tetap menjadi barang-dagangan yang dikonsumsi oleh masyarakat

<sup>8</sup> Elson, 1978, “The Impact of Government Sugar Cultivation in the Pasuruan Area, East Java, During the Cultivation System Period,” hal. 37.

<sup>9</sup> Disebabkan oleh berlimpahnya populasi komunitas Tionghoa di sekitar Batavia, membuat komunitas Eropa ketakutan. Sehingga terjadi “pembasmian” orang-orang Tionghoa di tahun 1740. (Hoetink, 1923, *op. cit.*)

<sup>10</sup> Knight, 1980, *Ioc. cit.*, hal. 180.

<sup>11</sup> *ENI*, jilid. IV, 1905, hal. 148.



Eropa yang bermukim sementara waktu di Jawa dan pesisir Asia Tenggara dan Timur. Karena, selain gula dipergunakan sebagai pencampur minuman kopi, coklat dan teh; *tetes* (gula kentall/*juice*) pun dapat diolah melalui fermentasi tertentu, diubah menjadi arak atau rum.<sup>12</sup> Sehingga, meskipun industri *ommelanden* runtuh di akhir abad 18, tidak mematikan bisnis penggilingan gula yang mulai muncul di tempat-tempat lain. Gula masih tetap diproduksi oleh orang-orang Tionghoa di sepanjang karesidenan-karesidenan pesisir Utara Jawa Tengah dan Timur (*Oosthoek*).<sup>13</sup> Dikelola dengan cara sewa desa, yaitu desa-desa dilepaskan dari kekuasaan para bupati, antara 3 sampai 10 tahun.<sup>14</sup>

## Industri Gula Pamanukan-Ciasem

Dalam tahun 1820-an, mulai bermunculan pabrik-pabrik yang dikelola langsung oleh orang-orang Eropa, seperti pabrik-pabrik gula yang didirikan di Pamanukan Ciasem, Bekasi (Jawa Barat) dan di *Oosthoek* (Jawa Timur).

<sup>12</sup> Arak dan rum menjadi hampir separuh produksi *ommelanden*. Setelah industri gula Batavia ini runtuh, produksi arak dilanjutkan oleh para pedagang-besar Inggris pada perkebunan Pamanukan-Ciasem, Jawa Barat. Dalam tahun 1820-an, dua buah penggilingan milik Tionghoa yang berada di Karesidenan Pekalongan, yang memproduksi sekitar 1800 *pikul* gula setiap tahunnya, mengirimkan empatperlima produksi *tetes*-nya (sekitar 1.440 *pikul*) ke Batavia dan Semarang untuk disuling menjadi rum. (AKP 82/1 B) Penyulingan rum menyurut dengan runtuhnya industri gula yang dikelola para pedagang-besar Inggris di akhir 1820-an. Raffles pernah memuji arak buatan Jawa, ia mensejajarkan arak Jawa dengan arak buatan Filipina. Disebutkannya, bahwa arak nomor satu produksi Jawa terkenal dengan julukan *arak api* (Raffles, 1817, *The History of Java*, hal. 176-7). Pada kurun *cultuurstelsel*, arak hanya diproduksi oleh beberapa pabrik, antara lain Wonopringo (di Pekalongan). Menurut Geerligs, merosotnya produksi rum dan arak, karena dianggap telah tidak menguntungkan untuk dijual. Di Eropa produksi rum dan arak sangat melimpah, sehingga harganya merosot (Geerligs, 1912, *op. cit.*, hal. 116).

<sup>13</sup> Namun kedudukan para pengolah gula terlalu lemah, sehingga pada saat terjadi meningkatnya permintaan gula, manufaktur-manufaktur yang dikelola oleh orang-orang Tionghoa ini dirampas oleh orang-orang Eropa (Knight, 1980, *loc. cit.*, hal. 181).

<sup>14</sup> Dalam kurun pemerintahan Daendels, 1808-11, sistem sewa desa ini pernah dicoba untuk dihapuskan. Tetapi penghapusan sewa desa ini pun oleh Daendels dikenakan pada desa-desa yang memproduksi barang yang tidak menguntungkan gubernemen. Sedang desa-desa penghasil nila dan tebu gula yang menggunakan sistem sewa desa, masih tetap dipertahankan. (Burger, 1962, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, jilid I, hal. 103, 106).

Industri gula di Jawa Barat didukung oleh modal besar, dengan menggunakan mesin-mesin impor yang sebelumnya tidak pernah digunakan di Jawa, seperti bisa dilihat dalam salah satu surat *Jessen Trail and Company* ditunjukkan kepada NHM yang mengatakan:

In embarking on the enterprises we now have on hand, we were sensible of the deficiency of the rude and imperfect machinery by which the manufacture of sugar was carried on here, and therefore determined to import European machinery, with skilful men to conduct the same... We now have [1826] three distinct sets of mills, where we employ a European horizontal mill with three cylinders, driven by a six horsepower steam engine; a European eight horse-power mill, with three cylinders, worked by cattle, and three auxilliary stone perpendicular mills, also worked by cattled, with six complete sets of iron boilers and iron and copper clarifiers; as also three distilleries, comprising six European copper stills ... and a suitable complement of fermenting systems for distilling the molasses into Arak and Rum.<sup>15</sup>

(Dalam memulai perusahaan-perusahaan sekarang ada di tangan kami, kami berpikir kurang sempurna mesin kasar dan yang tidak sempurna di mana manufaktur dilakukan di sini, dan memutuskan mengimpor mesin Eropa, dengan orang-orang trampil untuk melakukan hal yang sama ...Sekarang [1826] kami mempunyai tiga set mesin uap yang berbeda-beda; satu penggilingan Eropa delapan tenaga kuda, dengan tiga selinder, dikerjakan oleh lembu, dan tiga penggilingan putar batu tambahan, juga ditarik oleh lembu, dengan enam perangkat lengkap pemasak baja dan penjernih baja dan tembaga; juga tiga mesin penyuling, terdiri dari enam penyuling tembaga Eropa... dan satu pelengkap yang sesuai dari sistem fermentasi untuk menyuling gula-kental menjadi Arak dan Rum)

Kaum pedagang besar Inggris yang telah terlibat pengoperasian

<sup>15</sup> Knight, 1980, *loc. cit.*, hal. 182. Hasil yang diperoleh dari penggilingan modern ini antara lain seperti, kualitas gula lebih baik, butir-butir gula lebih halus, dan sangat menghemat kayu bakar. Untuk mengolah 20 *pikul* tebu, dengan semakin baiknya tungku perapian, hanya dibutuhkan satu *vadem* kayu. Dan juga menghemat masa giling. Seperti jika digunakan penggilingan-"Tionghoa"-primitif, yang untuk menghasilkan 300 *pikul* gula diperlukan waktu giling tigapuluh hari, sedang dengan digunakannya penggilingan baru ini hanya dibutuhkan waktu sekitar sembilan atau sepuluh hari giling (Elson, 1978, "The Impact of Gouvernement Sugar Cultivation in the Pasuruan Area, East Java, During the Cultivation System Period," hal. 37).

pabrik-pabrik gula di India, beramai-ramai<sup>16</sup> melakukan investasi dengan melakukan pembukaan tanah-tanah baru di Jawa Barat. Hal ini dimungkinkan karena pasar di Eropa telah terbuka kembali setelah berakhirnya peperangan yang dilakukan Napoleon.<sup>17</sup> Mereka berusaha untuk memvitalisasikan industri gula di Jawa, dengan harapan minimal bisa menyamai produksi industri gula India. Mereka mengelola perkebunan Pamanukan-Ciasem seluas 2.254 *bau*.

Bagaimana dengan produksinya?

Ternyata hingga 1826, kurun pemerintahan Du Bus de Gisignies (1826-30), hanya mencapai 19.795 *pikul*,<sup>18</sup> sangat sedikit jika dibandingkan dengan produksi penggilingan Tionghoa selama abad ke-18.

Agaknya ada masalah-masalah yang tidak teratasi, akibat kelangkaan informasi geografis maupun “kebiasaan” penduduk setempat dalam pemilihan lokasi industri. Seperti, daerah Pamanukan-Ciasem, seluas 213.000 hektar dengan populasi sedikit lebih dari 21.000 orang (tahun 1819). Di wilayah ini terdapat beberapa tuan tanah, yang melalui para perantaranya, mandor dan lurah, mengorganisir petani untuk memproduksi agrikultur padi. Para tuan tanah ini tidak ingin kehilangan pendapatan yang pasti dari tanaman padi, akibat kerja agrikultur desa diserap oleh industri gula. Hal ini berakibat buruk terhadap para pengelola *onderneming* gula, karena mereka tidak bisa merekrut buruh dari wilayah tersebut.

Industri gula mencoba menyelesaikan masalah untuk mendapatkan buruh-buruhnya dengan cara mengirimkan agen-agen pencari

<sup>16</sup> Knight menyediakan sederetan nama, seperti yang agak penting William Taylor Money, Thomas MacQuoid, Peter Jessen, John Palmer dan sebagainya dan membentuk lima buah firma, dua di antaranya yang terbesar—adalah *Jessen Trail and Co.* dan *Palmer & Co.* (Knight, 1980, *op. cit.*, dan Knight 1975, “John Palmer and Plantation Development in Western Java during the Earlier Nineteenth Century,”). John Palmer adalah pedagang kain dan candu selama kurun pemerintahan Inggris yang singkat di Jawa. Dan di akhir pemerintahan Raffles, J. Palmer memulai usaha perkebunannya di wilayah Subang, Jawa Barat.

<sup>17</sup> Napoleon dikalahkan sama sekali dalam pertempuran Waterloo, di Belgia, Juni 1815, kemudian dibuang ke St. Helena.

<sup>18</sup> Geerligs, 1912, *op. cit.*, hal. 118.

tenaga kerja ke wilayah karesidenan-karesidenan pesisir Utara Jawa Tengah, yang dalam kurun itu memang telah padat penduduknya, seperti dari Pekalongan dan Cirebon. Dengan menghubungi para lurah dalam karesidenan-karesidenan pesisir ini, maka industri gula Jawa Barat berhasil mengumpulkan sekelompok *bujang*<sup>19</sup> yang bersedia bekerja sebagai buruh upah di *onderneming-onderneming* gula tersebut.

Namun demikian, keadaan penyediaan tenaga kerja semakin memburuk. Sehingga pada penutup tahun 1824, Gubernur Van der Capellen, menyetujui bahwa beban merekrut buruh dialihkan kepada pemerintah, dan Capellen memerintahkan residen-residen di pesisir Utara Jawa Tengah untuk memberikan "*all necessary help and support*"<sup>20</sup> (semua dukungan dan pertolongan).

Dengan keterlibatan gubernemen menyediakan tenaga kerja ini, paling tidak kebutuhan minimal, antara 150 hingga 200 orang buruh untuk setiap pabrik, agak teratasi. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa buruh-buruh *onderneming* tersebut tidak akan melarikan diri, sebab keadaan seperti itu justru sering terjadi. Pada saat ada tindakan majikan yang dianggap represif, buruh-buruh tersebut lebih memilih kembali ke desa-desa tempat asal mereka atau bekerja pada lahan-lahan tak bertuan di luar *onderneming*.

Masalah lain yang dihadapi industri Pamanukan-Ciasem adalah lahan tebu, karena kebun-kebun tebu yang dibuka tidak diletakkan di sawah, tetapi dilakukan pembukaan tanah yang sama sekali baru, maka diperlukan ketekunan tersendiri untuk menyiapkan tanah darat menjadi tanah sawah. Padahal, tebu adalah tanaman manja yang menuntut irigasi dan drainasi intensif.

Akibatnya, para pekebun<sup>21</sup> tersebut menjadi frustrasi, karena laba yang diharapkan tidak kunjung tiba sementara industri telah menyedot cukup banyak uang, dan mengakibatkan kebangkrutan.

<sup>19</sup> Untuk penjelasan tentang *bujang* ada di bawah.

<sup>20</sup> Knight, 1980, *loc. cit.*, hal. 187-91.

<sup>21</sup> Untuk selanjutnya dalam tulisan ini tidak menggunakan istilah pekebun, melainkan *fabriekant*. *Fabriekant* adalah orang yang hanya mengusahakan penggilingan atau *fabriek* (pabrik). Dalam arsip setelah 1850, istilah *fabriekant* diganti menjadi *ondernemer* dikarenakan *fabriekant* telah lebih mendapat keleluasaan dari gubernemen, dan lebih dilibatkan dalam pengolahan

Seperti, William T. Money mengatakan “*My funds at Bombay, are swallowed up by the Java estate.*”<sup>22</sup> (Dana-dana saya di Bombay, tertelan oleh perkebunan [di] Jawa) Atau, firma yang dikelola oleh Thomas MacQuoid, *MacQuoid Davidson and Co.*, hancur pada 1826. Di akhir 1820-an, industri gula Jawa Barat, telah hancur sama sekali, dan ditinggalkan para pengelolanya.

## Pencanangan Politik-Ekonomi *Cultuurstelsel*

Ada beberapa variabel terkait yang melatar belakangi diajukannya *cultuurstelsel* oleh Van den Bosch. Pertama, keadaan di negeri Belanda sangat buruk setelah berakhirnya peperangan Napoleon. Kemudian Negeri Belanda juga mengalami krisis politik dengan Belgia, yang berlanjut menjadi perang pada awal 1830.<sup>23</sup> Selain itu peperangan di Jawa melawan Diponegoro (1825-30), cukup menguras keuangan pemerintah. Bahkan dalam kurun pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Capellen, pemerintah Hindia Belanda berhutang pada firma *Palmer and Co.* sebesar 20 juta gulden.<sup>24</sup> Dengan kata lain diajukannya *cultuurstelsel* oleh Bosch adalah untuk menutup defisit kronis perekonomian yang dihadapi oleh Negeri Belanda.

Dalam penjabaran konsepnya untuk mengisi kas Negeri Belanda,

kebun-kebun. Tetapi, apa yang dikarakterisir oleh pengusaha pabrik gula Jawa Barat lebih tepat disebut sebagai *planter* ketimbang *fabriekant* ataupun *ondernemer*, sebab tanah-tanah yang dikuasainya hasil dari pembelian selama kurun pemerintahan Raffles den satu dekade sesudahnya. Jadi mereka memiliki pabrik sekaligus tanahnya (pemilikan tanah partikulir). Baru setelah berakhirnya *cultuurstelsel*, sebutan untuk pengusaha perkebunan, industri gula maupun *onderneming-onderneming* lainnya, diseragamkan menjadi *planter*. Meskipun demikian makna *planter* kurun pasca 1870 berbeda dengan *planter* kurun 1820-an, terutama antara bentuk persewaan jangka panjang (*erfpacht*), setelah 1870, dan bentuk pemilikan tanah (*grondbezit*) dalam kurun 1820. Dalam kurun *cultuurstelsel* sebutan *planter* mengacu kepada buruh-buruh bumiputra yang bekerja dalam *onderneming*.

<sup>22</sup> Knight, 1980, *loc. cit.*, hal. 185.

<sup>23</sup> Belgia berusaha melepaskan diri dari Belanda, yang sebelumnya telah disatukan melalui perjanjian Wina tahun 1815. Belgia akhirnya mendapatkan kemerdekaannya dalam tahun 1839. (Riclefs, 1982, *A History of Modern Indonesia*, hal. 114)

<sup>24</sup> Mansvelt, 1924, *Geschiedenis van de Nederlandsche Handelmaatschappij*, Jilid I, hal. 180.

Hindia Belanda harus langsung dikelola di bawah penanganan pemerintah. Penanganan khas seperti ini menurut Bosch diadaptasi dari sistem yang pernah diterapkan pada masa kejayaan VOC. Dengan digunakannya istilah *stelsel*, yang dalam abad 18 diterapkan di Priangan (*Preangerstelsel*), dan abad-19 diterapkan *cultuurstelsel* untuk seluruh Jawa. Istilah *stelsel* sebetulnya mengacu pada situasi yang khas dengan dipergunakannya suatu politik khusus. Hal ini dilakukan karena gagalnya suatu politik “bebas” aktif untuk melembaga, atau sebagai dikatakan Doorn dan Hendrix: “Di front ekonomi semua aktifitas pemasaran swasta dilarang.”<sup>25</sup>

Pemberlakuan sistem politik-ekonomi seperti ini dapat terjadi dikarenakan pada saat itu kondisi kelas burjuasi Belanda sangat lemah. Rancangan-rancangan untuk membuka Jawa atas dasar keterlibatan aktif investor swasta, dapat digagalkan oleh arus konservatif (pemerintah) yang dalam kurun tersebut mendominasi politik di Negeri Belanda.<sup>26</sup> Dengan kata lain, Jawa belum memungkinkan dikelola secara liberal.

Dalam kurun ini pemerintah telah mempunyai dua lembaga yang diharapkan menjadi tulang punggung sistem ini. Pertama adalah NHM,<sup>27</sup> didirikan tahun 1824, sebagai lembaga perdagangan monopoli; kedua, *Javasche Bank*, didirikan tahun 1828, sebagai pendukung finansial.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Doorn, Jacques A.A. dan Hendrix, Willem J., 1979, “Timbulnya Ekonomi Tergantung: Konsekuensi Pembukaan Priangan Barat Terhadap Proses Modernisasi,” hal. 42.

<sup>26</sup> Du Bus de Gisignies, salah satu pendukung sistem eksploitasi swasta, pernah mengajukan rancangan pengelolaan Jawa secara liberal yaitu dengan mengambil tanah-tanah hutan dan tanah-tanah di sekeliling desa menjadi milik kaum pengusaha *onderneming* swasta, dan untuk menciptakan buruh-buruhnya, rakyat bumiputra dicabut hak-hak ‘tradisional’-nya dalam pembukaan hutan-hutan, dengan cara ini akan tercipta lapisan sosial yang disebut proletar. Juga, seperti dikatakan Polak, dilakukan individualisasi tanah untuk mempercepat terciptanya kelas buruh di Jawa, namun rancangan ini akhirnya ditolak Raja Willem I. (Polak, 1961, “Tentang Cultuurstelsel dan Penggantiannya,” hal. 18-9)

<sup>27</sup> NHM dibentuk atas inisiatif raja Willem I, dalam rangka menghancurkan hegemoni komersial Inggris di Jawa. Pada kurun tersebut Inggris dengan “perdagangan bebas”-nya, memiliki armada kapal lebih dari 100, dari 171 kapal yang berlabuh di Batavia, kapal Belanda hanya 43 buah. Berangkat dari sini upaya-upaya memajukan perdagangan Belanda didorong untuk diwujudkan dalam bentuk satu maskapai besar. Modal pertama untuk NHM sebesar satu

Pada 13 Agustus 1830, Bosch menyetujui untuk menanam tebu gula di karesidenan-karesidenan Jawa Tengah dan Timur, yang dianggap situasinya menguntungkan.<sup>29</sup> Ini menjadi isyarat bagi pembukaan industri gula yang berbentuk perusahaan negara (*staatbedrijf*).<sup>30</sup> Pemilihan Jawa Tengah dan Timur ditekankan untuk menghindari “nasib” tragis seperti yang menimpa industri Pamanukan-Ciasem. Dan memang Jawa Barat menjadi terhindar sebagai *onderneming* gula, seperti dinyatakan oleh Knight:

Its crucial feature was the industry's shift away from a plantation base in western Java... and into the colony's northeastern Residencies, where there were already relatively dense peasant populations and large areas of country under irrigated *padi* cultivation.<sup>31</sup>

(Ciri-ciri krusialnya adalah perpindahan industri dari basis perkebunan di Jawa Barat ... dan menuju koloni di karesidenan-karesidenan pantai-utara, dimana relatif telah tersedia populasi petani padat dan area-area luas pedesaan dengan kultivasi padi beririgasi.)

Pengelolaan industri dilakukan secara profesional, dengan mengkaitkan modal, manajemen dan tenaga kerja yang memadai. Modal diwujudkan dalam penggunaan gabungan teknologi canggih (kincir air ataupun motor uap) dengan penggilingan manual Tionghoa.<sup>32</sup> Manajemen ditangani langsung oleh

juta *gulden*, sedang langkah pertama keterlibatannya dalam perdagangan adalah, dengan memberikan hak penjualan kopi Priangan selama duabelas tahun. Pemberian prioritas dan keistimewaan dalam menjual hasil-hasil Jawa di Eropa ini, implisit berarti penanaman gubernemen harus diperluas. (Polak, *Ibid.*, hal. 17-8)

<sup>28</sup> Dalam prakteknya selama kurun *cultuurstelsel* peranan *Javasche Bank* tidak nampak, lembaga ini baru menunjukkan sosoknya dalam kurun pasca 1870. Hal ini terjadi karena modal nominal yang dijanjikan oleh pemerintah Belanda sebesar 4 juta *gulden* ternyata yang masuk dalam sirkulasi bank ini hanya setengah juta *gulden*. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memang dalam kondisi benar-benar defisit akibat membiayai perang Jawa. (Mansvelt, 1924, *op. cit.*, hal. 192) Sehingga bank ini hanya berfungsi sebagai penyalur keuangan NHM saja.

<sup>29</sup> Elson, 1978, *loc. cit.*, hal. 26.

<sup>30</sup> Sebetulnya tidak dapat dikatakan seratus persen sebagai perusahaan negara, karena gubernemen hanya bertanggung jawab terhadap penyediaan tebu, sedang pabriknya sendiri dibangun secara patungan antara gubernemen dengan para kontraktor atau *fabriekant*.

<sup>31</sup> Knight, 1980, *loc. cit.*, hal. 177-8.

orang-orang Eropa. Sedang tenaga kerja kasar dikerahkan dengan menggunakan ikatan-ikatan perhambaan yang dimediasikan oleh lapisan penguasa bumiputra,<sup>33</sup> dengan mana kerja-kerja tersebut bisa didapat secara gratis dan atau dengan membayar upah kecil. Kerja-kerja yang dibebankan pada penduduk bumiputra ini biasa disebut dengan *heerendienst* dan *cultuurdienst*. *Heerendienst* untuk kerja rodi pembuatan infrastruktur industri seperti pembangunan jembatan, bendungan air (dam), pembuatan jalan sekitar pabrik dan sebagainya; sedang *cultuurdienst* untuk kerja menanam jenis tanaman yang di panen.<sup>34</sup>

Pada bagian lain pemerintah Belanda melakukan upaya-upaya untuk menembus pasar Eropa, seperti membuat peraturan perdagangan khusus dalam bentuk kelonggaran-kelonggaran cukai impor. Yaitu untuk setiap cukai sebesar 100 *gulden*, diberi potongan 15 *gulden*. Regulasi ini hanya berlaku bagi perdagangan gula saja.<sup>35</sup>

Fondasi industri perkebunan ini ternyata berhasil baik, gula dari Jawa mampu mendominasi pasaran dunia. Produksi berkembang sangat cepat, dari 752.657 *pikul* (tahun 1840) hingga mencapai 1.764.505 *pikul* (di tahun 1860), dengan fluktuasi laba antara 280.780 sampai 453.656 *gulden* per tahunnya.<sup>36</sup>

Tentu saja, hal ini berhasil menguatkan perekonomian negeri induk; dan juga menguatkan ekonomi kelas burjuasi Belanda yang

<sup>32</sup> Di awal *cultuurstelsel* terdapat 30 kontraktor, terdiri dari 17 Tionghoa, 7 Belanda dan 6 Inggris. Hanya orang-orang Inggris saja yang telah menggunakan teknologi mesin uap, yang lainnya masih menggunakan pengepres “tradisional”. Orang-orang Belanda baru mendatangkan mesin-mesin canggih dalam tahun-tahun 1835-1836. (Deer, 1949, *The History of Sugar*, hal. 222).

<sup>33</sup> Digunakannya lapisan ini, di satu sisi dapat dilihat sebagai penghargaan, namun alasan yang sebenarnya adalah untuk menghindari konflik dengan orang-orang bumiputra berpengaruh ini, yang dalam tahun-tahun sebelumnya bisa meletus menjadi Perang Jawa (Diponegoro), hal mana merupakan kesalahan fatal dalam masa “percobaan” liberal (1816-1830). (Polak, 1961, *loc. cit.*, hal. 157)

<sup>34</sup> Hanya gula dan nila yang termasuk ke dalam kategori *cultuurdienst*, sementara kopi tidak termasuk.

<sup>35</sup> Resolusi *Gouverneur Generaal in Rade* (Badan Penasehat Gubernur Jenderal) tanggal 30 Agustus 1831, No. 33, *Staatsblad* 1831, No. 50.

<sup>36</sup> Lihat tabel-tabel Fasseur, 1975, *Kultuurstelsel en Kolonial Baten: De Nederlandse Exploitatie van Java 1840-1880*, hal. 256-9.



telah dilibatkan dalam bisnis-bisnis pemerintah (seperti sebagai kontraktor). Hal ini mendorong klas burjuasi Belanda untuk mengambil alih peranan yang selama ini dipegang oleh negara dalam pengelolaan industri. Salah satu caranya adalah perjuangan politik melalui *Tweede Kamer* (Majelis Rendah Negeri Belanda). Seperti dilakukan oleh salah seorang pendekar golongan Liberal yang cukup vokal, Van Hoevell,<sup>37</sup> dalam pidato parlementer pada 8 Desember 1851, menguraikan:

... I would like to see is that within the workings of the Culture System the government should delegate as much as possible to private initiative. .. As an example, ... when the new sugar contracts are awarded, I want the needs of the factories to be no longer met by the government but by private entrepreneurs. There will not be any difficulties as long as the people are not overburdened by signorial services ... The owners of sugar factories should be given the free disposal of their produce, and in this way the government will be able to gradually withdraw from the trading sector ... When the sugarmillers have the free disposal of their product, and no longer receive advance payments, they will learn to be more dependent on their own powers. And it will be easier for them to make the transition to another system where without the interference of the government they will make contracts with the people regarding the planting of the crops ...<sup>38</sup>

(... Saya ingin melihat bahwa dalam pelaksanaan *Cultuurstelsel* gubernemen harus mendelegasikan sebanyak mungkin pada inisiatif swasta. .. Sebagai misal, ... ketika kontrak-kontrak gula baru diberikan, saya ingin kebutuhan pabrik-pabrik tidak lagi dipertemukan oleh gubernemen tetapi oleh para pengusaha swasta.

Tidak akan ada kesulitan sejauh rakyat tidak dibebani berlebihan

<sup>37</sup> Baron W.R. van Hoevell, dalam tahun 1848 pernah mengadakan demonstrasi di Batavia, dan mengajukan petisi untuk kebebasan pers, pembentukan sekolah-sekolah di daerah koloni (dalam hal ini di Jawa) dan perwakilan tanah Hindia Belanda di *Tweede Kamer*. Akibatnya ia kemudian diusir dari Hindia Belanda. Namun dalam waktu dua tahun ia telah berhasil masuk ke *Tweede Kamer*, dan menjadi juru bicara kaum Liberal. Pada dasarnya secara prinsip Hoevell tidak anti terhadap cara-cara *cultuurstelsel* dalam mengeduk keuntungan, namun dia sangat anti terhadap pemerintah Belanda yang mengantungi sebagian besar laba yang didapatkan dari sistem tersebut. Hal yang menjadi alat perjuangan gagasan politik Hoevell adalah peningkatan standar pendidikan penduduk bumiputra Jawa untuk meningkatkan “kesejahteraan” ekonomi.

<sup>38</sup> Dalam Penders, 1977, *Indonesia Selected Documents on colonialism and Nationalism, 1830-1942*, hal. 38.

oleh pelayanan feodal [*signorial*] ... Para pemilik pabrik gula harus diberikan kebebasan disposal dari produk mereka, dan dengan cara ini gubernemen akan dapat secara gradual menarik diri dari sektor perdagangan ... Ketika para penggiling gula mempunyai kebebasan pembagian (*disposal*) dari produknya, dan tidak lagi menerima pembayaran uang muka, mereka akan belajar untuk menjadi lebih bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Dan bagi mereka akan lebih mudah membuat transisi ke sistem lain di mana tanpa intervensi pemerintah mereka akan membuat kontrak dengan rakyat berdasarkan penanaman tanaman yang dipanen [*crops*] ...)

Walaupun secara resmi negara melepas para kontraktor gula pada 1879 (*Suiker Wet*), tetapi akibat tekanan tekanan keras dari kaum Liberal ini, maka sejak 1850 gubernemen memberi kelonggaran-kelonggaran pada para pengelola industri gula untuk membuka interaksi langsung antara pabrik dengan petani, seperti dalam melakukan perjanjian penanaman dan merekrut tenaga kerja.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Dibahas di bawah. Sejak saat ini pula sebutan *fabriekant* diganti dengan *ondernemer*.

# Bab III: Produksi Barang-Dagangan Di Pekalongan

## Pengantar

Ada hal yang saling berkait dalam menentukan karesidenan yang ditunjuk untuk pengembangan tanaman ekspor gula dan nila, yaitu mempunyai lahan sawah yang luas dan jumlah penduduk yang memadai. Berdasarkan kriteria ini maka dipilihlah karesidenan-karesidenan pesisir Utara Jawa Tengah dan Timur pada pertengahan tahun 1830, meliputi Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya dan Pasuruan (*Oosthoek*). Sedang ekspansi untuk penanaman tanaman ekspor yang padat karya tersebut ke karesidenan-karesidenan pedalaman,—Madiun, Kediri, Banyumas dan Bagelen—dilakukan pada tahun berikutnya.<sup>1</sup> Oleh karena itu, kiranya perlu pada awal bab ini diberikan latar geografis dan jumlah penduduk di karesidenan Pekalongan yang disusun berdasarkan dua buah statistik terbitan tahun 1820 dan 1862 dan catatan-catatan yang diberikan residen dalam *Politiek Verslag*. Meskipun, statistik-statistik dalam abad 19 kurang bisa dipercaya keakuratannya, namun minimal pendataan yang diberikan dapat sedikit memberi gambaran umum tentang karesidenan ini, dengan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi penyusunnya.

Pada sub-bab selanjutnya dikemukakan konsekuensi dari diproduksinya tanaman ekspor secara luas, mengakibatkan hancurnya tanaman kebutuhan pokok petani, beras. Hancurnya produksi beras membawa dampak harga beras melambung tinggi. Sehingga gubernemen perlu ikut memikirkan dan mengajukan jalan ke luar dari kekurangan beras ini, dengan memperkenalkan varietas padi baru. Dalam sub-bab ini juga dikemukakan dua barang-dagangan yang diproduksi karesidenan ini, kopi dan nila. Pembahasan dua barang-dagangan ini dimaksudkan untuk memperlihatkan seberapa besar penyerapan tenaga kerjanya dan juga besar laba yang dikeduk dari kedua tanaman dagang tersebut.

Sub-bab ketiga mengangkat persoalan di sekitar bupati-bupati

<sup>1</sup> Burger, 1962, *op.cit.*, hal. 185.

karesidenan ini yang selalu “merongrong” proyek-proyek gubernemen. Pelacakan yang difokuskan pada persoalan ekonomi, menemukan bahwa rongrongan terjadi akibat bupati juga mempunyai kepentingan dalam melakukan produksi barang-dagangan. Dari penjelasan ini maka cukup beralasan bagi gubernemen untuk mengubah jaringan ekonomi yang dibentuk oleh bupati, dengan melakukan penggantian bupati di tahun 1848. Sejak tahun tersebut masalah bupati “perongrong” dapat disingkirkan dan sebagai gantinya muncul bupati *pengabd*.

Sedang pada bagian terakhir bab ini dibahas bagaimana desa menyiapkan tenaga kerja bagi sistem penanaman gubernemen. Dalam penyiapan tenaga kerja tersebut ada masalah-masalah khusus yang dialami oleh desa. Masalah ini berangkat dari pelapisan sosial yang ada di desa; pelapisan sosial sendiri telah ada sebelum hadirnya kolonialisme. Yang jadi masalah dalam pelapisan sosial adalah, bahwa terdapat orang-orang yang merasa memiliki hak-hak istimewa karena menjadi pendiri atau pemuka desa, sehingga mereka sulit “diatur” oleh regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh gubernemen. Seperti, dalam hal penguasaan tanah periodik (*tijdelijk grondbezit*), orang-orang yang berhak istimewa mengambil sebagian besar lahan pertanian yang ada, sedang lapisan petani rendah hanya mendapat sisanya. Masalah-masalah ini tak bisa terselesaikan, sehingga mendorong munculnya buruh secara besar-besaran dalam pabrik-pabrik gula yang tidak perlu dikerahkan melalui perjanjian-perjanjian kerja dengan gubernemen.

## Batas Geografis Dan Jumlah Penduduk

Terdapat dua batas alamiah yang penting artinya bagi karesidenan Pekalongan. Pertama, di sebelah Utara langsung berhadapan dengan laut Jawa, kedalaman yang memadai dari pantainya memberi kemungkinan kapal-kapal dagang merapat pada dermaga-dermaganya. Gubernemen banyak mendirikan gudang-gudang untuk menampung produksi tanaman ekspor sebelum dikapalkan di sepanjang pantai ini. Kedua, di sebelah Timur, Alas Roban (hutan jati), menjadi semacam ruas pemisah dengan karesidenan Semarang. Terdapatnya hutan ini penting artinya bagi industri gula, sebab sebagian dari kebutuhan kayu bakar—selain disediakan distrik Subah—diambil dari hutan ini.

Kemudian di sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Pemalang,<sup>2</sup> merupakan kabupaten paling Timur dari Karesidenan Tegal. Dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Karesidenan Banyumas, yang menjadi hulu dari sungai-sungai yang mengalir di Pekalongan.

Sampai tahun 1809 Raresidenan Pekalongan terbagi dalam tiga kabupaten: Pekalongan, Batang dan Wiradesa. Tetapi kemudian salah satu kabupatennya, Wiradesa, dihapuskan dalam kurun pemerintahan Daendels.

Dalam statistik tahun 1820, kabupaten Pekalongan dan Batang dipecah menjadi lima divisi dan empatbelas distrik. Tetapi menjelang *cultuurstelsel*, *divisi-divisi*<sup>3</sup> tersebut dihapuskan, sedang jumlah distrik disederhanakan menjadi duabelas buah.

Populasi karesidenan ini pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok etnis, yaitu penduduk bumiputra Jawa, kemudian non Jawa yang terdiri dari orang-orang Tionghoa dan Arab, dan terakhir orang Eropa (Belanda).

Kepadatan penduduk bumiputra Jawa cukup besar, seperti penghitungan tahun 1820 mencatat terdapat 136.348 orang bumiputra. Meskipun demikian angka-angka ini perlu diragukan ketepatannya, karena ada kemungkinan populasi setempat yang terserap bekerja sebagai buruh dalam *onderneming-onderneming* Jawa Barat, terlewatkan. Penduduk bumiputra tersebut tersebar relatif merata di setiap distrik. Penghitungan yang mungkin agak tepat baru ditemui dalam Politiek *Verslag* tahun 1859, yang mencatat sejumlah 282.427 jiwa,<sup>4</sup> jumlah tersebut meningkat menjadi 326.704 jiwa pada tahun 1862. Jumlah populasi ini terbagi menjadi 64.471 unit keluarga (*cacah*).

Percepatan pertumbuhan populasi bumiputra tersebut penulis duga

<sup>2</sup> Kabupaten ini hingga akhir 1840-an, pabrik gula Karangjar-nya, sangat tergantung dengan pasokkan tebu dari Pekalongan, yang mencakup 700 *bau* lahan tebu di distrik Sawangan (AC 408).

<sup>3</sup> Ini merupakan istilah asli yang digunakan dalam *Statistiek van de Residentie* Pekalongan 1820, ARP 82/1 B. Dalam bahasa Belanda biasanya *divisi* dapat dipersamakan dengan *afdeeling*.

<sup>4</sup> AKP 69/5.

akibat perbaikan kesehatan yang mulai diintensifkan awal 1850-an,<sup>5</sup> sehingga tingkat kematian dapat ditekan. Hal lain yang juga mendukung pertumbuhan penduduk ini adalah pembukaan daerah-daerah baru. Misalnya, dalam tahun 1820 luas karesidenan ini hanya 492 *paal*, namun pada tahun 1862 tercatat luas 799,6 *paal*. Berarti dalam jangka waktu 40 tahun telah terjadi perluasan wilayah sebesar 307,6 *paal*.<sup>6</sup>

Tabel 1

Luas distrik, jumlah desa, dan jumlah penduduk bumiputra.

Kabupaten	Distrik	Luas (dalam <i>paal</i> -persegi)	Jumlah desa	Jumlah penduduk bumiputra
Pekalongan	Pekalongan	16,6	161	33.204
	Pekajangan	15,5	114	25.195
	Sawangan	144,1	250	36.481
	Wiradesa	29,2	138	37.966
	Sragi	52,5	174	31.348
	Bandar	136,8	125	23.707
Batang	Batang	33,4	144	32.754
	Masin	38,2	101	18.348
	Sedayu	81,1	100	22.657
	Subah (Simbang)	104,8	50	24.484
	Kalisalak	88,8	114	20.116
	Kebumen	58,6	120	20.444
	Total	799,6	1.591	326.704

Sumber: *Statistiek der Residentie Pekalongan 1862*. (AKP 83 B/3)

Jumlah pemukim Tionghoa dan Arab tidak terlalu besar. Seperti, orang Tionghoa yang banyak terlibat dalam kegiatan pemasakan gula di pabrik-pabrik maupun yang bekerja sama dengan para bupati untuk mengolah nila, dalam tahun 1820 hanya berjumlah 1.667 dan meningkat lebih duakalinya pada 1859, menjadi 3.695 orang. Beberapa orang Tionghoa menjadi sangat berperan, karena terlibat penjaan barang-barang kelontong ke pelosok-pelosok desa. Mulai menetap dan berkembangnya pemukim Tionghoa, didukung oleh didirikannya pasar-pasar dalam beberapa distrik sejak akhir 1840-an.

<sup>5</sup> Kegiatan pencacaran dan pemberian obat-obatan mulai digiatkan sejak pertengahan abad. Dan mungkin ada semacam kewajiban untuk melaporkan keadaan kesehatan penduduk setiap tahun, sehingga hampir selalu pada bagian akhir *Politiek Verslag* didapati laporan keadaan kesehatan penduduk bumiputra.

<sup>6</sup> Perluasan-perluasan wilayah ini, bisa jadi sebagai cara menciptakan tenaga kerja bagi sistem. Sebab dalam regulasi-regulasi kontrak-kerja selalu dinyatakan buruh hanya bisa direkrut sejauh mereka menguasai tanah.

Selain orang Tionghoa, terdapat orang Arab dengan jumlah yang relatif kecil, tahun 1820 hanya terdapat 349 jiwa, dan tahun 1859 naik sedikit menjadi 411 orang.

Yang perlu dikemukakan dari orang-orang Arab dan Tionghoa di sini adalah, bahwa mereka telah terbiasa dengan kegiatan perdagangan, sehingga posisi keuangannya relatif baik. Dampaknya bagi masyarakat Pekalongan adalah, bahwa kedua golongan ini menjadi kelompok yang dekat dengan para bupati karesidenan ini, karena bupati banyak berhutang kepada mereka. Hal ini memberi ruang gerak bagi beberapa pemberi hutang untuk bersikap sewenang-wenang kepada rakyat kecil, seperti melakukan perampasan-perampasan tanah.<sup>7</sup>

Terakhir, adalah populasi masyarakat Eropa, yang biasanya menetap tidak terlalu lama. Mereka kebanyakan bekerja sebagai pengawas-pengawas perkebunan maupun sebagai tenaga administrasi gubernemen. Setelah berdirinya pabrik-pabrik nila dan gula, mereka juga dilibatkan dengan kerja-kerja pabrik. Ini merupakan kerja riil yang benar-benar dilakukan demi berjalannya produksi secara maksimal. Jumlah mereka relatif kecil, pada tahun 1859 tercatat 433 jiwa, kebanyakan adalah pria, hanya beberapa yang membawa istri atau keluarganya ke Jawa.<sup>8</sup>

### *Lahan pertanian*

Kegiatan utama dari petani adalah menggarap lahan-lahan sawah yang sangat luas, dalam distrik-distriknya masing-masing. Sawah-sawah kering, ditanami kacang, jagung, kapas, kayu manis, lada dan sayur mayur, selain itu juga dikembangkan jenis tanaman padi kering (*wet rice*). Sedangkan sawah basah, tanaman utamanya adalah padi. Tetapi sejak dibudidayakan tanaman ekspor tebu dan nila, seringkali padi harus berotasi dengan kedua jenis tanaman tersebut.

Sedangkan tanah tegalan dapat dikatakan tidak diolah untuk keperluan petani, tanah-tanah ini lebih banyak dipergunakan oleh gubernemen untuk ditanami kopi, karena memang cocok. Namun sejak 1860-an, akibat lahan-lahan sawah di pedesaan semakin sulit

<sup>7</sup> Penjelasan lebih lanjut lihat di bawah.

<sup>8</sup> AKP 69/5.

digilirkan pada para petani, terdapat keluarga petani yang memulai penggarapan tanah-tanah tegalan dalam bentuk olah bagi-hasil (*bouwdeel*), yang terutama ditanami buah-buahan.

Tabel 2

Luas lahan sawah (beririgasi dan kering dan tegalan.

Distrik	Luas Lahan			
	Sawah		Jumlah	Tegalan (dalam <i>bau</i> )
	Basah (beririgasi) (dalam <i>bau</i> )	Kering (dalam <i>bau</i> )		
Pekalongan	2.519,25	3	2.522,25	1.639
Pekajangan	2.584,50	75,75	2.660,25	1.340
Sawangan	6.131,75	710	6.841,75	4.893
Wiradesa	4.863,50	159,25	5.022,75	4.076,50
Sragi	9.083,25	490,50	9.573,75	1.704
Bandar	5.248,50	390	5.638,50	2.797
Batang	4.646	449	5.095	454,75
Masin	2.582	43,25	2.625,25	1.721,50
Sedayu	2.939,50	328,75	3.268,25	1.308
Subah	2.633	3.639,75	6.272,75	3.075
Kalisalak	4.183,75	517,50	4.701,25	3.180,25
Kebumen	3.155,75	198,50	3.354,25	2.798,50
	50.570,75	7.005,25	57.576	28.987,50

Sumber: *Statistiek der Residentie Pekalongan 1862*. (AKP 83 B/3)

### Hancurnya Beras Sebagai Barang-Dagangan Pekalongan

Ada dua bentuk produksi barang-dagangan yang diperluas (*generalized*), pertama jika terjadi produksi suatu barang di dalam masyarakat melampaui batas yang diperuntukkan bagi populasi setempat, sehingga surplus produksi dapat diperdagangkan secara luas. Jadi, barang yang diproduksi tidak sekedar dikonsumsi terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal saja.

Manifestasi yang lain dari produksi barang-dagangan adalah, suatu masyarakat memproduksi barang semata-mata hanya untuk pasar saja. Bukan merupakan perkembangan berlebih dari produksi kebutuhan setempat. Bentuk produksi yang kedua ini, biasanya dipaksakan oleh kolonialisme. Pemerintah kolonial memaksakan pengembangan suatu barang-dagangan di daerah koloninya, untuk kemudian dipasarkan secara luas di luar koloninya. Hal ini dimungkinkan karena wilayah-wilayah tertentu telah mengkonsumsi secara luas produk barang-dagangan tertentu. Dan



sebetulnya, produksi barang-dagangan yang diperluas menuntut kesigapan dalam menciptakan pasaran barang-barang tersebut.

Perkembangan produksi barang-dagangan di Pekalongan tidak terlepas dari pengkondisian yang telah dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada. Dalam abad-abad ke-17 dan ke-18, dilakukan produksi agrikultur konsumsi di dalam Jawa, atau juga memasok sebagian keperluan kepulauan-kepulauan di luar Jawa. Sedang sejak pertengahan abad ke-18 barang-dagangan yang diproduksi terutama untuk konsumsi dunia.

Di bawah pengaruh Mataram selama abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18, Pekalongan berhasil mencuat sebagai lumbung pemasok beras ke luar Jawa, seperti ke Makasar, ataupun ke dalam karesidenan-karesidenan yang mengalami defisit beras selama kurun tersebut. Setelah pertengahan abad ke-18, beras Pekalongan, di bawah VOC, masih sanggup memasok Batavia dan Semarang. Distrik Wiradesa—salah satu distrik di Pekalongan—, terutama, menjadi tulang punggung dalam memproduksi surplus beras di Pekalongan ini.<sup>9</sup>

Di awal abad ke-19 eksistensi beras sebagai barang-dagangan tidak dapat dipertahankan. Karena lahan-lahan sawah dimanfaatkan secara intensif untuk kepentingan produksi agrikultur ekspor dunia, nila den tebu, yang selain menggusur lahan padi juga menyerap tenaga kerja sangat besar.<sup>10</sup> Beras Pekalongan hancur sebagai barang-dagangan, dan dikembalikan eksistensinya menjadi hanya untuk kebutuhan setempat (ekonomi subsisten).<sup>11</sup>

Hal ini bisa terjadi karena pengembangan produksi tanaman ekspor selama *cultuurstelsel* sangat menyita waktu para petani, dan juga mengambil jatah tanah yang seharusnya diberikan pada para petani. Tidak terjadi kesesuaian antara apa yang dialami kaum tani dengan apa yang direncanakan melalui peraturan oleh Van den Bosch. Seperti, dalam tahun 1842, J.C. Baud, *Minister van Kolonien* (Menteri Daerah Jajahan), cukup menyadari hal tersebut dan

<sup>9</sup> *Statistiek van den Residentie Pekalongan 1820*, AKP 82/1 B.

<sup>10</sup> Lihat tabel-tabel.

<sup>11</sup> Sebagai dilaporkan oleh residen Praetorius di tahun 1835, tentang ikhtisar perbandingan keadaan sebelum dan sesudah diberlakukan *cultuurstelsel*. Dia mengatakan, bahwa beras di karesidenan ini telah merosot menjadi sekedar

mengatakan:

The people have been forced to cede a larger share of their sawahs [wet rice cultivation] than is required by the government. The result is that they have to go without four-fifths of their rice land...<sup>12</sup>

(Rakyat telah dipaksa untuk memberikan sebagian besar sawah-sawahnya [kultivasi padi kering] ketimbang yang diperlukan oleh gubernemen. Hasilnya adalah bahwa mereka harus pergi tanpa empat-per-lima tanah padi-nya,...)

Dan menjadi ironis, bahwa beras Pekalongan pada akhirnya harus mengalami kemunduran, bahkan untuk mencukupi kebutuhan setempat harus mengimpor dari karesidenan-karesidenan lain, yang terjadi mulai tahun 1832. Defisit beras ini berlangsung terus hingga berakhirnya *cultuurstelsel*. Sebuah laporan tentang produksi beras dalam karesidenan ini, menunjukkan kemerosotan tersebut, dari produksi 48.231 *pikul* di tahun 1829, turun menjadi 40.915 di tahun 1830, dan pada tahun 1836 hanya tinggal 7.885 *pikul*.<sup>13</sup>

Terjadinya kekurangan beras, mendorong gubernemen melakukan upaya-upaya penanggulangan, antara lain dengan memperkenalkan varietas padi baru yang berkualitas sangat buruk, akan tetapi bisa ditanam pada sawah-sawah kering (tadah hujan). Jenis varietas ini dikenal sebagai padi *genjang*, matang dalam waktu relatif singkat, antara tiga-setengah hingga empat bulan setelah ditanam. Dengan ditanamnya varietas baru ini tidak berarti jenis padi *dalem*, varietas yang selama ini telah dikembangkan oleh populasi setempat terhapuskan. Padi varietas lama yang bisa dipanen setelah lima hingga enam bulan setelah masa tanam tersebut, tetap dibudidayakan. Gubernemen pun melalui Vitalis, pejabat *Inspecteur der Kultures*, menginstruksikan pada musim Angin Barat, di saat pabrik-pabrik gula sedang memanen tebu-tebunya, maka sawah-sawah basah yang ditanami padi *dalem* mendapat “pinjaman” irigasi bagi keperluan pengairannya dari kebun-kebun

kebutuhan subsisten, hal ini terjadi karena tenaga kerja banyak diserap untuk menyelenggarakan agrikultur ekspor, dan mengakibatkan sering terjadinya kegagalan panen (AC 46).

<sup>12</sup> Dalam Penders, 1977, *loc. cit.*, hal. 25.

<sup>13</sup> Lampiran yang diberikan residen F.H. Doornik kepada *Directeur der Kultures* di Batavia tahun 1841, dalam Beslt. 8 Feb. 1847 No. 1.

tebu gubernemen.<sup>14</sup> Namun demikian upaya-upaya ini tetap tidak berhasil mengembalikan jumlah produksi beras ke kondisi semula. Dampak kekurangan beras bagi bumiputra adalah bahwa mereka kini harus membeli beras dengan harga mahal. Harga beras melonjak dari 69 *gulden* per *koyang* di tahun 1831 menjadi 148 *gulden* pada tahun 1846.<sup>15</sup>

Di bawah ini akan dijelaskan secara umum dua tanaman ekspor, kopi dan nila, sedang untuk gula akan dibahas dalam bab IV, selama kurun *cultuurstelsel* di Pekalongan. Maksud penjelasan ini untuk memberi gambaran sampai sejauh mana pengembangan pengolahan satu tanaman dagang dapat berpengaruh terhadap produksi tanaman lainnya. Karena, tenaga kerja yang diperlukan harus dibagi untuk dipekerjakan dalam pengolahan produksi barang-barang agrikultur ekspor tersebut yang berlangsung bersamaan waktunya itu.

#### • Kopi

Tanaman kopi mulai menyebar di pesisir Utara Jawa, dalam kurun pemerintahan Daendels. Dia memerintahkan untuk menanam 45.700.000 pohon, sebagai perluasan dari pembudidayaannya yang telah lebih awal berlangsung di Priangan.<sup>16</sup>

Kopi merupakan tanaman keras, tahunan, yang tidak menuntut perawatan intensif. Ditanam pada tanah bera atau tegalan, jenis tanah yang tidak cocok untuk pertanian. Sehingga desa-desa yang diwajibkan untuk memelihara tanaman ini tidak akan terganggu produk-produk pertaniannya.

Penyerapan kerjanya pun tidak merepotkan petani, sebab tenaga kerja baru diperlukan pada saat pemetikan buah kopi, yang terjadi setiap empat bulan sekali.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Vitalis 1851, dalam Penders, 1977, *loc. cit.*, hal. 26-7.

<sup>15</sup> Harga patokan di Semarang, lihat dalam Fasseur, 1975, *op. cit.*, hal. 47-50

<sup>16</sup> Kopi Priangan telah menjadi tanaman ekspor terbesar selama kurun VOC, produksi pertahunnya mencapai 100.000 *pikul*. Setelah diperluas oleh Daendels produksi melonjak menjadi 300-400.000 *pikul* (terutama dalam kurun pasca Raffles).

<sup>17</sup> Untuk sampai dapat diambil buahnya, kopi memerlukan waktu antara empat hingga lima tahun setelah saat ditanam.

Penyediaan tenaga kerja untuk tanaman kopi, dapat dikatakan sepenuhnya paksaan (*dwaangarbeid*), tidak ada upah, walaupun kadang-kadang petani mendapat sekedar insentif dari kerja pemetikkan dan pemeliharannya. Ketiadaan upah membuat Vitalis<sup>18</sup> menilai kerja dalam perkebunan kopi terlalu menindas, sebagai digambarkannya:

The people were obliged to plant millions of coffee trees in soil that consisted of limestone and was completely infertile. When in 1837 I inspected this recidency, because after two thousand peasants has been forced to work for five years, some of whom had to walk twenty-eight miles to the plantations, the total harvest was only 3 pikuls. So only thirty-six guilders were to be divided among all these labourers for five years of toil.<sup>19</sup>

(Rakyat diharuskan menanam berjuta-juta pohon kopi di tanah yang terdiri dari batu-batu dan sangat tidak subur. Ketika pada tahun 1837 Saya menginspeksi karesidenan ini, sebab setelah duaratus petani dipaksa bekerja selama lima tahun, beberapa dari mereka harus berjalan 28 mil menuju perkebunan-perkebunan, panen keseluruhan hanya 3 pikul. Jadi hanya 36 *guilder* dibagi di antara seluruh buruh-buruh ini untuk kerja keras lima tahun.)

Perlu diketahui bahwa penilaian Vitalis sangat dipengaruhi oleh sistem upah yang diterapkan oleh *onderneming-onderneming* gula.<sup>20</sup> Selain itu dia mengabaikan penggunaan hari kerja yang dibutuhkan untuk mengolah tanaman ini. Sebab, justru keberhasilan produksi tanaman ini dalam abad yang lampau (semasa VOC) tidak terletak pada ada atau tidaknya upah, melainkan tuntutan kerja yang diperlukan, dan yang jelas kopi tidak membutuhkan proses pemanufakturan. Kerja kongkrit bagi pemelihara tanaman ini hanya pemetikan dan pengangkutannya ke gudang-gudang milik gubernemen, yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

<sup>18</sup> Vitalis meskipun menjabat kedudukan *Inspecteur der Kultures*, namun pandangan-pandangannya lebih humanis. Dia sangat anti bentuk-bentuk pelestarian penghisapan “feodal” dalam penyerahan tanaman dagang ekspor. Hal ini akan sangat jelas diuraikan dalam tulisan-tulisannya sepanjang abad ke-19.

<sup>19</sup> Vitalis 1851, dalam Penders, 1977, *loc. cit.*, hal. 22.

<sup>20</sup> Vitalis adalah juga seorang *fabriekant* pada dua buah pabrik gula yang berada di Semarang sejak 1838, dan di awal 1850 dia pun membeli pabrik gula Sragie di Pekalongan.

Meskipun demikian, lebih dari 20 persen keluarga petani Karesidenan Pekalongan terserap untuk membudidayakan kopi. Sehingga ada kemungkinan, kaum tani yang terlibat kerja dalam kebun-kebun kopi, juga diserap untuk kerja di sektor produksi agrikultur ekspor lainnya. Jadi, sebetulnya tingkat penindasan sudah semestinya dilihat dalam kerangka sistem yang telah memaksa petani bekerja di berbagai sektor produksi. Selain itu produksi yang dilakukannya tidak untuk keperluan petani melainkan semata-mata diberikan pada negara kolonial (pengelola *onderneming*). Sehingga yang menindas bukan hanya kerja dalam *onderneming* kopi itu sendiri, melainkan sistem yang diterapkan oleh gubernemen (negara kolonial).

Tabel 3

Tanaman kopi dan keluarga yang dipaksa membudidayakan

Distrik	Jumlah tanaman kopi	Jumlah keluarga pada tanaman kopi	Tanaman per keluarga
Sawangan	2.611.880	2.556	1.021
Bandar	1.778.967	1.542	1.153
Sedayu	1.186.094	1.850	641
Subah	282.440	988	304
Kalisalak	1.237.019	2.134	572
Kebumen	724.040	2.322	311
	7.826.440	11.392	687

Sumber: *Statistiek der Residentie Pekalongan 1862*. (AKP 83 B/3)

Jumlah produksi kopi Pekalongan, senantiasa bersaing dengan jumlah produksi gula (setelah tahun 1850); begitu pula dengan harga pemasarannya di Eropa. Suatu laporan pada tahun 1864, memberikan perhitungan terperinci perkembangan produksi dan harga selama lima tahun terakhir, yang dikirim dari Pekalongan ke Negeri Belanda. Untuk tahun 1864 Pekalongan mengekspor kopi seberat 25.400 *pikul* dengan harga f 1.024.642,50-, sedang gula seberat 33.086,70 *pikul* seharga f 602.937,78.<sup>21</sup> Fluktuasi dalam produksi kopi tidak pernah terlalu mencolok, perbedaan setiap tahunnya hanya beberapa puluh *pikul* saja. Dalam kondisi ini, kopi Pekalongan stabil bertahan sampai berakhirnya *cultuurstelsel*.

Untuk mengawasi pemetikan kopi, gubernemen mengangkat mandor-mandor yang biasanya dijabat oleh kalangan *desa bestuur*. Sedang untuk pemeriksaan berkala, melihat ada atau tidaknya

kerusakan pada tanaman ini ditunjuk *sinder-sinder* (*opziener*) bangsa Eropa.<sup>22</sup> Untuk transportasi dari kebun-kebun kopi sampai ke gudang-gudang di tepi pantai, pengawasannya dilakukan oleh wedana dari distrik-distrik tempat beradanya perkebunan kopi tersebut. Dan, pada saat penimbangan, sebelum masuk gudang, biasanya wedana didampingi oleh seorang mantri kopi.<sup>23</sup>

#### • Nila

Nila kualitas ekspor mulai diolah dalam kurun VOC, dengan pengawasan langsung dilakukan oleh orang-orang Eropa, terutama dalam pemanufakturannya.<sup>24</sup> Setelah keruntuhan VOC, pengolahan nila tidak berhenti, melainkan dilanjutkan oleh orang-orang Tionghoa yang bekerja sama dengan keluarga-keluarga bupati.

Biasanya, dalam penanaman nila orang-orang Tionghoa melakukan penyewaan desa. Tetapi dalam tahun 1816 sistem sewa desa ini dihapus oleh gubernemen—yang waktu itu dipengaruhi oleh pola-pola berpikir liberal (kebebasan, persamaan, persaudaraan—semboyan Revolusi Perancis) yang dianut Daendels dan para penggantinya, sebelum *cultuurstelsel*—karena dianggap terlalu menindas petani.<sup>25</sup> Sehingga dalam tahun 1820 lebih banyak dijumpai manufaktur nila setempat dikerjakan dengan menggunakan tenaga “kerja bebas”.

<sup>21</sup> *Algemeen Verslag*, AKP 69/4.

<sup>22</sup> Sebetulnya sejak 1817 jabatan *opziener* telah dihapuskan dan digantikan oleh kontrolir (*kontroleur der landelijke inkomsten*), namun agaknya, *onderneming-onderneming* kopi di Pekalongan masih menggunakan *opziener* hingga berakhirnya *cultuurstelsel*.

<sup>23</sup> *Proces Verbal* nomor 11 dan 12, dalam AKP 133/10. Jabatan mantri ditentukan dan diangkat oleh bupati. Keterlibatan para mantri dalam penghitungan-penghitungan jumlah penyerahan dari desa-desa adalah demi terjaminnya prosentase atau *cultuur-procent* yang harus diberikan oleh gubernemen kepada bupati sebagai elit berpengaruh.

<sup>24</sup> Burger, 1962, *op. cit.*, hal. 107.

<sup>25</sup> Penghapusan sewa desa ini, tidak sepenuhnya berhasil. Seperti dalam tahun 1835, Vitalis, masih menjumpai persewaan desa oleh Kapiten Cina di Kabupaten Batang kepada bupati setempat, yang setiap tahunnya membayar sewa sebesar 400 *gulden* untuk pengelolaan 20 *jonk* sawah yang ditanami tebu (*Kultuur Verslag* 1835/ AC 1624).

Selama kurun *cultuurstelsel* penyerapan tenaga kerja dalam pengolahan nila sangat tinggi, hampir 59 persen dari jumlah populasi karesidenan ini dilibatkan untuk mengolah 4.700 *bau* sawah nila (tahun 1841). Jumlah populasi yang terlibat pengolahan nila tersebut, terbagi untuk dipekerjakan pada pabrik nila yang dikelola oleh gubernemen;<sup>26</sup> dan pabrik-pabrik yang dikelola oleh bumiputra (bukan Eropa) yang merupakan kerjasama antara orang-orang Tionghoa dengan keluarga bupati.

Tabel 4

Luas lahan dan jumlah keluarga yang dipaksa membudidayakan tanaman nila		
Distrik	Luas lahan sawah nila (dalam bau)	Jumlah keluarga yang dilibatkan untuk menanam nila.
Pekalongan	391,50	8,176
Pekajangan	629,50	4,333
Sawangan	480	5,012
Wiradesa	364	4,969
Bandar	364,50	5,104
Masin	560	4,198
Kalisalak	580	3,628
Kebumen	300	2,593
Total	3.670,50	38.013

Sumber: AC 46, lampiran La I.

Dikarena terdapat dua kelompok berbeda yang memproduksi barang yang sama di area ini, maka jelas terjadi persaingan. Dan persaingan seringkali memang tidak sehat. Seperti, dalam merekrut tenaga kerja, bupati menciptakan kondisi agar kaum tani merasakan ketidak-puasan bekerja dilingkungan pabrik-pabrik milik gubernemen:

... to make the people discontented, which in their view was the only way to make the government stop the cultivation of the new crops. So they selected for the cultivation of indigo all the rice fields that the people of these villages moved away because they had no fields in which to plant rice for their own upkeep; and soon the only people left in the region were the chiefs.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Terdapat lima buah pabrik nila milik gubernemen yaitu, Asberg (Bandar), Doro (Sawangan), Ketjappie (Masin), Limpong (Kalisalak) dan Tersono (Kebumen).

<sup>27</sup> Vitalis 1851, dalam Penders, 1977, *loc. cit.*, hal. 23.

(... membuat rakyat tidak senang, yang dalam benak mereka adalah satu-satunya cara membuat gubernemen menghentikan penanaman tanaman-tanaman penenan baru [*crops*]. Jadi mereka dipilih untuk menanam nila [*indigo*] seluruh lahan padi, rakyat desa-desa ini pindah karena mereka tidak punya lahan menanam padi untuk memelihara kebutuhan mereka; dan segera rakyat meninggalkan wilayah kepala-kepala [bumiputra] berada.)

Di sini harapan tinggi yang diberikan oleh gubernemen pada bupati untuk mendukung kelangsungan sistem, tidak bisa berjalan semestinya. Memang di satu sisi bupati siap mencadangkan tenaga kerja bagi sistem, tetapi di lain sisi bupati sendiri juga tidak menginginkan hancurnya tenaga penopang perekonomian keluarganya yang telah terbentuk sebelum adanya *cultuurstelsel*. Sehingga bupati-bupati ini sering berlaku “curang” dan merongrong. Bentuk lain dari kecurangan tersebut adalah memanipulasi hasil produk agrikultur yang disembunyikan dari pengawasan gubernemen:

As the regents supplied the residents with list of the villages charged with producing the various crops, they took care to include all villages so that they checked out with the list of controleurs. But they excepted the richest villages from forced cultivation on the condition that these villages - which were divided among the regents, district heads and lesser chiefs, ...<sup>28</sup>

(Seperti para bupati memberi para residen daftar desa-desa dibebani untuk menghasilkan berbagai tanaman penen [*crops*], mereka memelihara termasuk semua desa, jadi mereka dicek dengan daftar para *controleur*. Tetapi mereka kecualikan desa-desa kaya dari tanam paksa dalam arti desa-desa ini - dibagi-bagi di antara para bupati, para kepala distrik dan para kepala yang lebih rendah, ...)

Catatan-catatan yang dikumpulkan oleh kontrolir-kontrolir Batang dan Pekalongan tahun 1835, memperlihatkan selisih kecil jumlah produksi nila olahan gubernemen dari yang diolah bumiputra. Dalam distrik Sawangan untuk setiap *bau* gubernemen mendapat 6 *amat* sedang bupati mendapat 4,5 *amat*; sedang di distrik Masin gubernemen mendapat 8 *amat* dan bupati menghasilkan 6 *amat*.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Memori Residen Pekalongan mengenai ikhtisar perbandingan yang diminta Batavia tentang keadaan sebelum dan sesudah diadakannya sistem Tanam Paksa,



Di bagian lain, ditemui gejala umum se-Jawa bahwa daerah-daerah yang melakukan penanaman nila mengalami kemerosotan fertilitas tanah, akibat tidak diistirahatkannya tanah-tanah tersebut, sebagai dinyatakan oleh Baud di awal 1840-an:

The need to rest the land to maintain fertility has been neglected and at present the land is so exhausted that there are villages where the people are growing indigo, which yields no more than two guilders for a whole year's labour.<sup>30</sup>

(Kebutuhan untuk mengistirahatkan tanah untuk memelihara kesuburan telah diabaikan dan sekarang ini tanah sangat tandus, bahwa ada desa-desa di mana rakyat menanam nila, menghasilkan tidak lebih dari dua *guilder* untuk seluruh tahun kerja.)

Kemerosotan fertilitas tanah, agaknya sangat berpengaruh terhadap kualitas nila yang dihasilkan,<sup>31</sup> dan menjadikan pasaran nila tidak menguntungkan lagi<sup>32</sup> menjelang pertengahan abad-19. Sehingga gubernemen mengambil keputusan drastis dengan melakukan pembubaran lebih dari separuh pabrik-pabrik nilanya. Lahan-lahan bekas nila dialihkan, terutama untuk mengembangkan tebu gula secara lebih intensif.

Pembubaran pabrik-pabrik nila ini menjadi saat yang penting di Pekalongan, karena selain terjadi pembubaran pabrik nila milik gubernemen, maka pabrik-pabrik serupa yang dikelola oleh para elit bumiputra juga dibubarkan.<sup>33</sup> Hal ini merupakan kehancuran dari basis ekonomi bupati yang didasarkan pada produksi ditujukan kepada Gubernur Jenderal, salinan 1835, AC 46.

<sup>30</sup> Dalam Penders 1977, hal. 25.

<sup>31</sup> Apa yang oleh Rochussen, Gubernur Jenderal 1845-51, dalam tahun 1847, mengatakan sebagai: "de bladen zelf zijn kleiner en minder saprijk." (Fasseur, 1975, *op. cit.*, hal. 44)

<sup>32</sup> Produksi nila memang selalu terkait dengan kerajinan tenun. Hal inilah yang mungkin menghancurkan nila sebagai barang-dagangan, sebab sejak meluasnya pasaran tekstil Eropa di Jawa (yang dibawa oleh Raffles tahun 1814) maka setahap demi setahap kedudukan kain buatan Jawa terdesak. Hingga pada tahun 1848 tekstil Eropa telah menjadi 1/3 dari pasaran tekstil di Jawa, sedang harganya turun menjadi 1/3 dari harga 25 tahun sebelumnya. (Aas, 1984, "Relevansi Teori Makro Chayanov untuk Kasus Pulau Jawa," hal. 129)

<sup>33</sup> Di Pekalongan gubernemen membubarkan empat dari lima pabrik nilanya. Tetapi ada dua pabrik nila swasta yang tetap beroperasi, pertama di Batang dikelola

barang-dagangan.

Sebaliknya bagi gubernemen saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memaksa bupati yang selama ini dianggap “tidak pernah patuh”, untuk menggantinya dengan figur-figur penurut. Dan sejak tahun 1848, kedudukan bupati hanya sekedar sebagai perpanjangan tangan negara kolonial.

Dengan runtuhnya industri nila, industri gula gubernemen mendapat keuntungan besar, kini tersedia cadangan tenaga kerja dalam jumlah yang berlimpah.<sup>34</sup>

### Basis Ekonomi Bupati

Sejak pasifikasi pesisir Utara Jawa oleh VOC, tahun 1743, “pemerintah” *Compagnie* berhak mengangkat dan mencopot pejabat bupati. Sehingga putuslah pengabdian para bupati yang sebelumnya diberikan kepada raja-raja Mataram, dialihkan kepada Gubernur Jenderal dan residen-residen. Walaupun hak penggantian bupati ada pada *Compagnie* Belanda, tetapi hal yang terjadi hingga 1848, dalam karesidenan Pekalongan adalah, bahwa jabatan tersebut diestafetkan secara turun-temurun. Dan sebetulnya, antara bupati-bupati yang memerintah di Pekalongan dan Batang (sebelum 1809 ditambah dengan Wiradesa) masih merupakan keluarga sedarah. Seringkali penggantian bupati yang satu dengan yang lainnya, hanya merupakan tukar tempat antara Pekalongan dengan Batang.

Gejala yang umum dalam karesidenan ini di akhir abad ke-18, yang melingkupi keluarga bupati, adalah kehidupan mewah bagaikan raja-raja. Seperti, di tahun 1798, tercatat untuk ketiga kabupaten: Pekalongan, Batang, Wiradesa terdapat masing-masing 359, 152 dan 104 pegawai, masing-masing pegawai tersebut membawa keluarganya, tinggal menghuni dalam rumah-tangga bupati. Mereka terdiri dari mantri-mantri, kepala-kepala rendahan, *kabayan*, lurah, *bujang* rumah, pemusik, tukang kebun, penulis dan sebagainya.<sup>35</sup> Sedang dalam upacara pengukuhan bupati

oleh Heermaneer van Blommestein (juga menjadi *fabriekant* pemerintah untuk pabrik gula Kalimatie), dan satu lagi dikelola oleh J.E. Heerdeschee di distrik Subah. Ke dua pabrik tersebut didirikan dalam pertengahan 1840-an.

<sup>34</sup> Penjelasan lebih lanjut lihat di bawah.

Pekalongan, tahun 1812, terdapat 24 pembawa pancangan, 22 pesuruh, 22 pembawa perhiasan, 100 pelayan rumah, 50 pemusik serta 20 penari dan pemain wayang.<sup>36</sup>

Tentunya semua keperluan di atas memerlukan biaya yang tidak sedikit. Bupati memang mempunyai berbagai sumber pendapatan resmi, seperti akan dijelaskan di bawah, tetapi agaknya pendapatan-pendapatan resmi tersebut tidak mampu menutup kebutuhan-kebutuhan kehidupan keluarganya. Sehingga pada akhirnya mereka terlibat hutang-hutang yang diberikan oleh orang-orang Tionghoa dan terutama Arab.<sup>37</sup> Hutang-hutang tersebut sampai berakhirnya *cu1tuurstelsel* tidak pernah dilunasi oleh keluarga bupati bersangkutan.

Yang pertama-tama dapat dilihat dalam pemenuhan kebutuhan untuk mempertahankan lapisan elit bumiputra ini, adalah dengan penyerahan-penyerahan upeti. Pemberian upeti menunjukkan bahwa ada surplus pertanian dalam desa-desa yang memang dicadangkan buat menghidupi keluarga bupati yang disakralkan (sebagai pengganti raja Jawa). Bupati bisa mendiktekan kepada rakyatnya, kebutuhan apa yang diperlukan oleh dirinya (keluarganya). Untuk keperluan ini bekerja mekanisme produksi yang didasarkan pada paksaan bukan ekonomis, dengan menggunakan kepatuhan kaum tani kepada para pamongnya:

Dalam masyarakat Djawa pada kira-kira tahun 1800, maka 'paksaan' yang berdasarkan atas kepatuhan penduduk kepada kepala-kepalanya, djadi atas ikatan adat, mendjadi alat organisasi yang utama dalam masyarakat pada waktu itu.<sup>38</sup>

Sedang pengaturannya dilakukan dalam desa:

Alat organisasi ... dari kehidupan ekonomi teratur ini adalah ikatan desa, sebab dalam proses produksi dipergunakan desa-desa. Djadi arus barang-barang dan djasa-djasa diorganisir dengan alat ikatan

<sup>35</sup> Burger, 1962, *op. cit.*, hal. 113-4. Ini salah satu yang dianggap Daendels pemborosan tak perlu, sehingga dilakukan penyederhanaan dengan menghapus salah satu kabupatennya, Wiradesa, dalam tahun 1809.

<sup>36</sup> Knight, 1982, *loc. cit.*, hal. 131.

<sup>37</sup> ANRI No. 5 1973, hal. LXIII.

<sup>38</sup> Burger, 1962, *op. cit.*, hal. 131.

feodal dan ikatan desa, yang bersama-sama merupakan 'ikatan adat' dari masyarakat Indonesia [Jawa].<sup>39</sup>

Organisasi produksi ini, menetapkan kondisi bagi kukuhnya ekonomi bupati tanpa harus bergantung kepada kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya.

Di awal abad ke-19, bupati yang selama ini seolah olah terisolasi dari proses-proses produksi suatu barang, kini muncul watak *entrepreneurnya* secara mencolok. Seperti melakukan penyewaan desa pada orang-orang Tionghoa untuk memproduksi barang-dagangan tertentu, biasanya nila dan gula.<sup>40</sup> Penghapusan sistem sewa desa di tahun 1816, tidak berarti memutuskan kolaborasi produksi barang antara bupati dengan orang Tionghoa. Hal ini dapat dilihat dalam pengelolaan tanah keluarga bupati di Matraman (sebutan terhadap distrik Wiradesa oleh keluarga bupati) yang setiap tahunnya menghasilkan pemasukkan uang sekitar 8.000 *gulden*.<sup>41</sup>

Di sini yang menjadi hal utama adalah, bahwa dalam paruh pertama abad ke-19, bupati sudah tidak hanya bersikap pasif sebagai tuan-tuan penerima upeti raja, tetapi sudah bergiat dalam akumulasi modal dengan memproduksi barang-dagangan tertentu,<sup>42</sup> seperti:

The Regent gives the buffaloes, the implements of labour; the country, that is to say, the district, entirely, gives the hands of work. During the work, the Regent furnishes the victuals. He also

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 95.

<sup>40</sup> Keresidenan ini terbukti menempati kedudukan teratas dalam jumlah desa-desa yang disewakan oleh para bupati. Terdapat 307 desa disewakan dari 1.591 desa yang ada dalam karesidenan ini. Sementara karesidenan tetangganya, Tegal, hanya terdapat 9 desa yang disewakan, selama dekade-dekade awal abad ke-19 (Knight, 1982, *loc. cit.*, hal. 128 atau AKP 48).

<sup>41</sup> Khusus untuk pengusaha nila dapat diikuti dari surat Tumenggung Ario Wirio Dhi Negoro, bupati Pekalongan, 18 Juli 1858, kepada residen, AKP 77/6.

<sup>42</sup> Suatu bukti yang bisa dipakai untuk menunjukkan kemampuan bupati dalam mengkalkulasi laba yang bisa didapat dari pengolahan sebidang tanah, terlampir dalam AKP 7/1-4, yaitu Bupati Pekalongan, Wirio dhi Negoro, memberi perbandingan-perbandingan perbedaan laba yang didapat - dengan memperhitungkan ongkos produksi, termasuk upah buruh - antara tanaman beras, ketela, jagung, kacang tanah, nila (Jawa: *tom*) dan gula.

furnishes the seed for sowing. He has the work for nothing. All the produce of the 13,50 jonks comes to him; they receive the ordinary share which is given to the reaper, which is one-fifth.<sup>43</sup>

(Bupati memberi kerbau-kerbau, alat-alat kerja; negeri, untuk mengatakan, distrik keseluruhan, memberi bantuan. Selama pengolahan, bupati menyediakan makanan-makanan. Ia juga menyediakan bibit tanaman. Ia tidak bekerja apa-apa. Keseluruhan hasil 13 setengah jonk diserahkan padanya; mereka menerima bagian istimewa karena menyumbang penuaian, yaitu seperlima.)

Keterlibatan yang mendalam pada produksi tanaman dagang antara bupati dengan orang-orang Tionghoa, jelas menjadi batu sandungan bagi kelangsungan sistem yang diterapkan gubernemen. Harapan tinggi yang disandarkan di pundak bupati untuk berpartisipasi aktif, yang oleh Bosch dikatakan:

... Untuk itu khususnya dapat dimanfaatkan kekuasaan dan pengaruh para bupati terhadap penduduk. Adalah tidak dapat dibantah, bahwa hal itu dalam tahun-tahun terakhir terlalu sedikit diperhatikan ... Kepastian memiliki pulau ini hanya dapat didasarkan atas suatu golongan bangsawan yang teguh kedudukannya, dan hanya dengan pengaruh mereka rakyat yang berjuta-juta jumlahnya dapat ditaklukkan kepada kita. Dan golongan bangsawan itu tidaklah harus kita ikat pada pihak kita, tetapi harus dilengkapi dengan sarana-sarana, *untuk dapat menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan kita.*<sup>44</sup>

Hal seperti tersebut di atas tidak pernah berlangsung sebagai yang diharapkan, meskipun untuk itu gubernemen telah menggaji para bupati ini sebesar 300 *gulden* per bulan.

Selain pemasukan-pemasukan tunai di atas, bupati secara insidental masih mendapatkan pemasukkan lain yang tidak sedikit, seperti dari pajak-pajak ataupun penjualan jabatan kepala desa.

Misalnya laporan-laporan di awal 1837 yang menginformasikan seperti berikut ini:

“Atoerannya orang Tjina nama Tan Korvansing oemoor 39 roemag kampong Tjina njang moela moela di dalem taheen 1836 saija denger

<sup>43</sup> Knight, 1982, *loc. cit.*, hal. 128.

<sup>44</sup> Dikutip oleh Schrieke, 1974, *Penguasa-penguasa Pribumi* hal. 83; kursif dari penulis.

njang djadie kepala boedjang die Batang sarta pegang orang maken keplek [main gable] die tempat boedjang tadie ietoe Tjina njing pegang banjak orang njing ada mintak for gantie pegang ietoe pakerdjaan. Saia ada minta pada Raden Tommongong Batang, Raden Tommongong ada kasiaken pada saija a lantas raden Tommongong ada minta oewang pada saija saben taon saija die mintai oewang seperti padjek saija die soeroeh djandie baijar f 120 wang tembaga satoe tahoennja; lantas Raden Tommongong minta oewang kontan saija soeda baijar f 120 sarta soeda die kassie tanda tangan toelissannja Raden Tommongong kendirie ...”<sup>45</sup>

Atau, penjualan jabatan kepala desa:

“Atoerannja orang nama Tjarook 27 oemoor mendjadie loerah dessa Pessalakan district kotta Batang moela-moela saija poenja bapak djadie loerah die sietoe soedag djalan 33 taon darie soeda toea wakil saija poenja soedara nama Tjarook lantas orang ketjiel tiada soeka sebab keras lantas die rapatken toean Pangeran njang djadie wakil loera ietoe tadie magangnja raden Tommongong sarta raden Tommongong soeda djadie pegang kaboepaten Batang saija minta kaloeraghanja bapak saija tadie, pada raden Tommongong lantas raden Tommongong ada bilang sama saija baeek maoe gantie djadie loerah raden Tommongong minta oewang sorrok sama saija f 30 kaloe saija maoe baijar sebegitoe saija djadie loerah, sarta arie boelan 28 September 1836 saija baijar oewang tigapoeloe, ... lantas saija trima piagem loera tadie.”<sup>46</sup>

Sehingga jika dijumlahkan seluruh pendapatan tunai, setiap bulan, seorang bupati di Karesidenan Pekalongan, akan didapati sekitar 1.000 *gulden*. Namun ternyata jumlah ini belum mencukupi, seperti dilakukan oleh Ario Djaijeng Ronno selama masa pemerintahannya, juga pada bupati-bupati lainnya, yang umumnya terlibat dengan hutang-hutang kepada orang-orang Tionghoa dan Arab. Selain itu Ronno juga melakukan serangkaian tindakan “kriminal” seperti perampasan barang-barang milik penduduk.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Besluit 3 Jan. 1837 No. 4.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Ronno selama kurun pemerintahannya dikenal sebagai perampas barang apa saja yang dimiliki penduduk, terutama ternak (untuk lebih jelas, tentang apa dan berapa jumlah rampasan Ronno, lihat inventarisir yang dilakukan gubernemen dalam Bestt. 3 Jan. 1837 No. 4). Kemungkinan, tindakan Ronno ini dilakukan sebagai cara agar penduduk lebih senang tinggal di rumah, dan tidak bekerja di *onderneming-onderneming* gubernemen.

Sebetulnya gubernemen tidak mau campur tangan dalam hal penyelewengan yang dilakukan oleh bupati. Hal ini telah terbukti bahwa sejauh ini penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan bupati, sedapat mungkin diselesaikan dengan dialog antara pihak yang dirugikan (dalam hal ini penduduk setempat) dengan pihak yang melakukan perampasan (bupati), dengan gubernemen menjadi penengah dari keributan tersebut, hingga dapat diselesaikan tanpa ada pihak yang merasa dikecewakannya. Tetapi agaknya Ronno, Bupati Batang, lebih menganggap peranan yang dimainkan gubernemen pada permasalahan yang melibatkan dirinya tersebut, adalah sudah kewajiban gubernemen. Sedikitpun tidak melihat sinyal terselubung seperti gubernemen lebih memenangkan bupati atas kesalahan yang dilakukannya sebetulnya disebabkan oleh posisi “partner”. Dan dengan demikian gubernemen mengharapkan dukungan dari bupati terhadap sistem. Tetapi, Ronno tidak tanggap. Sehingga tidak jarang gubernemen melakukan tekanan terbuka kepada bupati, seperti dilakukan residen Praetorius di awal Oktober 1836:

Kita ada terlaloe saijang njang dari hal ienie prenta, kieta misti toelus dan bertjarra [bicara] begietoe bannjak. Satoe orang moeda, njeng baroe djadie Regent patoet hatie-hatie dan toendjoek dia poenja triema kasie pada Kandjeng Government mangka di djaga sekalie soepaija prekridjaan Government djangan laa atouw tiada betool ietoe adanja.<sup>48</sup>

Meskipun begitu, gubernemen tetap gagal untuk mendapatkan dukungan dari para bupati ini. *Onderneming-onderneming* milik gubernemen, selalu mengalami kesulitan dalam mendapatkan buruh maupun tanah.<sup>49</sup>

Gubernemen berinisiatif untuk mengubah keadaan ini, bupati harus mendukung sistem. Kesempatan ini terjadi dalam tahun 1847-1848, ketika gubernemen tanpa ragu menggantikan dua

<sup>48</sup> Beslt. 3 Jan. 1837 No. 4.

<sup>49</sup> Terdapat orang-orang di sekeliling bupati yang juga melakukan rongrongan terhadap sistem, terutama mempersoalkan tanah-tanah yang sedianya dibagikan kepada buruh-buruh yang dipekerjakan dalam *onderneming-onderneming* gubernemen. Orang-orang ini sebagai “teman-teman” bupati, telah melakukan perampasan tanah; untuk salah satu contoh lihat lampiran La G, Beslt. 8 Feb. 1847 No.1, sebagian darinya dibahas dalam tulisan saya ini.

bupati sekaligus. Pertama bupati Pekalongan, Raden Adipati Wirio dhi Negoro, yang menjabat kedudukan ini sejak 1813, digantikan oleh Djaijeng Ronno, dalam bulan Februari 1847. Namun Ronno hanya menjabat kedudukan Bupati Pekalongan ini sangat singkat, akibat ia tidak merubah kelakuan buruknya, dan akhirnya dia pun dipensiun dan dibuang ke Cirebon. Dan jabatan bupati Pekalongan diberikan oleh gubernemen kepada putra tertua Wirio dhi Negoro, Raden Ario Atmodjonegoro. Kedua, untuk mengisi kedudukan bupati Batang, sepeninggal Djaijeng Ronno, diangkat mantan Jaksa Kepala (*Hoofd-Djaksa*) Pekalongan, Poespowinoto. Penunjukan Poespowinoto ini berarti memutus estafet kedudukan jabatan bupati dari bapak ke anak seperti telah berlangsung selama ini.<sup>50</sup> Sekarang, residen dalam menentukan pilihan siapa yang akan menduduki jabatan bupati, sudah tidak dapat dipengaruhi oleh saran-saran dari keluarga bupati lama, seperti yang dilakukan oleh keluarga Djaijeng Ronno pada 19 Maret 1848:

Sekarang ietoe Regent Pecalongan toean besaar [Residen] kassie suspendeerd ada Cheribon. Kaloek toean besaar tiada bole kassie ampoen kepada Regent Pecalongan jang dapet suspendeerd ada die Cheribon.

Saija banjak minta sriepadoeka toewan besaar poenja kassean katjentahan hattie pada saija, saija minta ietoe Regentschap Pecalongan kaloe bolle djadie Regent die sietoe, saija poenja hiepar nama Raden Bei Soemadiningrat jang sekarang djadie wedono district Seragie, Regentschap Pecalongan, ietoe ada soedaranja moeda Regent Pecalongan jang ada die Cheribon, saija poenja dengeran diea soeda djadie wedono district 2-3 tempat djalananja baee apalagie di tjentaie sama diea poenja sanak-sanak.<sup>51</sup>

Usulan tersebut diabaikan begitu saja, dan residen mengangkat Poespowinoto yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan keluarga bupati lama. Pencopotan- pencopotan yang diatur residen telah menghapus timbulnya kembali bupati-bupati yang mengsubversif sistem politik-ekonomi negara kolonial. Meskipun begitu mereka yang disingkirkan masih, dapat dikatakan beruntung, sebab gubernemen memberikan pensiun bulanan

<sup>50</sup> Beslt. 8 Feb. 1847 No. 1.

<sup>51</sup> Surat Pangeran Ario Reksonegoro, pensiunan bupati di Tegal, mertua Ronno, dalam beslt. 16 Okt. 1848 L2L2.



masing-masing 300 *gulden* setiap bulannya. Selain itu tanah-tanah milik keluarga bupati lama tidak diambil alih oleh gubernemen, tetapi hasil produksi dari tanah tersebut terhenti.<sup>52</sup>

Tergesernya bupati dari organisasi produksi yang menjadi tiang penyangga utama perekonomiannya, tentu saja menjadi pukulan yang berat. Namun demikian di sisi lain, gubernemen memang telah siap untuk menutup kebutuhan hidup mewah para bupati ini, yaitu dengan memberi jumlah gaji yang besar. Sejak tahun 1848 pejabat bupati, yang dalam tahun-tahun sebelumnya hanya bergaji 300 *gulden*, sekarang dinaikkan gajinya menjadi 800 *gulden* per bulannya.<sup>53</sup>

Akan tetapi meskipun tunjangan uang dari gubernemen telah mendekati kebutuhan “riil” keluarga bupati ini, tidak tertutup kemungkinan bahwa secara psikologis kehilangan basis ekonominya sangat berat untuk diatasi. Seperti, ada kecenderungan akibat krisis-krisis yang dihadapi bupati-bupati tersebut, mereka menjadi merosot moralnya dengan melarikan diri pada candu, atau sibuk dengan masalah-masalah keuangannya sendiri:

“... dit betrekkelijck de Regent van Pekalongan gedeeltelijck to wijten zijn aan het gebruik van opium en bij zijn ambtgenoot to Batang aan blijkbare ordeloosheid in zijne geldzaken ...”<sup>54</sup>

(... relatif bupati Pekalongan telah mengasingkan dirinya pada tempat candu sementara rekannya di Batang sama sekali diasyikan dengan masalah-masalah keuangan...)

Pameran kemegahan yang dilakukan sesaat masa pemerintahannya tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari perekonomiannya. Residen dalam tahun 1857, malah mengatakan hilangnya wibawa (*prestige*) pemimpin yang dimiliki bupati:

<sup>52</sup> Seperti dapat dilihat dari surat bupati Pekalongan 4 April 1868, pewaris langsung dari Wirio dhi Negoro yang mengatakan:

“Dengen lagi saija oendjoek bates kepada padoeka dari ietoe tanah Matraman slamanja saija poenja bapak meninggal moelaij 1848 sampe sekarang kita oerang ahli waris beloem dikasie trima oewang dari aslinja kloearanja itoe tanah, ...” (AKP77/6).

<sup>53</sup> Bestl. 16 Okt. 1848 L2.L2.

<sup>54</sup> *Politiek Verslag* 1857, (AKP 69/3).

On the other hand, it must not be forgotten that neither of the Regents followed their fathers in the correct line of succession, but that, in consequence of the dismissal or transfer of the former [Regents], were chosen for the post by the government. Hence they have, in manner of speaking, nothing with which to establish themselves, and the moment of their appointment also signalled the beginning of their insolvency ... There is no need to mention that their authority has suffered as a result of this. Outward show and splendour are still one of the firm supports of the authority of the native rulers . their power is consequently ... *nihil*, and both are accounted no higher than any other native official by the ... population of this province. Their prestige as *leader* is wholly lost.<sup>55</sup>

(Di pihak lain, meski tidak dilupakan bahwa tak ada bupati-bupati yang mewarisi ayah-ayahnya dalam garis suksesi sesungguhnya, tapi dari pemecatan atau mengganti (bupati-bupati) yang terdahulu, yang terpilih karena penempatan tugas pemerintah. Karena itu mereka, boleh dikatakan, tak ada yang bisa memapankan dirinya sendiri, dan pada saat pengangkatannya juga diisyaratkan awal kebangkrutan... Tidakkah perlu mengatakan bahwa kewibawaannya terancam sebagai akibat hal ini. Pameran serta kemegahan luarnya masih tetap sebagai orang yang menyangga secara kokoh kewibawaan penguasa-penguasa pribumi... kekuasaannya maka dari itu... *nihil*, dan keduanya dianggap tidak lebih tinggi dari pada pejabat pribumi lainnya oleh... penduduk propinsi ini. Seluruh prestisenya sebagai *pemimpin* hilang.)

Hal lebih buruk lagi yang menimpa elit ini adalah, setelah hancurnya perekonomian bupati muncul rongrongan dari “teman-teman” Tionghoa dan Arabnya. Mereka sekarang menuntut pelunasan hutang-hutang yang sangat besar jumlahnya.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Dalam *Politiek Verslag* yang dikutip Knight, 1982, *loc. cit.*, hal. 144).

<sup>56</sup> Tuntutan-tuntutan ini terjadi dalam tahun 1860-an, seperti tuntutan dari Oeij King Njo (bekas istri kedua Wirio dhi Negro):

Darie oetangnja Radhen Adhie Pattie toewa [Wirio dhi Negro] njang soeda terseboet die tanda tangan soeratnja Raden Adipatie sendiri f5.105,- .. Saija poenja oewang njang die kerdjakan balik nama tana Matraman ..Siapa njang trima tana Matraman mistie gantie toe ongkos kapan koerang pertjaia saija poenja oewang pindjem Radhen adipatie boewat balik nama tanah Matraman bolee pariksa sama toewan Klein [advokat di Batavia] njang bisja menerangkan.

Dan dari seorang pedagang Arab, Seh Moehamat Bin Awal Djoewas:

... die dalem boelan Oktober 1852, amba dengan ahli waris samoewa soeda

Persoalan-persoalan di atas inilah yang kiranya menjadi penyebab dari loyalitas yang amat besar bupati, setelah pertengahan abad, kepada gubernemen. Kehilangan basis-basis produktifnya dikompensasikan ke arah pendukung terhadap organisasi produksi gubernemen. Paling tidak dari hasil keterlibatannya dalam menggunakan pengaruh untuk mendukung berlangsungnya industri gula gubernemen, bupati menerima *cultuur-procent* yang besar, setiap tahunnya 1.500 *gulden*.<sup>57</sup> Dengan runtuhnya bupati sebagai *entrepreneur* maka seluruh jaringan organisasi produksinya ikut runtuh pula.<sup>58</sup>

Yang jelas gubernemen harus menutup kebutuhan hidup seluruh hirarkhi pemerintahan bumiputra, dengan gaji-gaji ataupun *cultuur-procent*, demi kelangsungan sistem penanaman yang ditegakkannya:

De toestand der Inlandsche hoofden vordert dringend verbetering, ... Ten deze zullen ter zijner tijd voorstellen worden ingediend. Dat de gezind bezoldiging der Inlandsche hoofden daarop veel invloed heeft, behoeft geene nadere toelichting.<sup>59</sup>

(Keadaan para kepala bumiputra mendesak diperbaiki, ... di sini saatnya harus diusulkan kesediaan membantu. Bahwa cenderung membayar para kepala bumiputra karena memiliki banyak pengaruh, kebutuhan menjelaskan lebih mendalam.)

Ini merupakan konsekuensi dari penghancuran basis produktif kaum elit bumiputra, yang harus ditutup oleh gubernemen melalui sejumlah pendapatan tunai dari kantung negara kolonial. Namun demi suksesnya sistem, pengeluaran-pengeluaran ini tidak terlalu

dapet soerat sita dari orang Arab bernama Seh Moehamat bin Awal Djoewas, terseboet die dalem soerat sita mendakwa njang amba poenja bapa bolenja belie tanah Matraman njang 1/4 bagian misjie katinggalan oetang f 111.039,15 recepis, ... (AKP 77/6)

<sup>57</sup> AKP 69/3.

<sup>58</sup> Tetapi tidak berarti tuntutan atas jasa kerja (*dienstpligtigen*) dari lapisan sosial yang lebih rendah terhapuskan. Namun karena jumlah tenaga kerja yang diserap untuk menghamba kini hanya diperlukan untuk kebutuhan rumah-tangga, tidak untuk produksi agrikultur, maka pembatasan jumlah jasa kerja bagi para bupati sejak awal 1860-an oleh gubernemen bisa berlangsung tanpa hambatan (*Kultuur Verslag 1862* dalam AC 1624, bab *heerendiensten*).

<sup>59</sup> *Politiek Verslag* tahun 1863, AKP 70/21.

mahal jika dibandingkan laba yang bisa dikeduk *onderneming-onderneming* pemerintah dengan menguasai orang paling berpengaruh di mata kaum tani ini, yang bisa menggerakkan tenaga kerja dengan mudah.

## Diferensiasi Petani Di Pedesaan Di Lingkungan *Onderneming* Gula

Perbedaan tajam antara petani bertanah dengan yang tidak bertanah telah terbentuk sebelum hadirnya kolonialisme di Jawa. Perbedaan ini tidak pernah terhapus dengan reformasi tanah yang dilakukan oleh *cultuurstelsel*. Pembahasan berikut ini akan dipusatkan pada stratifikasi sosial yang terdapat di pedesaan Karesidenan Pekalongan, dengan mengutamakan desa-desa yang berada dalam lingkungan perkebunan tebu (*binnen den kring der onderneming*). Desa-desa ini diprioritaskan sebab jumlahnya meliputi lebih dari seratus desa, seperti yang tercakup dalam penelitian *Commissie* yang dipimpin oleh G. Umbgrove pada pertengahan abad-19.<sup>60</sup> Dari laporan penelitian *Commissie* ini dapat dilihat bagaimana desa menyiapkan tenaga kerja bagi sistem.

### Stratifikasi Sosial

Suatu pranata Jawa lama (*oude instellingen*) tentang bagaimana mendapatkan dan mendistribusikan produksi agrikultur petani, telah ada di dalam masyarakat pedesaan. Kesatuan masyarakat terbagi-bagi dalam keluarga-keluarga yang disebut *cacah*. Setiap kesatuan *cacah* biasanya mendapat hak untuk mengoiah sebidang tanah. Jumlah besar atau kecilnya lahan sawah dalam kesatuan keluarga tersebut, tergantung dari banyak atau sedikitnya jumlah

<sup>60</sup> Dalam pertengahan abad 19, Umbgrove, penjabat *Hoofd-Inspecteur van Financien*, membentuk *Commissie* untuk melihat kondisi 95 pabrik gula pemerintah yang masih aktif. Pekerjaan *Commissie* ini menyelidiki kelaikan pabrik dan bagaimana kondisi petani yang berada di sekitar *onderneming*. Obyek penelitian dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan cukup mendetail, dan sasarannya mencakup seluruh desa yang terlibat kerja-kerja dengan industri gula. Hasil penelitiannya diterbitkan dalam bentuk monograph per pabrik. Dalam hal pendataan mungkin yang dilakukan *Commissie* ini lebih baik dari yang dikumpulkan *Eindresume* yang dilakukan satu dekade kemudian. *Eindresume* hanya mencantumkan dua desa di lingkungan *onderneming* tebu, dari 26 desa yang diteliti, 24 desa selebihnya merupakan desa-desa terpencil yang penduduknya tidak mengalami interaksi langsung dengan industri gula.

*cacah*. Keluarga menjadi suatu unit produksi. Sedang distribusi produksi, selain dikonsumsi dalam keluarga, sebagian dari surplus agrikultur diserahkan dalam *natura* sebagai upeti untuk lapisan elitnya (untuk lapisan atas desa).<sup>61</sup>

Menurut Van den Bosch, kesatuan-kesatuan masyarakat yang dikenal sebagai *cacah*, menjadi unit pengolahan suatu produk agrikultur petani. Dalam *cacah* terdapat seorang kepala yang disebut *sikep*. Beban kerja, dikenakan kepada *sikep*, karena *sikep* menguasai tanah. Sedang kerja pengolahan pertanian biasanya dibebankan oleh negara (*souverein*) tradisional, dengan cara mengalokasikan sebidang tanah untuk diolah. Seorang *sikep*, sebagai kepala *cacah*, maksimal dapat menguasai 22 *cacah*.<sup>62</sup> Sehingga para *cacah* tidak bertanah, lebih memerupakan buruh-buruh yang bekerja untuk dan pada *sikep*.<sup>63</sup>

Demikian den Bosch memahami struktur sosial yang ada saat dia sampai ke Jawa. Dapat dikatakan memadai, paling tidak dengan cara seperti inilah dia akan mendefinisikan cara memobilisasi tenaga kerja untuk *cultuurstelsel*.

Perkembangannya yang terjadi di pedesaan Karesidenan Pekalongan, juga tidak terlalu menyimpang dari uraian Bosch, hanya keadaannya diperumit oleh perkembangan masyarakat setempat. Seperti ditemui oleh *Commissie* Umbgrove selama penelitiannya dalam pertengahan abad-19, yang secara garis besar dalam tulisan ini disederhanakan, menjadi empat lapisan masyarakat.

*Pertama*, apa yang oleh gubernemen disebut dengan *desa bestuur* (pemerintah desa) terdiri dari: lurah, *bahoe*, *lebe*, *kabayan* dan *kamitua*. Mereka adalah golongan pendiri desa, yang dikepalai oleh lurah. Lapisan ini mendapat keistimewaan dalam penguasaan tanah:

<sup>61</sup> Onghokham, 1984, "Perubahan Sosial di Madiun Selama Abad XIX: Pajak dan Pengaruhnya terhadap penguasaan tanah," hal. 7-8.

<sup>62</sup> Terutama untuk distrik-distrik yang mempunyai kepadatan penduduk cukup tinggi; lihat juga Breman, 1986, *op. cit.*, hal. 15. Namun pada daerah-daerah yang langka penduduk biasanya kesatuan *cacah* hanya terdiri dari 4 orang saja.

<sup>63</sup> Bosch 1834.

“welk aandeel ... altijd minstens twee maal zoo veel moet bedragen als dat van sikep.”<sup>64</sup>

(bagian mana ... paling sedikit harus selalu dua kali lebih banyak dari jumlah untuk seorang sikep).

Tanah-tanah ini biasa disebut *bebau* atau *bengkok* (tanah jabatan), yang didapat selama mereka menduduki jabatan-jabatan tersebut di atas. Pada beberapa desa dalam distrik-distrik Batang dan Masin, peranan lurah dipegang oleh wedana, dengan menggunakan pengaruhnya sebagai *penatoes*.<sup>65</sup> Karena lapisan pemerintah desa ini menjadi andalan bagi perekrutan tenaga kerja dan tanah yang dipakai oleh perkebunan-perkebunan gubernemen; maka hak-hak istimewa banyak dinikmati oleh lapisan ini. Seperti, tanah yang dikuasainya terbebas dari *cultuurdienst* gubernemen:

Tot diensten bezorgd al degene, die sawa's bezitten, ... met uitzondering van het dessa bestuur waaronder begrepen zijn de loerah, bahoe, kabaijan en kamitoewa's. Tot de tweeden behooren zodanige personen, die eenig ambacht uitoefenen, of voor andere Industrie aan den kortkomen ... en hebben geen aandeel in de bebouwing der sawa's, waarom hij ook niet in de cultuurdiensten deelen.<sup>66</sup>

(Mereka yang menyebabkan seluruh kerja, pemilikan sawah tersebut, ... dengan mengecualikan yang dikuasai pemerintah desa lurah, bahoe, kabayan, dan kamitua. Orang-orang semacam itu termasuk dinomor duakan, semata-mata menggunakan pengaruhnya, antara lain industri kehilangan hak-nya ... dan tidak berperan dalam penggarapan sawah, sebab dia juga tidak kebagian *cultuurdienst*).

Selain itu tanah tersebut merupakan kualitas terbaik. Mereka, para pamong tersebut, berhak mempekerjakan penduduk desanya untuk mengolah tanah-tanah *bengkok* “milik”nya. Mewajibkan kerja untuk pengolahan tanah *bengkok* ini disebut *kriegandienst*. Seluruh hasil *in natura* yang didapat dari tanah *bengkok* ini menjadi hak si

<sup>64</sup> Laporan *Commissie Umbgrove*, AC 1584.

<sup>65</sup> Agaknya, kesatuan wilayah terkecil, desa, di beberapa tempat masih mengalami kesulitan untuk diterapkan. Terutama untuk daerah-daerah terpencil di pegunungan. Hal ini berarti bahwa seorang wedana pun berhak atas tanah-tanah jabatan yang dibagi-bagikan dalam desa.

<sup>66</sup> Laporan *Commissie Umbgrove*, AC 1584.

penguasa tanah.

Namun perkembangan industri gula yang banyak menyerap tenaga kerja, mendorong gubernemen untuk mengurangi kerja-kerja bagi kaum elit desa ini.<sup>67</sup> Meskipun ada pembatasan atau pengurangan kerja bagi kaum elit desa, hal ini tidak berarti mematikan tanah-tanah *bengkok* tersebut dari sumbangan riil kepada para pemiliknya. Dengan terserapnya populasi setempat ke dalam *onderneming-onderneming* gula, masih ada cara lain untuk mendapatkan sejumlah uang dari tanah tersebut, yaitu dengan menyewakannya. Seperti, dinyatakan Residen Pekalongan dalam tahun 1863:

“zoo diende kunnen zij zich verrijken door den verhuur dier velden aan andere dessa's, die meer bevolking bezitten.”<sup>68</sup>

(Dengan begitu dia [lurah] dapat memperkaya diri melalui penyewaan lahan mahalanya kepada desa lain, memperluas pemilikan oleh rakyat).

Dengan demikian lapisan ini masih bisa memperoleh pendapatan tunai dari tanah *bengkoknya*, biarpun kehilangan sebagian hak-haknya atas jasa kerja (*diestpligtigen*).

Bagaimanapun juga, dalam terminologi petani, lapisan elit desa ini, yang ber hak dan bisa menggarap tanahnya sendiri, dapat disebut sebagai *sikep* atau petani-kaya. Mereka bisa mempekerjakan orang lain untuk menggarap tanahnya.

Sedang yang disebut sebagai *sikep*, menduduki tingkatan kedua dalam pelapisan sosial di desa. *Sikep* biasanya mengacu kepada kepala rumah tangga (suami)<sup>69</sup> yang menguasai sebidang sawah (*een aandeelen de sawa's krijgen*). Beberapa *sikep* dianggap sangat mampu sehingga dapat memelihara orang menganggur yang disebut *angoeran*. *Angoeran* biasanya masih mempunyai hubungan keluarga (*bloedverwanten*) dengan *sikep*, tetapi bukan anak dari *sikep*.

Dalam rumah tangga *sikep*, akan ditemui lapisan sosial ketiga, yakni *bujang* dan *menumpang*. *Menumpang* atau disebut juga *mondok*,

<sup>67</sup> *Kultuur Verslag* 1862 bab *heerendiensten*, (AC 1624).

<sup>68</sup> *Politiek Verslag*, AKP 70/21: 3.

tinggal bersama dan bekerja pada *sikep*. Tidak punya hak tanah (*die geen aandeel in de sawa's krijgen*), sehingga tidak berhak dipekerjakan dalam *cultuurstelsel*. Namun untuk mendapatkan tenaga kerja yang bisa dikirim ke *onderneming*, biasanya di dalam desa-desa dilakukan pembagian periodik tanah, prioritas untuk mengolah tanah olah-gilir ini diberikan pada *menumpang*. Para *menumpang* yang mempunyai hak sementara atas tanah ini disebut *gogol* (menguasai tanah komunal). Lapisan yang kurang-lebih sederajat dengan *menumpang* adalah *bujang*, juga tinggal dalam rumah tangga *sikep*, namun lebih mendekati pengertian buruh. Sebab, seperti diungkapkan dalam laporan Umbgrove, *bujang* terutama bekerja semata-mata untuk upah, baik dalam bentuk upah tunai atau hasil-bumi.

Lapisan sosial yang terakhir adalah *wong boeroeh* atau *koelie*, adalah kelas buruh, yang bekerja semata-mata untuk upah tunai (*daglooner*). Mereka biasanya datang dari desa-desa di luar desa-desa di lingkungan *onderneming*. Mereka menawarkan diri untuk bekerja pada *sikep*; atau bekerja di pabrik-pabrik gula. Pabrik gula sangat banyak menyerap lapisan sosial ini pada musim giling melalui *suiker-campagne* (kampanye perekrutan tenaga kerja oleh pabrik gula). Jumlah *wong boeroeh* dalam musim panen dan giling-gula dapat mencapai limaratus orang, memenuhi desa-desa di lingkungan *onderneming*.

Sebetulnya masih ada segelintir orang, tetapi tidak bisa dimasukkan dalam bagan di atas, yaitu lapisan masyarakat yang berusaha melestarikan lembaga bagi-hasil,<sup>70</sup> mereka disebut *wong meratjang*. Biasanya mereka datang dari luar desa, dan prosentasenya amat kecil. *Wong meratjang* merupakan lapisan tani-menengah yang mulai langka untuk ditemukan. Kelangkaan pelestarian hubungan kerja bagi-basil disebabkan, para petani-kaya (lapisan *desa bestuur*

<sup>69</sup> Kalau suami telah meninggal posisi itu diwariskan kepada istrinya dan disebut sebagai *rondo kiesie* (Belanda: *weduwe*).

<sup>70</sup> Bagi-hasil merupakan bentuk pengerahan kerja yang paling primitif dari tenaga manusia untuk penggarapan tanah dan tidak mengakibatkan terbentuknya kelas petani tersediri. Di karesidenan ini terutama agak banyak dijumpai dalam distrik Subah, terutama untuk tanah pekarangan yang ditanami buah-buahan. Biasanya pemilik tanah menyerahkan separuh dari hasilnya kepada yang menanam (disebut *memaro*). Lihat Scheltema, 1985, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, hal. 142-4.



maupun *grootste-sikep*) saat ini lebih suka mengolah tanahnya dalam lalu lintas uang. Yaitu, para *wong meratjang* harus membayar uang *sromo* bila ingin mengolah tanah.

## Distribusi dan pemilikan tanah

Bosch di awal 1830-an, menyangkal adanya pemilikan tanah di Jawa, dengan mengatakan:

“..., dat de Javaan geen denkbeeld bezit van het regt van eigendom op den grond;”<sup>71</sup>

(bahwa orang Jawa dianggap tidak mempunyai hak atas pemilikan tanah).

Dia berusaha menegaskan suatu bentuk pemilikan tanah negara (*souverein bezit*), sebagai pranata bumiputra, yang untuk mengolahnya dipakai ikatan-ikatan adat. Pengalokasian sebidang tanah kepada satu keluarga, berarti pembebanan dari negara (tradisional) atas petani untuk menuntut sebagian dari hasil tanah tersebut bagi kepentingan penguasa bumiputra tertinggi (*souverein*).

Analisa Bosch di atas, mungkin benar, bahwa dalam desa-desa terdapat distribusi periodik atas tanah, dan bahwa surplus agrikultur sebagian dialirkan atau diserap oleh bupati atau raja dalam bentuk-bentuk upeti. Namun apakah ini bukan merupakan dalih untuk menerapkan suatu sistem yang mengandalkan jalur-jalur lama, ikatan-ikatan menghamba yang ada dalam masyarakat bumiputra?<sup>72</sup> Sebab pada dasarnya Bosch tidak pernah

<sup>71</sup> Bosch 1834.

<sup>72</sup> Konsep ini sebenarnya berasal dari Raffles. Semasa pemerintahannya yang singkat Raffles telah meletakkan dasar-dasar penting bagi perubahan mendasar di Jawa. Antara lain ia menerapkan pengambil-alihan seluruh tanah di Jawa menjadi milik negara (*domein*), karena menurutnya tidak ada pemilikan tanah pribadi pada masyarakat bumiputra. Sejauh mana pandangan Raffles ini benar, mungkin Raffles menduga gejala penyerahan upeti pada para penguasa bumiputra sebagai bukti dari pemilikan tanah negara. Namun yang jelas bahwa kebijaksanaan Raffles sangat dipengaruhi oleh sistem sosial *Zamindar* (“tuan-tanah”) yang ada di India, jajahan Inggris. (Untuk ini bisa dilihat dalam karya Raffles, 1917, *op. cit.*, hal. 135-7). Oleh Bosch, konsep-konsep Raffles tentang pemilikan tanah negara ini diadaptasi dan digunakan untuk berlangsungnya *cultuurstelsel* dengan melakukan modifikasi-modifikasi. Seperti, jika pada konsep Raffles, tanah yang diambil negara itu dalam rangka menarik uang dari petani karena petani menjadi penyewa sehingga wajib membayar sewa tanah (*landrente*), maka oleh Bosch kini

menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi dalam pendistribusian tanah di dalam desa. Terutama tentang bagaimana menerapkan perlakuan yang cukup adil dalam pendistribusian tanah dan tenaga kerja berdasarkan diferensiasi dan pelapisan petani yang telah ada. Dan sejauh mana *cultuurstelsel* dapat memberikan fasilitas yang sama terhadap para buruhnya melalui reformasi tanah yang dilakukan. Ketidakjelasan inilah yang menjadi perdebatan pada saat sekarang, antara menguasai dengan tidak menguasai tanah selama kurun ini, apakah telah terhapuskan oleh reformasi tanah yang dilakukan Bosch.<sup>73</sup>

Apa yang dilakukan gubernemen di Pekalongan di awal 1830an adalah bagaimana menjabarkan formulasi Bosch tentang perekrutan tenaga kerja berdasarkan penguasaan atas tanah. Inilah yang sering disebut dengan menciptakan buruh berdasarkan penguasaan tanah periodik (*tijdelijk grondbesit*). Penegasan ini dapat dilihat dalam kontrak-kontrak kerja (*suiker contract*) di *onderneming* gula tahun 1830 sampai 1833:

Marang uwong-uwong ingkang nandur sebau, ukure limangatus tjengkal pesagi, iku bakal diwenehi sawah rong bau, ora lawan

dibalik yaitu tanah-tanah dikembalikan kepada rakyat bumiputra, namun pengembalian tanah-tanah tersebut disertai beban yakni setiap petani yang mendapat atau menguasai tanah wajib menanam tanah tersebut dengan tanaman dagang konsumsi dunia, atau menyediakan diri untuk bekerja selama 66 hari pada *onderneming* pemerintah. Pengawasan kerja yang diajukan Bosch ini dianggap lebih ringan jika dibandingkan dengan kewajiban membayar pajak (*lanrente*). (Untuk membandingkan kedua sistem yang diterapkan oleh Raffles dan Van den Bosch, dapat diikuti dalam Sutjipto (*ed.*) SNI IV, hal. 57-89).

<sup>73</sup> Kebingungan ini bisa dilihat dalam tulisan Onghokham yang terjebak antara peraturan (regulasi) dan fenomena riil, sehingga dalam tulisan-tulisan abad 19-nya, hampir selalu ditegaskan bahwa hanya petani bertanah saja yang bisa dipekerjakan oleh *onderneming*.

‘Istilah petani sikep dalam arti penduduk desa dengan hak atas tanah telah hilang dari lingkungan desa. Sebagai gantinya dikenal kata kuli (dari *coolie*), sebuah istilah *British India*, yang berarti pekerja tanpa keahlian. Oleh karena semua penduduk desa dengan hak-hak tanah diwajibkan untuk kerja bakti, tanpa kecuali mereka itu disebut kuli. Lingkungan desa mulai tersusun dalam pelbagai kelas kuli, yang menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap pekerjaan pada proyek-proyek negara...’ (Onghokham, 1984, *loc. cit.*, hal. 23)

ambayar padjege. Ana dene regane sawah rong bau kuwe, rongpuluh rupijah, 20 uwang tembaga. Iki panggonan kang bakal ditanduri tebu, iku ora bajar padjege, sarta maning dheweke kaperdikakake, saking bajaran uwang kuli gladhag, sarta lija-lijane pagawejan sadjabane dhistriki.<sup>74</sup>

(Sebab orang-orang yang menanam se-bahu, berukuran limaratus cengkal persegi, tersebut akan diberi sawah [seluas] dua bahu, tidak perlu membayar pajak. Sedangkan harga dua bahu sawah tersebut, duapuluh rupiah, 20 uang tembaga. Tanah ini yang akan ditanami tebu, [tanah] ini tidak [perlu] membayar pajak, selain itu pula si penggarap dibebaskan, dari pembayaran uwang kuli gladag, serta pekerjaan-pekerjaan [wajib] lain di luar distriknya)

Beban untuk membagikan tanah-tanah ini diserahkan kepada musing-musing desa yang terkena kewajiban kerja bagi *cultuurstelsel*. Karena, desa dianggap dapat mengusahakan kebutuhan tanahnya sendiri, untuk menciptakan tenaga kerja bagi gubernemen. Fasseur menjelaskan hal ini dengan:

(a) That land-tenure in the village was essentially determined by the so-called *Dorpsbeschikingsrecht* (or village right of disposal). this finds expression ... in the village community having a certain amount of say in the disposal (*vervreemding*) of the cultivated land in the village. In pressing cases, this can be utilised to empower the fresh division of the sawah belonging to the *dessa* among those villager who have a share in the holding of land (the so-called nuclear villagers), wether supplemented or not by those until then were excluded from a share in the fields.

Hal ini tentu saja bertolak belakang bila menghadapi data-data primer yang justru menegaskan bahwa kerja-kerja *onderneming* tidak harus dilandaskan pada penguasaan tanah, sebagai dilaporkan oleh *Commissie Umbgrove*. Dan, bahwa *sikep* sebagai istilah maupun sebagai klas sosial masih tetap bertahan sampai perempat pertama abad 20. Lihat misalnya *Memorie van Overgave* residen-residen Cirebon dari J. van Marel, tanggal 22 April 1922, atau R.Ph.M. van der Meer, 9 April 1925 maupun dari C.J.A.E.T. Hiljee, 3 Juni 1930. (*Memori Serah Jabatan 1921-1930, (Java Barat)*, 1976, ANRI, hal. 185-238). Dan meskipun di beberapa distrik memang terjadi perubahan istilah dari *sikep* menjadi *kuli kenceng* atau *kuli kendo* hal ini tidak berarti mereka dapat dipaksa melepas hak-hak istimewa yang dimilikinya, atau turun statusnya menjadi *buruh tani*. Mereka tetap bertahan sebagai klas petani-kaya yang tidak perlu menjual tenaga kerjanya pada orang lain, atau pada pabrik. (Gunawan Wiradi, 1983, "Kuli Kenceng di Pedesaan Jawa - Apa Masih Ada?").

<sup>74</sup> AKP 73/1.

(b) According to custom (*adat*), only those villagers who held a share in the cultivated village land had to perform [labour services] .. Under the pressure of the Cultivation System, the cultivated land was often divided afresh into smaller parcels, in order to increase the number of land holders and consequently the number of those subject to labour service. Afresh division of the land was also necessary when, the village had to hand over sawah to be used for government cultivations. The developments would have taken place primarily at the expense of the more substantial cultivators within the village.<sup>75</sup>

{(a) Bahwa pemilikan tanah di desa pada dasarnya ditentukan oleh apa yang disebut *Dorpsbeschikingsrecht* (hak desa untuk membagi). Ini mengekspresikan... komunitas desa mempunyai sejumlah tertentu keinginan dalam pembagian/pemindahan (*vervreemding*) tanah garapan desa. Dalam hal-hal mendesak, ini bisa dimanfaatkan untuk menguasai pembagian baru sawah yang dimiliki desa di antara para penduduk desa yang memiliki bagian atas tanah (yang disebut penduduk desa inti), ditambah atau tidak dengan mereka kemudian dikeluarkan dari pembagian lahan-lahan.

(b) Menurut kebiasaan (*adat*), hanya para penduduk desa yang mempunyai bagian atas tanah garapan desa yang harus melakukan [jasa kerja]... Di bawah tekanan sistem tanam paksa, tanah garapan seringkali dibagi secara baru atas persil-persil yang lebih kecil, untuk menambah jumlah penguasa tanah dan konsekuensinya jumlah mereka yang menjadi sasaran jasa kerja. Pembagian baru tanah juga diperlukan ketika... desa harus menyerahkan sawah untuk dipakai tanaman-tanaman pemerintah... Perkembangan-perkembangan bisa berlangsung terutama atas biaya kebanyakan para cultivator yang amat banyak dalam desa.}

Pembentukan penguasa tanah baru untuk menciptakan buruh-buruh bagi *onderneming*, antara lain dilakukan dengan pembukaan tanah-tanah baru untuk dijadikan tanah olah-gilir atau *gogol* (komunal). Hal ini terutama mulai mengejala sejak dicanangkannya *cultuurstelsel*, karena, kerja hanya bisa dituntut kepada kaum penguasa tanah. Jadi, kerja yang dilakukan kaum tani merupakan pengganti pajak tanah (*landrente*). Dalam membuka tanah baru, seringkali beberapa desa bergabung untuk mengusahakannya, seperti contoh berikut ini:

Djaksa besar poenja paprieksahan ietoe sawa babadan Siebakoeng

<sup>75</sup> Fasseur 1975, dalam Knight, 1982, *loc. cit.*, hal. 133-4.

njang boekak ietoe sawa orang darie 4 dessa, dessa Siebakoeng orang 13, Bandengan orang 12, Kranding orang 7, Gedjlieg orang 12

.....

Lenie 4 loera atoeranja moela-moela orang ketjielnja soeda boekak ietoe otan Siebakoeng die biekin sawa sampe djadie sawa, . . ietoe tana soeda djadie sawa ada njeng soeda 3 taoen of 2 taoen.<sup>76</sup>

Tetapi, upaya pembentukan kaum tani penguasa tanah periodik ini, seringkali mendapat gangguan dari orang-orang yang ber hak istimewa, seperti perampasan yang dilakukan oleh “teman-teman” bupati, untuk kasus tanah bukaan baru di atas:

Djadienja ietoe sawa die ambiel Sajjed Abdool Rachman bin Sehaf Tamar bermoelanja kiera-kiera sampee sekarang soeda 5 taoen ietoe waktoe Raden Adiepatie [Wirio dhi Negoro] soeda tanja pada loera njang 3 -Siebakoeng, Bandengan en Gedjlieg apa dia orang kassie Sajjed Abdool Rachman maoe ambiel otanja 40 bouw die biekin sawa - dia orang 3 menjahoet tiedak kassie - lantas Raden Adiepatie bekata kapan dia orang tiedak kassie dan ietoe njang miessie djadie otan soerooh djadieken sawa dalem satoe taoen - dia orang tiedak tjapak djadie die kasseehken tapie otanja sadja.

Laeen arienja Sajjed Abdool Rachman dateng die sawa Siebakoeng - kassie taoe katanja soeda dapet iedin pegang ietoe otan Siebakoeng boewat biekin sawa - dengen njang soeda djadie sawa orang soeda biekin toeroot die pegang djoegak.

Orang ketjiel tiedak kassie sebab sawa boleenja biekin kendirie dan ietoe Demang Raden Ardjodiewierijo njang soeda lepas [pensium] dateng die sawa baroe soerooh kassieken die pegang pada Sajjed Abdool Rachman - ietoe loera en orang ketjiel tiedak kassie sampee ada njang die oekom pada Demang Raden Ardjodiewierijo njang soeda lepas mangka ietoe djadie orang ketjiel kassie.<sup>77</sup>

Hal tersebut menunjukkan, bagaimanapun juga desa tidak bisa

<sup>76</sup> Lampiran La G. dalam Beslt. 8 Feb. 1847 No. 1.

<sup>77</sup> *Ibid.* Perlu ditambahkan bahwa tindakan Abdool Rachman ini didukung oleh demang setempat. Demang tersebut menghukum para petani yang tidak bersedia menyerahkan tanah tersebut kepada Rachman. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh semena-mena yang dimiliki kaum elit bumiputra setempat lebih kuat dibandingkan dengan pemerintah kolonial yang hanya menetapkan peraturan saja, namun lepas tangan terhadap soal-soal yang terjadi dalam proses pen distribusi tanah.

diperlakukan secara eksklusif, terisolasi dari campur tangan orang-orang diluarnya. Dan juga, menginformasikan bahwa terdapat segelintir orang ber hak istimewa, karena dekat dengan bupati, sedang dalam proses formasinya menjadi “tuan-tuan tanah”. Orang-orang semacam ini, yang jelas selalu dapat melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban kerja yang dituntut oleh gubernemen, karena sanggup membayar pajak-pajak tunai yang dibebankan oleh negara kolonial.<sup>78</sup>

Perkembangan di desa-desa dalam mendistribusikan tanah adalah, setiap tahun dilakukan pembagian tanah dengan mempertimbangkan pelapisan sosial yang ada. Misalnya, seperti dilaporkan oleh Umbgrove:

het [desa] bestuur trachten en ... regel to doen aannemen eene gelijke verdeeling onder de bevolking zodanig, dat iedere sikep een, (als ook de kamitoeas), de lebe, bahoe en kabaijan, ieder een en een kwart aandeel, en de loerah twee aandeelen krijgt, of wel, daarvoor overvloed van sawa's bestaat, een verdeeling, gemenredigd aan de krachten van iedere sikep, en welk geval, genoemde leden van het dessa bestuur aandeelen genuten en dezelfde verhouding als heerboven, doch berekend naar het grootste sikeps aandeel; de velden, die dan nog overschieten laat men zoo mogelijk door de dessa's, ...<sup>79</sup>

(pemerintah [desa] mencoba dan ... biasanya melakukan pembagian merata di antara penduduk seperti itu, bahwa setiap sikep, (seperti juga kamitua), lebe, bahoe dan kabayan, masing-masing bagiannya seperempat, dan bagian yang didapat lurah duakalinya, yaitu, untuk itu terdapat sawah yang berlimpah, suatu pembagian, setiap sikep bersama menyusun sesuai dengan aturan, dan setidak-tidaknya, bagian anggota pemerintahan desa tersebut menguntungkan dan berimbang sama seperti atasannya (heerboven), tetapi ditentukan menurut bagian sikep-sikep besar; tanah-tanah, yang masih tersisa dengan begitu dapat disimpan/dibiarkan oleh desa).

*Sikep-sikep* di atas menguasai tanah antara empat hingga duabelas

<sup>78</sup> Jumlah pembayar pajak di Pekalongan tidak banyak, hanya sekitar 450 orang. Setiap tahunnya dari orang-orang ini bisa dikumpulkan lebih-kurang 400.000 *gulden* bagi gubernemen. Inilah orang-orang ber hak istimewa yang terutama memiliki tanah-tanah luas, beberapa diantaranya menguasai lebih dari 100 bau. (*Register van de taxatie der eigendommen in de Residentie Pekalongan 1847-1849*/ AKP 85/4.)

<sup>79</sup> Laporan *Commissie Umbgrove*, AC 1584.

*bau.*

Sejauh mana tanah-tanah *sikep* bisa dinilai bersifat sementara atau menjadi milik pribadi (*individueel-bezit*), sulit memastikannya. *Eindresume* (2) misalnya, menyatakan terdapat sekelompok kecil orang dalam desa yang memiliki tanah pribadi.<sup>80</sup> Atau, seperti dicatat oleh Knight dari *Kultuur Verslag* tahun 1856, yang mengatakan:

Threre exists here an abuse which has crept in over the years, namely of fencing (*ompaggeren*) the sawah and making so-called gardens of it, which are, however, mostly still planted with padi . . . since the abuse has crept in here of considering house-plots (*erven*) and such like farmland as individual property, in deviation from all Javanese institutions.<sup>81</sup>

(Di sini hidup suatu penyalah-gunaan yang mulai timbul selama setahun ini, yaitu pemagaran (*ompaggeren*) sawah dan menamakannya kebun-kebun, yang, betapapun juga, kebanyakan tetap dinamai dengan padi. Tujuan tata-cara ini, menurut residen, adalah untuk menghindari pembayaran landrente serta untuk memudahkan penjualan tanah, karena penyalah-gunaan yang mulai timbul ini mengganggu bidang rumah (*house-plot*) serta tanah pertanian seperti itu sebagai hak milik pribadi, yang menjadi penyimpangan dari semua institusi-institusi orang Jawa.)

Para *sikep* di atas, dalam pembagian tanah yang dilakukan setiap tahun, sudah pasti terjamin mendapatkan hak-haknya. Sementara lapisan sosial di bawah *sikep*, sebagian mendapat tanah olah-gilirnya seluas setengah *bau*,<sup>82</sup> dan sebagian yang lain tidak mendapatkan tanah, meskipun mereka juga termasuk yang melakukan kerja bagi gubernemen. Atau dalam hitungan Umbgrove, di karesidenan ini terdapat 9.169 penguasa tanah berhadapan dengan 2.238 yang tidak bertanah, yang bekerja dalam *onderneming* gula. Atau, seperti penghitungan gubernemen pada awal 1860-an, untuk seluruh buruh yang direkrut, dapat dilihat dalam tabel-5 berikut:

<sup>80</sup> *Eindresume...*, 1880, hal. 84, 86.

<sup>81</sup> Knight, 1982, *loc. cit.*, hal. 139.

<sup>82</sup> Menyimpang dari isi kontrak.

Tabel 5

## Distribusi tanah kepada petani

Distrik	Keluarga petani yang mendapat bagian tanah atau <i>gogol</i> .	Keluarga petani yang tidak mendapat bagian tanah.
Pekalongan	3.318	1.723
Pekajangan	3.010	1.292
Sawangan	5.244	2.094
Wiradesa	6.098	704
Sragi	4.619	1.326
Bandar	3.875	678
Batang	4.521	1.929
Masin	3.343	933
Sedayu	4.397	764
Subah	3.237	2.051
Kalisalak	3.341	1.300
Kebumen	3.522	1.153
	48.525	15.946

Sumber: *Statistiek der Residentie Pekalongan 1862*. (AKP 83 B/3)

Penjelasan tentang, mengapa sistem tidak bisa memberikan fasilitas yang sama dalam pendistribusian tanah kepada buruh-buruhnya, bisa terjawab dalam laporan residen tahun 1859, yang mengatakan:

dat in het regentschap Batang de gewoonte bestaat, om alleen als deelgeregtigde in de sawas aantemerken die landbouwers, welke aandeel in de suiker kultuur hebben, de hoofden hebben daar als regel aangenomen bij elke bouw suikerriet slechts 4 man intedeelen, hoe sterk de bevolking ook moge wezen, onder deze menschen worden al de aanwezige sawas veerdeeld, en moeten de met kultuur dienstpligtigen, wanneer zij ook sawas willen hebben, die van hun huren, het behoeft dus Been betoog, dat de gepriviligeerden alleen bij de kultuur worden ingedeld, die een dubbel voordeel, en van de suiker kultuur en van de sawas genoten.

Deze kultuur dienstpligtigen worden alleen opgegeven landbouwers to zijn, en wordt de rest der bevolking als parias beschouwd die door hunnen arbeid, hunne mede burgers verrijken moeten.<sup>83</sup>

(bahwa di dalam Kabupaten Batang ada kebiasaan, yang merupakan pemegang bagian sawah hanyalah para kultivator (landbouwer), yang mengambil bagian dalam penanaman gula, untuk itu para kepala [desa] membuat peraturan yang menetapkan tiap bau tebu gula hanya untuk empat orang laki-laki, tanpa menghiraukan orang yang ada, semua sawah yang ada dibagi di antara orang-orang ini, dan mereka yang tidak terlibat dalam jasa kerja pada penanaman, juga

<sup>83</sup> *Politiek verslag*, AKP 69.



bila ingin mendapatkan sawah, bisa menyewanya, kebutuhan menjadi jelas, bahwa hanya orang-orang ber-hak istimewa yang punya bagian dalam penanaman, suatu keuntungan ganda, menikmati tanaman gula dan sawah.

Orang-orang yang terlibat dalam jasa kerja pada penanaman inilah satu-satunya yang dianggap sebagai para kultivator, dan penduduk lainnya dianggap orang parian yang melalui tenaganya (*arbeid*), harus ikut penduduk desa kaya).

Hal di atas menunjukkan pendistribusian tanah yang dilakukan secara timpang, karena semata-mata hanya diberikan terhadap orang-orang yang ber hak istimewa (*ge privileeerd*) saja. Sebab lurah dan kaum yang ber hak istimewa yang melakukan pengaturan pembagian tanah-tanah ini. Sedang kaum “istimewa” ini dalam pertanyaan atas kejadian tersebut, yang diajukan gubernemen, mereka biasanya telah siap dengan jawaban: “... *omdat er sawa's gebrek bestaat*.”<sup>84</sup> (sebab tidak ada sawah.) Padahal, hampir setiap tahun dapat ditemui pembukaan tanah-tanah baru.

Hanya tekanan yang keras dari gubernemen, yang mampu mendorong kaum elit desa melakukan pembagian tanah *gogol*. Tetapi seringkali tanah yang dibagikan kepada petani tak bertanah adalah tanah-tanah tandus dan kering, atau luas tanahnya terlalu kecil.<sup>85</sup> Sehingga tidak jarang petani menolak mendapatkan tanah-tanah *gogol*:

Seorang petani menyatakan mereka lebih suka menjadi tukang/buruh daripada menjalankan kerja wajib dengan bagian sawah yang begitu kecil.<sup>86</sup>

Penolakan ini, tentunya berkaitan dengan *kerja* yang menyertainya, yang tidak memberi peluang bagi pengolahan tanah *gogol* yang sangat kecil tersebut.<sup>87</sup>

<sup>84</sup> Laporan *Commissie Umbgrove*, AC 1584.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Yasuo, 1986, “Perkebunan Tebu dan Masyarakat Pedesaan di Jawa,” hal. 60.

<sup>87</sup> Sejak pertengahan abad ke-19, dalam sehari buruh *onderneming* gula harus bekerja selama 10 jam. Sehingga waktu, yang tersisa untuk menggarap tanah *gogolnya*, menjadi sangat sedikit atau tidak ada sama sekali. Dan tanah *gogol* yang hanya seluas seperempat hingga setengah *bau*, sebetulnya, tidak mampu menghidupi satu keluarga petani. Sedang kerja buruh atau kuli, sejak pertengahan

Karena masalah-masalah diferensiasi petani yang terdapat di pedesaan tidak bisa dipecahkan dengan reformasi tanah gubernemen, maka dalam interaksinya dengan *onderneming*, persoalan ini juga akan muncul. Seperti siapa yang akan melakukan kerja, *sikep*, *gogol* atau yang lain? Seorang *sikep* bisa menghindari kerja bagi *ondeneming* dengan membayar sejumlah uang kepada lurah. Hal ini diungkapkan dalam catatan seorang administrator pabrik gula di Pekalongan tahun 1859:

There was ... a constant traffic in coolies carried on by *loerah*. Sometimes men who did not wish to work as sent as much as half a *rupee* to the *loerah*, who found a replacement to whom he have perhaps 10 *doits* reserving 40 *doits* to his commission.<sup>88</sup>

(Ada... lalu lintas kuli-kuli yang diselenggarakan para *loerah*. Kadang kala orang yang tidak ingin bekerja sebagai kuli mengirim sebanyak-banyak setengah *rupee* pada *loerah*, yang untuk mendapatkan penggantinya barangkali ia harus memberikan 10 *doit*, mencadangkan 40 *doit* untuk komisinya.)

Di samping itu seorang *sikep* tetap bisa memaksa lapisan sosial di bawah-nya untuk menggantikan kerja bagi gubernemen melalui pengaruh perhambaan yang dimiliki sebagai petani-kaya. Untuk itu tidak perlu mengeluarkan uang, seperti ditunjukkan *Kultuur Verslag* 1862:

Geschiedt veelal bij de siekeps of landbouwers door bij hen inwonende en tot hun huisgezin behoerende lezen of door hunne rajats of menoempangs terwjl ook wel dikwijls afkoop van heerendiensten in de desso plaatsvindt, hoewel dit laatste zooveel mogelijk wordt tegengegaan.<sup>89</sup>

(Biasanya *sikep-sikep* atau kultivator melalui orang-orang yang menumpang padanya dan untuk anggota keluarganya atau melalui rakyatnya atau menoempang pada waktu itu seringkali juga menebus heerendienst dalam desa-desa, meskipun pada akhirnya banyak ditentang).

Dari penyudutan lapisan sosial bawah yang mengakar dalam desa abad, memberi upah yang memadai untuk menutup kebutuhan subsisten petani.

<sup>88</sup> Knight, 1982, *loc.cit.*, hal. 139.

<sup>89</sup> AC no. 1624.

inilah, nantinya mendorong lahirnya “kerja bebas” (*vrije arbeid*).  
Yaitu sekelompok orang memasuki orbit pabrik-pabrik gula,  
menawarkan diri tanpa diperintah oleh para pamong atau pun  
atasannya.

# Bab IV: Organisasi Produksi Industri Gula

## Pengantar

Industri gula dibangun dengan mengkaitkan modal, manajemen dan tenaga kerja secara intensif. *Cultuurstelsel* yang mencoba untuk merealisasikan rencana-rencana Bosch, meletakkan dasar-dasar tata hubungan industrial tersebut. Ada tiga elemen yang bisa dilihat dalam jaringan industri ini, yaitu gubernemen, *fabriekant* (pemilik pabrik) dan kaum tani (tenaga kerja). Gubernemen berperan sebagai motivator dan memberikan landasan peraturan (regulasi) bagi industri gula. Selain itu karena selama *cultuurstelsel* yang berlangsung adalah industri negara, maka gubernemen menjadi pihak utama yang paling berkepentingan bagi keberhasilan usahanya. Oleh sebab itu gubernemen pula yang menghubungi kaum tani dengan menggunakan pengaruh lapisan elit setempat—bupati, wedana dan lurah—untuk memaksa petani menanam dan merawat tebu. Selain itu gubernemen juga menginstruksikan pada kaum tani untuk bekerja juga pada pabrik-pabrik gula yang didirikan, menjadi buruh. Untuk keperluan tenaga kerja ini gubernemen melakukan persetujuan kerja dalam bentuk kontrak. Kontrak-kontrak kerja tersebut dibuat secara kolektif, diorganisir oleh lurah.

Pada sisi yang sejalan dengan gubernemen adalah pihak *fabriekant* atau pihak pabrik, sebagai penangan penggilingan tebu-tebu yang telah disiapkan oleh gubernemen. Karena ini adalah industri negara, maka gubernemen menawarkan kepada pihak-pihak yang bersedia mengusahakan pengepresan tebu milik gubernemen. Untuk ini dilakukan kontrak menggiling antara gubernemen dengan *fabriekant* (disebut juga dengan kontraktor). Gubernemen, terutama, bertanggung jawab terhadap kontraktor dalam menyiapkan tebu. Namun karena beberapa kontraktor tidak mempunyai modal usaha, maka gubernemen pun juga bertanggung jawab, melalui NHM (disalurkan oleh *Javashe Bank*),

memberikan fasilitas modal pinjaman tanpa bunga untuk pembangunan pabrik. Tetapi menjelang akhir 1830-an, pabrik-pabrik modern yang dibangun lebih banyak dibiayai oleh pihak swasta atau oleh *fabriekant* sendiri. Jadi, kurang tepat menyebut pabrik-pabrik tersebut sebagai perusahaan negara, akan tetapi karena ada kegiatan saling mendukung antara gubernemen dengan *fabriekant* maka lebih tepat perusahaan tersebut disebut setengah swasta atau setengah negara.

Sejak tahun 1830 di Pekalongan terdapat tiga buah pabrik gula yang beroperasi untuk menggiling tebu-tebu gubernemen, dua diantaranya dioperasikan oleh orang-orang Tionghoa, yaitu oleh Gou Kan Tjou di desa Wonopringo dan Tan Hong Jan di desa Klidang.<sup>1</sup> Sedangkan yang ketiga dioperasikan oleh Alexander Loudon, seorang bekas pedagang besar Inggris yang dilibatkan kerja administratif dalam kurun pasca Raffles.<sup>2</sup> Loudon menjadi *fabriekant* di pabrik gula Karanganyar, kabupaten Pemalang. Namun karena keterbatasan informasi untuk ketiga pabrik gula di atas maka pembicaraan lebih diarahkan pada tiga buah pabrik modern yang didirikan sekitar tahun 1837-1838 yaitu Wonopringo, Sragie, Kalimatie.

Elemen ketiga dari industri gula, yang sangat menentukan dalam proses produksi industri ini adalah kaum tani, sebab industri atau pabrik tidak bisa bekerja sama sekali tanpa adanya orang-orang ini. Dinamika yang dibicarakan dari peranan petani adalah ruang-gerak yang dibuat gubernemen ataupun *fabriekant* dalam bentuk persetujuan-persetujuan kerja. Gubernemen dalam persetujuan kerja biasanya melakukan kontrak-kontrak yang disebut *suiker-contract*, sedang para *fabriekant*, —setelah menggejalanya tenaga kerja secara berlimpah—lebih menyukai kerja-kerja tidak mengikat dengan *suiker-campagne*.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ke dua pabrik ini tidak ada hubungannya dengan dua pabrik yang pernah ada di karesidenan ini sejak akhir 1770-an, yang sempat disinggung dalam bab II di atas.

<sup>2</sup> Loudon selain membangun pabrik di Pemalang, juga bersama De Sturler dan Verbeek membangun pabrik gula Poegoe dan Gemoe di Kendal pada tahun 1835-36. (Deerr, 1949, *op. cit.*, hal. 222) Dalam tiga dasawarsa kemudian, Loudon menduduki jabatan Direktur *Algemeene Secretarie*.

<sup>3</sup> Istilah yang biasa dipakai dalam laporan-laporan arsip dan dalam tulisan-tulisan

Dinamika persentuhan ketiga elemen di atas akan menjadi jelas melalui penjabaran sub-bab di bawah, yang dibagi atas: modal, menjelaskan siapa-siapa investor industri atau pabrik gula di Pekalongan; dilanjutkan dengan sub-bab tenaga kerja, mengungkap sisi lain di sekitar perekrutan buruh, karena mekanisme dalam desa telah diuraikan di atas,<sup>4</sup> maka di bawah ini akan dijabarkan peran bupati sebagai perekrut. Dilanjutkan dengan sub-bab Tanah.

Dua sub-bab terakhir menjelaskan, pertama jenis-jenis pekerjaan yang mesti dilakukan dalam *onderneming*, dan kedua menjelaskan pilihan dari kaum tani terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada di *onderneming*. Kalau dalam sub-bab yang keempat khususnya menjelaskan kerja yang berlandaskan kontrak kerja-wajib dengan gubernemen. Hikmah yang ingin diambil dari penjelasan ini adalah, bahwa kerja-kerja tersebut telah menimbulkan dampak perubahan penting bagi petani. Yaitu, secara riil pabrik telah mendorong petani untuk tidak menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya semata-mata dari penguasaan tanah atau kerja di lahan pertanian, melainkan petani dilibatkan untuk memasuki lapangan kerja baru. Berbagai kebutuhan pabrik yang mesti disediakan mendorong para petani melakukan kegiatan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengolahan lahan pertanian, namun dari pekerjaan yang dilakukan disediakan upah yang bisa menutup kebutuhan sehari-hari petani. Kerja-kerja semacam kusir gerobak, menganyam kranjang, dan sebagainya hal ini menunjukkan bahwa petani bisa memilih kerja-kerja bukan pertanian yang ditawarkan industri gula.

Sedang dalam sub-bab terakhir, menjabarkan pergeseran atau perluasan peran *fabriekant* yang sejak pertengahan 1850 diberi hak lebih leluasa melakukan persetujuan langsung dengan petani. Dalam kurun ini telah pula lahir “kerja-bebas” yang memasuki *onderneming* gula di Pekalongan.

yang pernah dibuat mengenai industri gula, yang diacu adalah pengerahan tenaga kerja dalam jumlah besar, sesaat pada masa awal hingga akhir “pesta” giling (berlangsung sekitar tiga bulan dalam setahunnya).

<sup>4</sup> Lihat bab III.

## Modal

Menjelang pertengahan tahun 1837, gubernemen dengan kaum *fabriekant* mengadakan persetujuan-persetujuan untuk mendirikan pabrik-pabrik gula modern. Tetapi, gubernemen sendiri mempunyai masalah dengan dana-dana yang diminta para *fabriekant*. Pada saat yang sama *Javasche Courant*<sup>5</sup> menawarkan diri menjadi pemasok dana bagi keperluan pembangunan pabrik-pabrik tersebut.

Tawaran *Javasche Courant* terjadi karena ada “undangan” untuk memasok modal, dimuat dalam pasal 1 *model suiker-contract*, yang memberikan kesempatan kepada pemodal di luar pemerintah.<sup>6</sup> Permohonan tersebut langsung diterima. Sebab pada saat yang sama gubernemen tidak sanggup memenuhi dana yang diminta para *fabriekant*, dikarenakan, NHM tiang utama pemasok modal sedang mengalami krisis permodalan. Krisis modal dalam tubuh NHM terjadi akibat daripada sebagian besar debiturnya tidak memberikan jaminan yang berarti terhadap pinjaman-pinjaman yang telah diberikan. Sehingga, direktur NHM melarang memberikan persetujuan pinjaman-pinjaman baru. Saat itu modal NHM hanya tinggal 800 *gulden*. Oleh sebab itu NHM lebih memperhatikan usaha sendiri yang telah dirintis sejak awal didirikannya lembaga ini, seperti pengelolaan *onderneming-onderneming* kopi maupun gulanya.<sup>7</sup> Untuk tidak terlalu menampakkan betapa “miskin”nya Negara Hindia Belanda, gubernemen masih berusaha menunjukkan sosok keterlibatannya dalam pembangunan pabrik-pabrik tersebut dengan cara menekan jumlah modal yang dituntut para *fabriekant* pada *Javasche Cou-*

<sup>5</sup> *Javasche Courant* didirikan tahun 1828, dibentuk untuk menjadi model atau untuk mengawasi koran-koran yang terbit di Nederland. Selain itu koran ini diberi tanggung jawab untuk mengawasi peran pemerintah daerah. Sejak 1831 *Jav. Cour.* menjadi corong resmi pemerintah untuk kegiatan-kegiatan dalam industri gula. (“*Javasche Courant*”, *ENI* 1918, hal. 221; *Saatsblad* 1831, no. 47). Kemungkinan dari keterlibatannya yang terakhir inilah maka koran ini tertarik untuk menjadi investor pabrik gula.

<sup>6</sup> Surat Residen Pekalongan kepada *Directeur der Kultures* di Buitenzorg, 7 November 1837. Permohonan untuk menjadi investor ini kemudian dilanjutkan kepada Gubernur Jenderal di Batavia (missive *Directeur der Kultures*, 13 November 1837, AC 385).

<sup>7</sup> *Gedenkboek der Nederlandsche Handel Maatschappij 1824-1924*, 1924, hal. 612.

*rant* sekitar 35%.<sup>8</sup> Dari modal yang disepakati tersebut, lebih dari separuhnya dimasukkan ke dalam rekening bank. Dan, setiap pemakaian uang oleh *fabriekant* harus sepengetahuan gubernemen (*residen*).<sup>9</sup>

Dana-dana yang dicairkan pada tahun-tahun pertama berdirinya pabrik-pabrik Kalimatie dan Sragie tersebut dipakai untuk membeli mesin-mesin pengepres - seperti mesin pengilangan buatan *Pitcarin en Eijmen*<sup>10</sup> - dan untuk persekot (uang muka) membuka *onderneming* dan mendirikan bangunan pabrik gula. Ketiga pabrik gula di Pekalongan ini memakai lahan sawah untuk tebu seluas sekitar 1500 *bau*,<sup>11</sup> pabrik Sragie dan Kalimatie masing-masing menggunakan 400 *bau*, dan Wonopringo, yang terbesar, memakai 700 *bau* lahan sawah.

<sup>8</sup> Pihak *fabriekant* mengajukan proposal dana, musing-musing 70.000 *gulden*, tetapi gubernemen hanya menyetujuinya sebesar 50.000 *gulden*. (*Missive Directeur der Kultures*, 16 November 1837, AC 385) Proposal tersebut hanya untuk pabrik-pabrik Sragie dan Kalimatie; sedang pabrik Wonopringo merupakan salah satu dari enambelas pabrik gula milik NHM, yang ada di Jawa, penulis tidak berhasil menemukan penggunaan dana-dana pembangunan pabrik ini. Hal yang cukup menarik di sini adalah, menurut *Directeur der Kultures* pinjaman-pinjaman tersebut diberikan tanpa bunga, para *fabriekant* hanya diwajibkan melunasinya secara angsuran mulai 1841, dan seluruh jumlah hutang harus telah lunas pada akhir 1844. (AC 408, poin nomor 27)

<sup>9</sup> *Missive Directeur der Kultures* kepada Residen Pekalongan, 16 November 1837 (AC 385).

<sup>10</sup> Harga-harga yang harus dibayarkan atas perangkat teknologi canggih ini cukup besar, seperti pabrik Kalimatie mengeluarkan 19.300 *gulden*, harga yang sama juga dikeluarkan oleh pabrik Sragie. Ke duanya menggunakan penggerak kincir air, (surat Residen Pekalongan kepada *Directeur der Kultures* 9 November 1837, AC 385). Sengaja pabrik Wonopringo yang paling modern, karena menggunakan pengepres motor uap, tidak ditemukan biaya pembelian mesin-mesin pabriknya.

<sup>11</sup> Tiga persen dari luas lahan sawah yang ada di Pekalongan; bandingkan dengan tabel 1 (bab III). Luas lahan tebu ini hampir selalu tidak tepat dalam ukurannya. Inilah salah satu kesulitan yang dihadapi tanaman ini bila menginginkan hasil produksi maksimal dari jengkal-jengkal tanah sawah yang dipergunakannya. Dengan sistem rotasi lahan tebu, pihak pabrik akhirnya selalu mengambil tanah-tanah lebih luas dari yang diperkirakan. Seperti pada tahun-tahun antara 1838 hingga akhir 1840-an, *verbaal-verbaal* Direktur Perkebunan menyebutkan luas-luas yang berbeda-beda. Luas 1500 *bau* adalah untuk tanaman yang telah dewasa. Sengaja untuk penanaman bibit-bibit baru diperlukan tanah dengan luas yang sama. Hal ini dilakukan agar pabrik-pabrik bisa terjamin dalam melakukan pengepresan tebu terus-menerus setiap tahun. (AC 408; AC 1584)



Para *fabriekant* berusaha merealisasikan pabrik-pabrik tersebut dengan dana terbatas. Sehingga, H. van Blommestein ataupun A. Zicsel musing-musing perancang pabrik Kalimatie dan Sragie,<sup>12</sup> mencoba untuk menggunakan uang-uangnya se-efektif mungkin. Jika perlu mereka sendirilah yang memimpin pabrik-pabrik tersebut sebagai administraturnya.<sup>13</sup>

Tetapi suatu hasil maksimal dari produksi harus bisa didapatkan, sehingga pada akhirnya pihak *fabriekant* melakukan eksperimen-eksperimen demi peningkatan hasil produksi pabriknya.<sup>14</sup>

## Tenaga Kerja

Dalam pertengahan tahun 1830, gubernemen mulai melakukan aktivitas merekrut tenaga kerja. Secara resmi petani diserap melalui mekanisme kerja berdasarkan kontrak (*suiker-contract*). Untuk kerja perekrutan ini, peranan lurah (kepala desa) sangat besar sebagai mediasi antara gubernemen dengan kaum tani. Seperti, lurah melakukan pembagian tanah *gogol*, karena dalam regulasi telah dinyatakan bahwa, hanya dengan pembagian tanah saja tenaga kerja baru bisa diserap. Namun terdapat kesulitan-kesulitan dalam pembagian tanah,<sup>15</sup> maka sebagian dari buruh gula yang disiapkan

<sup>12</sup> Pada tahun 1850, L. Vitalis membeli pabrik ini, dengan demikian berganti pula *fabriekantnya*.

<sup>13</sup> Blommestein bersaudara, *fabriekant* pabrik Kalimatie, akhirnya mentradisikan jabatan administratur langsung dipegang oleh *fabriekantnya* sendiri. Hal ini berlangsung terus kepada para penggantinya. Begitu pula yang berlangsung dalam pabrik Sragie (semasa dimiliki A. Zicsel maupun setelah dibeli oleh Vitalis). Mungkin hal ini dilakukan sebagai cara untuk menghemat dana. Sedang pabrik Wonopringo karena pemiliknya adalah maskapai perdagangan (NHM), maka jabatan administratur dipegang secara bergantian oleh orang-orang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan tersebut.

<sup>14</sup> H. van Blommestein adalah orang yang paling banyak melakukan eksperimen. Ia menjadi ilmuwan (*scientist*) gula pertama di Jawa yang banyak melakukan penelitian. Oleh gubernemen hasil-hasil penelitiannya di awal 1840-an dijadikan keputusan melalui Bestl. 4 December 1845 No. 4, untuk diberlakukan pada pabrik-pabrik gula lainnya. Pokok uraian yang disetujui oleh gubernemen adalah penggunaan buruh sebanyak mungkin untuk kerja di kebun-kebun tebu (tidak digunakan tenaga hewan) dan diterapkannya sistem *appareil* dari *De Rosne en Cail* dalam pemasakan gula. Untuk suatu terbitan singkat berdasarkan Bestl. di atas, lihat Blommestein, 1847, *Suikerfabrieikaat*.

oleh desa, tidak mendapatkan hak tanah *gogol*. Selain itu lurah pula yang mengadakan pengaturan kerja di *onderneming* gula. Kontrak-kontrak gula gubernemen tersebut mengikat petani untuk bekerja tanpa batas waktu yang tegas:

kontract iki bakal kanggo setaun, atawa saingga kongsi rolas taun, apa kersane kandjeng gupernemen.<sup>16</sup>

(kontrak ini [berlaku] untuk setahun, atau sepanjang kongsi duabelas tahun, atau [terserah] sekeinginan tuan (*kandjeng*) gubernemen)

Sedang kerja-kerja yang terkait dalam kontrak tersebut meliputi:

Sakabehe pegawejan ing dalem panggilingan sarta ing dalem kebon atawa nebang tebu, amek kaju bakar, iku uwong-uwong amesthi anglakoni pegawejan iku.<sup>17</sup>

(Seluruh pekerjaan di dalam penggilingan serta di dalam kebun atau menebang tebu, termasuk [mengumpulkan] kayu bakar, orang-orang tersebut harus melakukan pekerjaan[-pekerjaan] tersebut.)

Kerja-kerja inilah yang disebut dengan *cultuurdienst*.

Rancangan-rancangan untuk menyerap buruh di atas, tampaknya tidak benar-benar berhasil memaksa petani untuk mematuhiinya. Beratus-ratus buruh yang telah menandatangani kontrak, hampir selalu mengingkarinya. Kampung-kampung kuli<sup>18</sup> di lingkungan

<sup>15</sup> Dijabarkan dalam bab III.

<sup>16</sup> Lihat AKP 73/1. Dari tahun ke tahun redaksional kontrak-kontrak tersebut mengalami perbaikan. Setelah didirikannya pabrik-pabrik modern di tahun 1837-1838, kontrak kerja dibatasi antara mulai waktu tanam hingga panen saja, sekitar 18 bulan.

<sup>17</sup> Namun sejak 1834, Bosch membuat peraturan bahwa gubernemen hanya bertanggung jawab pada penyiapan buruh-buruh untuk kerja di luar pabrik. Untuk buruh dalam pabrik, *fabriekant* harus mencarinya sendiri. Tetapi ada keluhan-keluhan dari beberapa *fabriekant* seperti dialami oleh Bosch sendiri, yang terjadi saat dia mengunjungi salah satu kontraktor pabrik gula. Di pabrik yang dikunjunginya, kontraktor tersebut hanya mendapatkan tebu saja yang dibantu oleh gubernemen, sedang untuk mendapatkan kebutuhan lain seperti kapur, batu bata, kayu bakar, atau tenaga kerja, kontraktor tersebut harus memesannya sendiri pada penduduk setempat tanpa bantuan gubernemen. Kebutuhan sekunder ini sangat sulit didapatkan tanpa bantuan gubernemen. Keluhan ini menggugah Bosch, sehingga akhirnya dia mengintruksikan untuk memberi dukungan terhadap kebutuhan-kebutuhan para kontraktor gula tersebut. (Lihat kutipan Hoevell, dalam Penders, 1977, *loc. cit.*, hal. 38)

*onderneming*, banyak yang ditinggalkan. Akibatnya terjadi kegagalan panen-panen tebu selama 1830-1840 karena kurangnya tenaga perawat tanaman.<sup>19</sup>

Tekanan atas berkurangnya buruh sangat dirasakan memuncak tahun 1836, ketika Residen Pekalongan, Praetorius, mengatakan dalam suratnya bertanggal 12 September:

Kita dapat rapport derri toean Wiggers [kontrolir di Batang], hal derri pekredjaan for sedia tannah atauw for tanem teboe terlabe achir - lagie kaloe Toean Controleur ada pegie lantast ada koerang orang njang bekredja den koerang karbouw.

Sehingga residen meminta bupati Batang, Ario Djaijeng Ronno agar bersedia turun tangan mempergunakan pengaruhnya menarik petani untuk bekerja kembali dalam *onderneming* gula:

Kita menjataken pada Tommongong [tumenggung] njang derri hal orang njang bekredja tannem teboe atauw sedia tannah darii perkarra ietoe tieda boleh korang darie limaratoes satoe harie, die dalem sepoeloe harie inie - mangka kita kasie prenta pada Tommongong mestie djaga kendirie njang ada liemaratoes orang saben harie en soepaija pagie pagie ietoe orang ada die sawa njang di kerdja for tanem teboe - kite soeka Tommongong poekoel anem pagie datang dan kliling die tempat sietoe kaloe orang ketjiel tahoe Regent ada, temptoe di takoet tienggal die roemah.<sup>20</sup>

Ini merupakan instruksi pertama kali dari residen yang meminta bupati untuk turun langsung menangani masalah buruh bagi *onderneming* gula. Namun demikian, nampaknya Djaijeng Ronno enggan membantu gubernemen. Ronno, dalam surat balasannya kepada gubernemen, sehari kemudian, hanya menjawab: “ietoe toean poenja parinta njang terseboet die atas hamba hada bilang

<sup>18</sup> Vitalis, dalam laporan tahun 1834, mengatakan bahwa di dalam kebun-kebun tebu dibangun “desa” (*dorp*). Dalam “desa” tersebut terdapat *pondok* yang dihuni oleh para kuli; *pesanggrahan* yang merupakan tempat tinggal staf pabrik (orang-orang Eropa); dan kandang-kandang kuda (AC 1624). Bentuk “desa” dalam kebun ini khas Pekalongan, dan menjadi prototipe yang kemudian dicontoh untuk diterapkan dalam karesidenan-karesidenan lain, seperti dalam tahun 1832 Karesidenan Cirebon, mencontoh untuk membangun “desa” dalam kebun ini (Breman, 1986, *op. cit.*, hal. 30).

<sup>19</sup> AC 46.

<sup>20</sup> Surat bertanggal 5 Okt. 1836, Beslt. 3 Jan. 1837

baik, ...” Akan tetapi, tidak ada tindakan kongkrit yang dilakukan Ronno.

Kalau sikap Ronno menolak instruksi residen, maka di lain sisi ayahnya, Pangeran Ario Soero Adi Ningrat, mempunyai sikap lain. Adi Ningrat bahkan berusaha mempengaruhi anaknya, untuk menghindari konflik dengan gu bernemen.<sup>21</sup>

Meskipun pada akhirnya, di penutup bulan Oktober 1836, Ronno bersedia melakukan kerja mandor, mengawasi buruh di kebun-kebun tebu. Untuk pertama kalinya di Pekalongan, seorang bupati melakukan kerja mandor. Hasilnya tidak mengecewakan, Demang Batang melaporkan, dengan munculnya bupati di *onderneming*, 303 buruh penandatanganan kontrak menepati janjinya, dan juga, berhasil menyerap buruh-buruh bukan kontrak sebanyak 574 orang (sebagian besar adalah buruh usia muda, sekitar 12 tahun, buruh anak-anak, bekerja untuk membantu orang-tuanya).<sup>22</sup> Mereka mengerjakan kebun-kebun tebu pada pagi hari dari pukul 6.00 hingga pukul 10.00, dan sore hari dari pukul 16.00 hingga 18.00.<sup>23</sup>

Namun dalam tahun-tahun berikutnya, laporan-laporan yang ada, menginformasikan bahwa bupati tidak mendukung sistem penanaman gula gubernemen ini. Sebagai di ungkapkan oleh Vitalis, *Inspecteur der Kulturen* tahun 1837, yang mengatakan tentang bupati Karesidenan Pekalongan:

... who preferred very much to be left alone and only carried out inspections when they had to accompany the Resident on tour, ...<sup>24</sup>

(...yang lebih suka dibiarkan menyendiri dan hanya ikut inspeksi

<sup>21</sup> Dapat dilihat dari pernyataan demang distrik Batang, Tirta Kesoemo, dalam suratnya 25 Oktober 1836, yang mengatakan:

‘.. diemana ing soeda toeroot Raden Tommongong apa lagie bapaknja toewa Raden Patih diea poenja mauw djangan sampee klouwar sampingannja ...’ (dalam Beslt. 3 Jan. 1837 No. 4)

<sup>22</sup> Gejala buruh anak-anak ini berlangsung terus hingga berakhirnya *cultuurstelsel*. Lihat misalnya laporan *Commissie* Umbgrove yang dalam penelitiannya juga menemukan buruh anak-anak dengan usia sekitar 14 tahun (AC 1854).

<sup>23</sup> Jam kerja ini senantiasa berubah-ubah dari waktu ke waktu.

<sup>24</sup> Vitalis dalam Penders, 1977, *loc. cit.*, hal. 22.

ketika mereka harus menemani perjalanan Residen,...)

Hal serupa juga dilaporkan oleh kontrolir Batang pada tahun 1844:

that I have so far not been able to discern even the slightest improvement in the present feeble execution of the work which has to be performed each day, least of all as regards the turn-out of labourers.<sup>25</sup>

(bahwa sejauh ini saya tidak bisa melihat sedikitpun perbaikan dalam pelaksanaan kerja lamban yang sehari-harinya dilakukan, paling tidak dalam hal mendatangkan buruh-buruh.)

Hal ini berlangsung cukup lama, keberanian gubernemen untuk mengubah sikap bupati baru terjadi dalam tahun penggantian bupati, 1848. Penggantian ini telah mengubah secara drastis sikap bupati di tahun-tahun se sudahnya.<sup>26</sup> Setelah 1848, terdapat gejala yang menjadi kebalikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pertama, membaliknya sikap bupati dari membelakangi gubernemen kini justru mendukung berbagai kegiatan sistem.<sup>27</sup> Dengan berbaliknya sikap bupati setelah pertengahan abad, cukup berpengaruh bagi para pamong yang berada di bawahnya. Seperti terlihat dalam *Dagboeken Controleur* tahun 1851, kontrolir Pekalongan melaporkan inspeksi-inspeksinya sangat dibantu oleh para patih, lurah maupun *wedono*, dan orang-orang ini telah siap rnengatur pengerahan *heerendienst*.<sup>28</sup>

Kedua, sebagai kelanjutan dampak pertama adalah, secara mendadak industri gula mendapat tenaga kerja berlimpah. Dari jumlah keseluruhan (pada ketiga pabrik) 5.444 buruh di tahun 1845, melonjak menjadi lebih dari 10.000 buruh, dengan perhitungan sebagai berikut: Wonopringo: 4.257 buruh, Sragie: 3.854 buruh, dan Kalimatie: 2.798 buruh.<sup>29</sup> Padahal, batas “ideal”

<sup>25</sup> Dalam Knight, 1982, *loc. cit.*, hal. 143.

<sup>26</sup> Lihat penjelasan dalam Bab III.

<sup>27</sup> Bupati tidak hanya meluluskan setiap instruksi gubernemen untuk menyediakan fasilitas-fasilitas tanah dan buruh saja, tetapi juga terlibat pekerjaan pengaturan teknis, seperti menunjukan bagaimana pem-bajak-an tanah seharusnya dilakukan, (laporan kontrolir Pekalongan tanggal 6 Mei 1858, lihat kutipan langsung dalam Knight, *Ibid.*, hal. 145).

<sup>28</sup> Catatan tanggal 9 dan 10 Januari, AKP 127/7.

<sup>29</sup> RA 120.

yang ditetapkan gubernemen, jumlah buruh untuk masing-masing pabrik adalah 2.440 orang yang terbagi untuk penanam tebu 1.600 orang, menebang 320 orang transportasi 280 orang, pencari kayu 40 orang dan kerja kuli dalam pabrik 200 orang.<sup>30</sup>

## Tanah

Tanah menjadi hal yang cukup penting dalam pembudidayaan tebu. Tanah yang subur dan berigasi akan menghasilkan produksi gula maksimal. Karena tingkat *rendemen* gula yang dikandung dalam batang-batang tebu sangat ditentukan oleh kondisi tanah tersebut. Hal ini bisa dilihat di negara-negara Amerika Latin, tebu-tebu umumnya ditanam pada tanah kering, sehingga kadar *rendemennya* rendah. Untuk tidak mengulang kesalahan yang menimpa perkebunan Jawa Barat yang membuka sawah-sawah baru, maka penanaman tebu sejak awal *cultuurstelsel* dilakukan di lahan sawah.

Menurut penelitian pihak pabrik, –yang setiap tahun memberikan laporan dalam bentuk *Kultuur Verslag* ataupun *Suiker Kultuur* kepada Residen, –di Karesidenan Pekalongan tidak ada tanah yang betul-betul cocok untuk pengembangan tebu. Berdasarkan uji-coba yang dilakukan para *fabriekant* akhirnya ditetapkan bahwa jenis tanah terbaik yang bisa digunakan adalah tanah sawah basah yang mengandung unsur tanah liat dan berpasir.<sup>31</sup> Berdasarkan kriteria tersebut maka tanah-tanah sawah terbaiklah yang akhirnya dipakai, sebab jenis tanah ini dianggap paling tepat.

Dalam kontrak-kontrak gula, tanah diambilkan dari sebagian (sepertiga)<sup>32</sup> lahan keluarga petani untuk ditanami tebu. Namun

<sup>30</sup> Bosch 1834. Unsur lain yang mendukung melimpahnya jumlah buruh industri gula adalah penghapusan industri nila, gubernemen telah membubarkan empat buah pabrik nilanya. Sedang penghancuran pabrik-pabrik nila milik bumiputra, terjadi segera setelah penggantian bupati lama yang dianggap tidak patuh.

<sup>31</sup> *Suiker Kultuur* tahun 1852, sub-bab “gronden,” (AC 1624).

<sup>32</sup> Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh gubernemen di awal penanaman tebu—kontrak-kontrak di pertengahan Agustus 1830—, tanah yang dipakai hanya seperlima. Namun perkembangan selanjutnya ternyata bahwa lahan-lahan sawah petani yang digunakan mencapai sepertiga. Bahkan dalam tahun 1857 *Inspecteur der Cultures* melaporkan di beberapa desa penggunaan tanah kaum tani yang disatukan dalam desa-desa tertentu mengambil “seluruh sawah basah yang ada milik desa tersebut.” (AC 1624)

hal ini seringkali sulit terlaksana, sebab pabrik-pabrik gula menginginkan satu kebun yang bersambungan satu dengan lainnya. Jadi, untuk memenuhi tuntutan ini setiap tahunnya desa-desa yang akan terkena rotasi (*glebagan*)<sup>33</sup> *cultuurdienst* tebu, menentukan lokasi tertentu lahan sawah yang disepakati untuk ditanami tebu.<sup>34</sup> Untuk tanah-tanah yang telah dikuasai oleh satu keluarga, maka hak atas tanahnya tidak hilang, melainkan dilakukan penunjukkan untuk mengolah tanah periodik sementara di lokasi lain.<sup>35</sup> Tanah-tanah ini disediakan secara cuma-cuma oleh desa dan tidak diberikan pengganti uang sewa.

### Kerja *Onderneming*

Selama tahun-tahun awal ditegakkannya sistem pembudidayaan tebu, peran gubernemen sangat dominan dalam memenuhi sebagian besar keperluan industri, seperti menyediakan tenaga kerja;<sup>36</sup> dan juga gubernemen membuat perdjandjian dengan para pengolah gula, dengan memberi jaminan pada pabrik-pabrik untuk penyediaan tebu.<sup>37</sup> Selain itu gubernemen juga memonopoli perdagangan gula ke Eropa (melalui NHM). Dengan lain kata,

<sup>33</sup> Istilah ini mengacu pada proses rotasi satu lokasi tanah tertentu. Dalam perotasian tanah ini diperlukan waktu antara tiga hingga empat tahun untuk kembali ke jenis tanaman yang sama. Kalau dua tahun pertama tanah ini digunakan bagi tanaman tebu, maka sisa waktu yang ada setelah panen tebu tanah tersebut dipakai untuk tanaman pengganti seperti palawija dan padi. Hal ini harus dilakukan di sawah-sawah tebu, sebab setelah 18 bulan sawah ditanami tebu, tanah tersebut menjadi tidak subur. Untuk mengembalikan kesuburannya diperlukan waktu sekitar dua tahun. Untuk itu tanaman pengganti akan membantu mengembalikan kesuburan tanah tersebut. Dalam kurun selanjutnya, ketika mulai digunakan sistem Reynoso, tahun 1863, masalah kejenuhan sawah diatasi dengan sistem irigasi intensif (Djojosoewardho, 1983, "Bagaimana caranya agar Anda dapat melaksanakan pembukaan tanah sistem Reynoso dengan benar," hal. 51-3). Tetapi tetap tidak mengubah pola rotasi tanah yang telah ditetapkan pada tahun-tahun sebelum diterapkannya sistem Reynoso.

<sup>34</sup> Yasuo, 1986, *loc.cit.*, hal. 65 dan AC 1624.

<sup>35</sup> Tanah-tanah tersebut ditentukan, kemudian diukur, dan dibuatkan *Proces Verbalnya* yang harus disetujui oleh wedana, mantri bendungan, mantri tebu, kontrolir dan *fabriekant* (untuk salah satu contoh lihat *Proces Verbal* yang dibuat di Batang, 25 April 1862, AKP 133/10).

<sup>36</sup> Lihat catatan kaki nomor 17 di atas.

<sup>37</sup> Adisewojo, 1971, *Bertjotjok Tanam Tebu*, hal. 8.

peranan para *fabriekant* (kontraktor) sangat sedikit, tidak lebih hanya sebagai pelaksana kerja mengepres tebu saja.

Kerja *onderneming* yang utama adalah proses panjang menanam dan memelihara tebu yang memerlukan waktu sekitar satu setengah tahun, dan kemudian memanennya. Inilah yang disebut *cultuurdienst*. Sedang kerja-kerja lainnya seperti akan dijabarkan di bawah, dilakukan berdasarkan kontrak kerja yang “sedikit” unsur paksaannya.

#### a. Menanam dan merawat tebu

Dalam mengolah setiap *bau* kebun, diperlukan empat orang yang dipekerjakan secara terpisah. Desa-desa biasanya diwajibkan oleh gubernemen untuk menyediakan orang-orangnya. Kerja perawatan tebu ini membutuhkan waktu sekitar 15 bulan, pembibitan 3 bulan, dan satu tahun untuk perawatan tebu dewasa. Pekerjaan yang dilakukan adalah menanam tebu, menyang rumput dan alang-alang, membuat pagar keliling (menghindari serangan babi hutan), mengikat rumpun-rumpun tebu (agar tidak patah) dan mengatur irigasinya.

Jenis tebu yang ditanam merupakan jenis terbaik, dengan kadar *rendemen* (kadar gula dalam tebu) tinggi yang hanya dihasilkan oleh tebu yang dikenal dengan sebutan *zwarte Cheribonriet* (Tebu Hitam dari Cirebon).<sup>38</sup>

#### b. Memanen tebu

Buruh-buruh yang melakukan kerja pemanenan oleh penduduk setempat disebut *rappoe*. Para *rappoe* biasanya dapat menyelesaikan seluruh kerja memanen sekitar 3 atau 4 bulan. Kemampuan kerja per hari mereka bisa menghasilkan antara 30 hingga 50 ikat<sup>39</sup> tebu (atau antara 750 hingga 1.250 batang tebu);<sup>40</sup> dan upah yang diterima para pemanen tergantung dari jumlah ikat tebu yang berhasil dikumpulkan setiap harinya.

Panen setiap tahun, untuk setiap *bau* tidak mencapai 25 *pikul*.

<sup>38</sup> AC 1624.

<sup>39</sup> 1 (satu) ikat berisi 25 batang tebu.

<sup>40</sup> Gubernemen memperhitungkan kerja memanen dari setiap *rappoe* setiap seharinya hanya sekitar 550 batang tebu.



Jumlah yang sering didapat dalam setiap panennya antara 17 hingga 22 pikul.

Tabel 6

Panen tebu 1850-1865.

Tahun	Wonopringo	Sragie	Kalimatie	Total
1850	11.204	9.462,44	8.724,24	29.390,68
1851	13.759,80	9.635,12	8.950	32.344,92
1852	8.892,50	7.212,50	6.120	22.225
1853	14.324,88	7.381,60	10.292,86	31.994,34
1854	21.518,16	10.282,16	9.550,13	41.350,57
1855*	24.441	9.161	12.591	46.193
1856	25.729,32	9.445,95	12.163	47.338,27
1857	29.933	12.850,11	11.000	53.783,11
1858	33.333,96	12.700	13.363	59.396,96
1860	31.994,26	11.867,78	14.250	58.476,46
1861	31.927,59	9.043,87	13.505	54.476,46
1862	27.792,92	11.540,97	15.500	54.834,89
1865	40.869,55	11.638,24	27.000	79.507,79

Sumber: *Jaarlijks Rapporten van de Residentie Pekalongan, 1834-1865.* (AC1624)

\*) Memorie 1860: 68

### Transportasi, Kerja Pabrik, dan Kerja Pengrajin

Selain jenis-jenis kerja di atas yang lebih merupakan pajak-kerja, —meskipun istilah ini tidak terlalu tepat karena adanya upah, — maka terdapat kerja pendukung yang menegaskan sosok industri dari *onderneming* gula ini. Kerja-kerja tersebut meliputi transportasi, kerja dalam pabrik, dan kerja pengrajin yang terkait dengan kegiatan pabrik.

Transportasi dibagi dua bagian, pertama pengangkutan tebu dari kebun ke penggilingan untuk dipres dan dimasak menjadi gula kristal; dan kedua, mengangkut gula kristal dari pabrik ke gudang-gudang gubernemen sebelum dikirim ke pasar Eropa.

Dalam penyediaan sarana pengangkutan ini, umumnya pihak pabrik hanya mempunyai gerobak saja, sedang hewan penariknya dikontrak atau disewa dari desa-desa. Setiap hari, selama musim panen dan giling, pabrik memerlukan 40 hewan penarik beserta tukang gerobak dengan jumlah yang sama. Pabrik tidak

membeda-bedakan jumlah upah bagi tukang gerobak antara yang membawa tebu ke penggilingan dengan yang membawa gula ke gudang-gudang tepi pantai.

Untuk kerja-kerja di dalam pabrik selain tenaga-tenaga kerja untuk urusan administratif yang selalu langsung dipegang oleh orang-orang Eropa, sebagai aristokrat perkebunan yang melakukan fungsi-fungsi pengawasan produksi maupun staf ahli;<sup>41</sup> digunakannya pula orang-orang Tionghoa, sebagai mandor-mandor dan juru masak.<sup>42</sup>

Hanya pekerja bangsa Eropa dan etnis Tionghoa saja yang bisa diangkat menjadi pegawai-pegawai tetap yang bergaji;<sup>43</sup> sedang untuk kerja kasar atau lebih sering disebut dengan kerja kuli biasanya dilakukan oleh penduduk bumiputra yang dikenal dengan sebutan *wong boeroeh* atau kuli. Upah untuk lapisan pekerja ini diberikan berdasarkan jumlah hari kerja yang dilakukan oleh buruh tersebut (*dagloner*).<sup>44</sup> Di sini suatu pelembagaan rasial yang mulai dibentuk oleh negara kolonial terwujud dalam diskriminasi upah.

Kebutuhan-kebutuhan pabrik lainnya yang juga penting, adalah tuntutannya atas penyerahan beberapa kebutuhan pendukung seperti kayu bakar, bahan-bahan bangunan, kranjang dan pot-pot

<sup>41</sup> Jabatan-jabatan yang dipegang oleh orang-orang Eropa ini meliputi: *Administrateur, Boekhouder, Hoofd dan Ass. Tuinopzichter, Machinist* (satu sampai tiga orang), *Fabricatiechef, Ass. Chemist, Tuinchemist, ChefTransport*, dan beberapa jabatan yang dibuat menurut keperluan setempat seperti di pabrik Wonopringo, karena memiliki peralatan pengepres paling canggih maka didapati jabatan *Electrotechniker*. Jumlah tenaga kerja Eropa (asing) tersebut tidak banyak, di Pabrik Kalimatie terdapat 29 orang, Pabrik Sragie 27 orang, dan di Wonopringo 36 orang. (*Adresboek*: 79, 196, 234)

<sup>42</sup> Mungkin karena pengalamannya pada masa yang lampau dalam mengelola penggilingan gula, maka oleh pabrik-pabrik orang-orang ini disertai tugas-tugas pemasakan gula, mengawasi mesin-mesin, dan juga menjadi mandor mengawasi buruh-buruh bumiputra.

<sup>43</sup> Yang dimaksud pegawai tetap dan bergaji adalah, bahwa ada atau tidak ada pekerjaan para pekerja ini mendapat upahnya secara teratur, diterimakan pada akhir atau awal bulan.

<sup>44</sup> Kerja-kerja kuli dan pemasakan yang dilakukan buruh-buruh ini biasanya antara bulan Mei sampai Oktober (bersamaan waktunya dengan memanen tebu), tetapi sering juga terjadi variasi lain seperti di pabrik Wonopringo untuk tahun 1845 kerja-kerja ini dilakukan bulan Juni sampai Desember. (AC 532)

gula. Kebutuhan-kebutuhan tersebut ada yang hanya dikumpulkan lalu diserahkan saja kepada pabrik tanpa menuntut kerja tambahan seperti untuk kayu bakar dan kapur. Sedang kebutuhan atas kranjang dan pot-pot gula, harus melalui proses pembuatan sebelum diserahkan kepada pabrik. Untuk keperluan terakhir inilah diperlukan kerja pengrajin, yang di satu sisi merupakan usaha memenuhi kebutuhan pabrik atas bumbung, kranjang, pot-pot gula dan sebagainya. Tetapi, di lain sisi usaha ini menjadi sarana terciptanya lahan pekerjaan baru dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar atas barang-barang tertentu. Sehingga tanpa harus diwajibkan sekelompok orang melakukan kerja pengrajin rumahan untuk memasok pabrik-pabrik gula.<sup>45</sup>

### Persetujuan-Bebas Pabrik Dengan Petani

Secara setahap demi setahap kerja-kerja yang dipaksakan oleh gubernemen melalui para elit bumiputra kepada kaum tani setempat mulai kehilangan tenaganya. Hal ini terjadi karena dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian kelas burjuasi Belanda, sehingga mereka bisa melakukan tekanan-tekanan kepada gubernemen untuk memberikan konsesi-konsesi lebih luas bagi pertumbuhan lebih maju golongan swasta dalam melakukan investasi.<sup>46</sup> Konsesi awal dari gubernemen adalah pemberian kebebasan kepada pabrik untuk melakukan persetujuan-bebas (*vrije beschikking*) penanaman tebu dengan petani. H. van Blommestein, dengan pabrik Kalimatie-nya, adalah pihak yang pertama kali—di Pekalongan—melakukan persetujuan-bebas ini pada sekitar tahun 1844, yang kemudian diikuti oleh dua pabrik lainnya di tahun 1850.<sup>47</sup> Maksud dari persetujuan-bebas tentunya demi mendapatkan gula lebih banyak. Blommestein memulainya di

<sup>45</sup> Laporan *Commissie Umbgrove*, AC 1854.

<sup>46</sup> Serangan-serangan dari orang-orang non-pemerintah mulai mengencar akibat terjadinya kelaparan dan kemiskinan yang terjadi menjelang akhir 1840-an di Grobogan dan Demak. Gejala kelaparan ini diangkat kepermukaan dan dijadikan issue bahwa pemerintah telah melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap bumiputra Jawa. Muncullah orang-orang humanis maupun praktisi Liberal menyusun serangan-serangan strategisnya. Di bidang sastra muncul Multatuli atau Douwes Dekker, dilapangan jurnalistik muncul E.S.W. Roorda van Eisinga, dan di bidang politik dipimpin oleh Baron van Hoevell, yang pandangannya telah dikutip dalam bab II di atas. (Toer, 1962, *Panggil Aku Kartini Sadja*, jilid I, hal. 16-8)

pertengahan 1840-an, selain ia menggiling tebu-tebu milik gubernemen yang luas lahannya 400 *bau* tersebut, dia juga melakukan persetujuan-bebas menanam tebu sendiri seluas sekitar 100 *bau*. Bagi kaum *fabriekant* tindakan ini bisa menambah laba usaha penggilingan, karena dengan ini mereka tidak hanya menjual sepertiga hak gula yang didapatkan dari menggiling tebu milik gubernemen (dari mana mereka mendapatkan laba), tetapi, jumlah keuntungan *fabriekant* bisa lebih banyak dengan mengusahakan penanaman tebu sendiri, tanpa membaginya kepada gubernemen. Meskipun pada awalnya tindakan ini dilakukan secara “gerilya”, – gubernemen pun tidak berhak melarangnya, karena paling tidak para *fabriekant* masih menepati janji-janji mengerjakan tebu-tebu gubernemen, –namun pada akhirnya menjelang pertengahan abad gubernemen secara sadar mulai melepaskan pabrik untuk melakukan penanaman bebas. Sejak diperkenalkannya penanaman tebu “bebas” maka lahan sawah yang dipakai untuk tebu-tebu “bebas” ini sekitar 2 persen dari seluruh sawah yang ada.<sup>48</sup>

Konsesi lainnya adalah gubernemen melepaskan diri dari mendapatkan tenaga kerja dan kebutuhan sekunder pabrik, yang akan dijelaskan di bawah.

Konsesi-konsesi ini sangat mungkin disebabkan oleh debat-bebat politik di Negeri Belanda dalam *Tweede Kamer*. Debat-debat ini menunjukkan bahwa *cultuurstelsel* dalam posisi digerogeti sedikit demi sedikit oleh kekuatan kaum Liberal, yang memaksa gubernemen memberikan keleluasaan-keleluasaan di atas. Bagi kaum Liberal, kalangan swasta harus diberi ruang-gerak lebih luas yang dapat menjadi jembatan transisi menuju eksploitasi daerah koloni secara “bebas”.

## Petani dan Persetujuan Kerja

Dari kerja-kerja yang telah dijelaskan di atas, masalah yang belum terungkap adalah, sejauh mana petani bersedia melakukan kerja dalam *ondernemng*. Apakah seluruh lapisan masyarakat petani di

<sup>47</sup> Bagi petani tentunya tidak ada perbedaan antara bentuk sebelum dan sesudah diberlakukannya persetujuan bebas, disebabkan kerja maupun upah yang didapat tidak bertambah ataupun berkurang. Sejauh ini tingkat upah masih ditentukan oleh gubernemen (AC 1624).

<sup>48</sup> AC 408; dan juga laporan *Commissie Umbgrove*, AC 1584.

pedesaan bersedia melakukan seluruh kerja yang ditawarkan oleh industri gula? Dari sedikit uraian tentang masyarakat pedesaan dalam membagi tanah dan kerja (Bab III) telah diperlihatkan bagaimana desa menyiapkan tenaga kerja bagi *onderneming*, yang pada bagian akhir tulisan, satu kutipan menyatakan lapisan mana dari diferensiasi petani yang ada yang akan melakukan kerja *onderneming*. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, adakah yang diuntungkan dari diferensiasi petani dengan munculnya industri gula di lingkungan mereka? Penjelasan berikut ini berkaitan dengan perbedaan petani yang ada di pedesaan dalam melakukan pilihan atau pekerjaan *onderneming*.

#### a. Transportasi

Pada umumnya, seluruh jenis kerja yang dituntut oleh *onderneming* berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun dari posisi ekonomi lapisan tertentu dalam masyarakat pedesaan memungkinkan orang-orang tertentu menghindari dari menyumbangkan tenaga di *onderneming*. Hal ini bisa dijumpai pada lapisan petani kaya atau *sikep*, lapisan inilah yang sering ditemui membeli tenaga kerja dari petani gurem (*wong boeroeh, koelie, menumpang, bujang*) untuk menggantikan kerja di industri. Meskipun demikian tidak selalu setiap tawaran mendukung kelangsungan industri ditolak oleh *sikep*. Di sini posisi ekonomi petani kaya sangat memungkinkan menyediakan kebutuhan yang dituntut oleh pabrik, yaitu dalam pengadaan hewan penarik (sapi, kerbau atau kuda).

Sebagaimana diketahui, bahwa pabrik gula sangat memerlukan transportasi, hal ini menjadi faktor yang cukup penting karena jumlah *rendemen* maupun kualitas gula kristal sangat ditentukan oleh waktu yang diperlukan antara proses pengambilan hingga pengepresannya.

Tuntutan pabrik kepada petani adalah penyediaan dan pemeliharaan hewan-hewan penarik gerobak. Petani yang sanggup menyediakan kebutuhan tersebut hanya dari lapisan petani kaya. Mengapa hanya petani-kaya saja yang dapat menyediakan keperluan tersebut? Sebab pada waktu itu harga seekor kerbau atau sapi sekitar 30 sampai 40 *gulden*, sedang harga seekor kuda 160 *gulden*.<sup>49</sup> Tentu saja hal ini di luar kemampuan ekonomi petani

gurem.

Dari penyiapan hewan-hewan penarik tersebut, kaum tani kaya bisa berkawan dengan pihak pabrik pada musim panen. Pabrik biasanya memberi persekot besar ke pada setiap *sikep* untuk peminjaman beberapa ekor kerbau ataupun sapi di awal panen,<sup>50</sup> dan dilunasi di akhir panen.

#### b. “Kerja bebas”

Rapan tepat munculnya kerja bebas di Pekalongan dalam kurun *cultuurstelsel*, agak sulit untuk ditelusuri.<sup>51</sup> Tapi laporan-laporan di awal 1850-an menginformasikan, bahwa pertama-tama bentuk pengerahan kerja dari desa-desa untuk memasuki orbit *onderneming*, telah meng alami pergeseran, yaitu *heerendienst* maupun *cultuurdienst* tidak berlaku mutlak terhadap kaum penguasa tanah (*sikep* atau *gogol*) saja, melainkan ditawarkan kepada siapa raja yang bersedia untuk bekerja di *onderneming*. Mereka yang bersedia bekerja bagi gubernemen tersebut, disebut kaum *vrijwilliger* (pekerja sukarela).<sup>52</sup> Hubungannya tidak lagi antara gubernemen dengan kaum tani yang diresmikan dalam *kontrak*, melainkan pihak pabrik bisa berhubungan langsung, dan membuat persetujuan-persetujuan kerja tanpa campur-tangan gubernemen.

Ada empat alasan pokok yang bisa diajukan bagi terbentuk dan terserapnya “kerja bebas” yaitu: *pertama*, akarnya telah ada dalam pelapisan sosial dalam desa yang menunjukkan jurang kelas yang diidentifikasi berdasarkan penguasaan tanah. Karena persoalan distribusi tanah, seperti yang dijanjikan gubernemen, tidak terlaksana dengan baik, maka sekelompok orang berusaha melepaskan pengaruh ikatan-ikatan “adat” yang mengungkungnya dan menemukan wadah barunya sebagai buruh “bebas” dalam

<sup>49</sup> *Statistiek van de Residentie Pekalongan 1920*: h. 130, AKP 82/1 B.

<sup>50</sup> *Commissie Umbgrove* mencatat bahwa pabrik telah mengeluarkan uang sekitar 600 *gulden*, dan ini tentunya lebih murah dibandingkan jika pabrik menyediakan hewan sendiri. (AC 1584, bandingkan dengan Bosch 1834)

<sup>51</sup> Allen dan Donnithorne, misalnya, mengatakan bahwa selama paruh pertama abad ke-19 sebagian besar kerja yang diserap oleh *onderneming-onderneming* pemerintah adalah tidak bebas (‘unfree’ workers) (1957, *op. cit.*, hai. 70).

<sup>52</sup> Dapat dilakukan oleh seluruh lapisan sosial yang berada dalam desa-desa, kecuali lapisan *desa bestuur* (untuk pelapisan sosial di pedesaan lihat kembali bab III).

*onderneming*.<sup>53</sup> Sebab, semakin kaum tani gurem mempererat ikatan-ikatan sosial lama maka beban kerja hampir selalu jatuh kepundaknya, sebaliknya jika mereka melepas ikatan “adat” mereka dapat bebas memilih dan melakukan pekerjaan yang disukai.

*Kedua*, upah-upah yang ditawarkan *onderneming* bisa menutup biaya kebutuhan hidup/pokok sehari-hari.<sup>54</sup>

*Ketiga*, adanya *suiker-campagne* yang dilakukan pabrik selama musim giling, yang lebih memberikan motivasi kuat bagi para penjual tenaga (buruh), bahwa kerjanya memang dibutuhkan.

Dan *terakhir*, adalah tersedianya buruh yang berlebihan jumlahnya, seperti diungkapkan oleh Commisie Umbgrove: ‘... genoegzame opkomst van vrij welligers overbodig.’<sup>55</sup> (munculnya *vrijwelliger* lebih dari yang diperlukan) Empat hal inilah yang agaknya menjadi kekuatan pendorong pada kaum tani untuk -tanpa tekanan dari para kepalanya - secara sadar memasuki lingkungan pabrik. Muncullah kelompok-kelompok buruh yang bergerak bebas menawarkan tenaga. Mereka hampir selalu berpindah-pindah tempat, sebagai orang bebas. Sebutan untuk mereka ini adalah *wong boeroeh* atau *koeli*,<sup>56</sup> orang Belanda menyebutnya *vrije arbeider*. Di akhir 1850-an, pabrik Sragie telah seratus persen menggunakan buruh-buruh bebas ini.<sup>57</sup>

Meskipun demikian Residen Pekalongan tanpa alasan yang jelas

<sup>53</sup> *Commisie* Umbgrove dalam laporannya cukup jelas ketika mengatakan bahwa *koeli* dan *wong boeroeh* umumnya berasal dari luar desa. Hal ini tentunya untuk menunjukkan bahwa ada buruh yang disediakan oleh desa secara ‘adat’ yang disebut *menumpang* dan *bujang* (lihat penjelasan dalam bab III).

<sup>54</sup> Sejak awal 1850, kondisi upah dalam industri gula mulai membaik. Lihat *kultuur Verslag* tahun 1853, AKP 1624. Dibahas dalam bab V.

<sup>55</sup> Laporan *Commisie* Umbgrove, AC 1854. Misalnya untuk kerja menanam dan merawat kebun tebu, persetujuan yang dilakukan antara 1830 hingga akhir 1840-an, untuk mengolah satu *bau* lahan tebu hanya dilakukan oleh empat orang. Tetapi sejak awal 1850 masing-masing pabrik dapat merekrut tenaga perawat tebu antara enam hingga delapan orang untuk setiap *bau*. (AC 1624)

<sup>56</sup> Tidak terikat oleh ikatan-ikatan desa.

<sup>57</sup> Khusus untuk kerja dalam pabrik. Tetapi untuk kerja-kerja dalam kebun-kebun masih dilakukan oleh para *vrijwelliger*. (*Politiek Verslag* tahun 1859, AKP 69/5; dan AC 1624)

melontarkan sikap munafik dalam menyongsong gejala baru ini, seperti dinyatakan dalam tahun 1859: “*het geen een verblijdend verschijnsel in deze residentie.*”<sup>58</sup> (tidak ada sesuatu gejala yang menyenangkan di karesidenan ini)

Namun, bagaimanapun juga para *fabriekant* lebih menyukai perkembangan baru ini, karena mereka terkurangi kerepotannya untuk mendapatkan buruh seperti terjadi dalam tahun-tahun yang lampau:

At one step ... had introduced ‘free labor’, since the local administration no longer played a part in providing forced labourers for the factories; instead, they were obtain quite legally by means of agreements between manufacturers and village chiefs ..., and the manufacturers to enjoy what they sought: a ready and dependable supply of cheap labour.<sup>59</sup>

(Satu langkah ... diperkenalkannya ‘kerja bebas’, sejak administrasi/pemerintahan lokal tidak lagi memainkan bagian dalam menyiapkan buruh-buruh paksa bagi pabrik-pabrik; sebagai gantinya, mereka memperoleh secara legal dengan memakai persetujuan antara para pemilik pabrik dan para kepala desa ..., dan para pemilik pabrik menikmati apa yang mereka minta: suatu pasokan buruh murah yang siap dan [dapat] diandalkan.)

Perkembangan selanjutnya dari “kerja-bebas” ini semakin tidak terbendung, sehingga dalam tahun 1860 gubernemen menetapkan bahwa untuk kerja dalam pabrik harus dilakukan oleh kaum pekerja bebas. Meskipun demikian pemerintah masih membuka diri untuk memberi bantuan bagi pabrik-pabrik yang mengalami kesulitan dalam merekrut tenaga kerja secara bebas ini.<sup>60</sup> Kemudian dalam tahun 1864 gubernemen mempertegas sikap dengan menarik diri dari membantu pabrik dalam mendapatkan kebutuhan-kebutuhan sekunder, seperti untuk memperoleh kayu bakar, kapur, hewan penarik gerobak dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

<sup>58</sup> *Politiek Verslag*, AKP 69/5.

<sup>59</sup> Elson, 1984, *op. cit.*, hal. 116-7.

<sup>60</sup> Burger, 1962, *op. cit.*, hal. 219.

<sup>61</sup> Register *Gouvernements Secretaris*, Van Deinde, 31 Oktober 1864, untuk Karesidenan Pekalongan dan Cirebon, AC 499.



Bagi kaum tani sendiri agak sukar membedakan antara kerja wajib dengan “kerja bebas”, dikarenakan pertama kerja-kerja tersebut terkamuflase oleh jumlah yang sama atas upah-upah tunai yang diterima. Bahwa dalam kontrak-kontrak tersebut, secara teoritis dilakukan dengan sukarela, yakni buruh menawarkan tenaganya kepada para *fabriekant*, dan untuk itu buruh menerima upah tetap. Sedang pada saat yang sama sebagian dari buruh lainnya masih digerakkan oleh pengerahan kerja wajib. Namun secara esensial terdapat perbedaan antara, bentuk kerja yang dilakukan atas dasar kerja wajib yang disediakan oleh para lurah, dengan kerja yang dilakukan secara sadar untuk menutup kebutuhan hidup,<sup>62</sup> misalnya dengan terjadi kegagalan panen-panen padi, yang merupakan bencana di desa-desa menjadi motivasi kuat larinya petani untuk menjadi buruh *onderneming*:

in Pekalongan a decade earlier [1857], it was remarked by another of the factory owners that “the people go about the work early ... to which fact the failure of the rice-harvest has maybe contributed.” By 1870, at the same Pecalongan factory, worker were being turned away daily from the factory gates, so abundantly were they pouring out of the villages during the dry season. It was, as the management so aptly remarked, “a gratifying spectacle” to see them all crouding

<sup>62</sup> Elson, 1984, *op. cit.*, hal. 120. Lebih lanjut dalam penelitiannya atas pabrik-pabrik di Karesidenan Pasuruan, Elson menemukan “kerja bebas” pada para penarik gerobak, di pabrik-pabrik swasta yang kecil kapasitas produksinya. Biasanya untuk ini *fabriekant* menawarkan uang muka tunai, untuk dilunasi dengan serangkaian kerja sepanjang musim panen. Uang muka ini tidak hanya dipakai untuk merangsang petani pada pekerjaan pengangkutan tapi juga melengkapi mereka dengan uang yang diperlukannya untuk membeli hewan dan gerobak-gerobak. Persiapan-persiapan ini membuka akses pada jumlah modal yang besarnya tidak lazim bagi tukang-tukang gerobak. Di lain sisi meringankan *fabriekant* dari penyediaan dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas pengangkutan sendiri. Meskipun demikian, tukang-tukang gerobak sering menginvestasikan uangnya secara “irasional”, dengan menghabiskannya dalam perlombaan-perlombaan yang “gagah-gagahan”. Maka para penarik gerobak harus bekerja tanpa bayaran selama bagian akhir musim panen itu. Banyak diantara tukang gerobak yang memilih mengingkari kontrak-kontraknya dan melarikan diri begitu saja. Untuk menanggulangi masalah ini, akhirnya gubernemen mencoba mempromosikan rasa tanggung jawab pada buruh-buruh pengangkutan, dengan memberi persekot tunai yang kecil, sedang pada penutup musim panen, masih tersedia uang tunai dalam jumlah yang berarti. (*Ibid.*, hal. 110-3) Selain itu gejala “kerja-bebas” dapat pula ditemui dalam karesidenan-karesidenan Probolinggo, Surabaya, Kediri, Cirebon dan Kendal (Burger, 1939, *De Onsluiting van Java's Binneland voor het Wereldverkeer*, hal. 142-4).

outside the factory at the change of shift, each man trying to make sure that he would be taken on. In short, a class of free labourers, dependent for a substantial part of their livelihood on wages earned in the sugar industry, was in the process of formation in the countryside of the pesisir by 1870.<sup>63</sup>

(di Pekalongan sepuluh tahun lebih awal [1857], dikatakan oleh pemilik pabrik lainnya bahwa “penduduk ingin sekali pindah pekerjaan... yang mungkin karena bertambahnya kegagalan panen beras”. Pada tahun 1870-an, di pabrik Pekalongan yang sama, para pekerja setiap hari tertahan sejak di pintu-pintu pabrik, amat banyak jumlahnya yang mengalir dari desa-desa selama musim kering. Seperti kata-kata direksinya yang amat tepat, “tontonan yang mengasyikkan” melihat mereka semua berkerumun di luar pabrik pada saat perubahan regu, setiap orang mencoba meyakinkan bahwa ialah yang harus diterima. Singkatnya, sebuah kelas buruh bebas, yang sebagian besar mata pencahariannya bergantung pada hasil upah industri gula, sedang dalam proses formasinya di pedesaan pesisir sampai tahun 1870.)

*Kedua*, bahwa pada saat yang bersamaan, baik di kebun-kebun maupun di pabrik-pabrik, para pamong desa yang terlibat sebagai pengatur kerja atas buruh-buruh, tidak memberikan pengecualian terhadap buruh-buruh yang berbeda tersebut. Hal ini menjadi kamufase produk gubernemen yang terbaik yang pernah ada, yakni seolah-olah setiap kerja menjadi diwajibkan. Jadi, sejak pertengahan abad 19 hingga berakhirnya *cultuurstelsel* ke dua bentuk penyerapan tenaga kerja ini berjalan berdampingan.

<sup>63</sup> Knight, 1982, *loc. cit.*, hal. 140-1.

# Bab V: *Planter* Menggugat Upah

## Pengantar

Sebelum tahun 1800 kerja dilakukan semata-mata untuk hasil yang dikonsumsi sendiri oleh masyarakat petani Jawa. Kerja-kerja yang umumnya dilakukan dalam jalinan ikatan-ikatan perhambaan untuk kepentingan komunitasnya sendiri. Jika ada kelebihan maka kelebihan tersebut diserap sebagai upeti oleh lapisan elit setempat. Kerja tak berupah muncul pada masyarakat ini dalam bentuk *pertama* kerja wajib untuk lapisan elit setempat yang dikenal dengan sebutan *pancen* (*pantjendienst*) atau *kriegandienst*; *kedua* kerja karena terlibat hutang yang mesti dilunasi dengan kerja mengabdikan pada si pemberi hutang, dan *ketiga* adalah bentuk perbudakan, yang banyak diserap oleh VOC dengan menggunakan institusi-institusi yang ada dalam pengerahan dan penyerahan tenaga kerja oleh para kepala “feodal”.<sup>1</sup> Kerja-kerja tersebut dilakukan tanpa adanya lalu lintas uang sebagai upah.<sup>2</sup>

Upah mulai dikenal awal abad ke-19, ketika Raffles memperkenalkan uang sebagai alat tukar kepada masyarakat bumiputra. Apa yang dilakukan Raffles dengan memasyarakatkan uang pada petani Jawa adalah dalam rangka menjaring masyarakat Jawa untuk memasuki lingkungan pasar. Sebagaimana diketahui akibat Revolusi Industri di Inggris, maka terjadi ekspansi pemasaran tekstil yang intensif ke seluruh dunia. Uang menjadi diperlukan

<sup>1</sup> Suroto, 1985, “Gerakan Buruh dan Permasalahannya,” hal. 26.

<sup>2</sup> Namun terdapat pula pengecualiannya di *ommelanden* Batavia, dalam pengoperasian pengilinan-pengilinan gula, para pengolah memberikan upah-upah tunai. Meskipun jenis uang yang digunakan hanya berlaku untuk ditukarkan pada warung-warung Tionghoa setempat yang menyediakan kebutuhan pokok (beras) dan candu. (Knight, 1980, *loc. cit.*, hal. 187) Akan tetapi gejala ini tidak berlaku umum, sebab sebagian besar populasi bumiputra belum melihat kegunaan atau fungsi praktis dari uang. Di beberapa tempat, selama kurun VOC, bahkan ditemui uang dipakai sebagai perhiasan semata. (Zwijndregt dan Schoonenberg, 1954, *Peladjaran Ekonomi*, hal. 16)

sebagai alat tukar. Karena itu seluruh pelosok yang diekspansi oleh perdagangan Inggris ini harus disiapkan untuk menerima barang-barang produknya, sebagai negeri yang pertama kali melakukan revolusi dalam produksi ini.

Meskipun politik dagang Inggris menjadi tidak efektif setelah Inggris meninggalkan Jawa dalam tahun 1816, namun persebaran uang berlanjut semakin luas. Seperti, dalam tahun 1820-an hampir setiap pekerjaan dapat mendatangkan uang, misalnya di Pekalongan, umumnya pekerjaan tukang pacul bertarif 10 *duit*, tukang bajak sawah 12 *duit* sehari. Sedang pekerjaan dalam penggilingan tebu menjanjikan antara 12 hingga 14 *gulden* per bulan bagi seorang penebang tebu, dan 5 *gulden* bagi juru masak tebu (untuk tiap pemasakan 240 *pikul* gula).<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan betapa cepatnya populasi bumiputra akrab dengan uang yang kemudian tidak terlepas dengan sistem upah yang mengejala di setiap pekerjaan yang dilakukan.

Persoalan yang akan dibahas dalam sub-sub bab berikut berkaitan dengan sistem upah yang diberlakukan selama kurun *cultuurstelsel*. Sub bab pertama merupakan penegasan bahwa sepanjang kurun ini upah memang diberikan, terutama dalam *onderneming* gula. Hal ini perlu di bicarakan karena adanya keraguan dari segelintir peneliti tentang pengoperasian upah. Pada dasarnya para peneliti tersebut beranggapan, kerja-kerja yang dilakukan adalah gratis, merupakan pajak kerja atas tanah yang dibagikan oleh gubernemen. Sub-bab kedua akan mengangkat peristiwa protes dari para penanam tebu (*planter*) terhadap upah yang terlampau kecil, dan juga melihat bagaimana gubernemen menganalisa dan menyelesaikan masalah tersebut. Sedang sub-bab terakhir membicarakan analisa penulis terhadap peristiwa tersebut. Dalam sub-bab ini akan diuraikan pengukuran besarnya tingkat upah dibandingkan dengan harga kebutuhan hidup sehari-hari.

### Upah Kurun *Cultuurstelsel*

Ada keraguan dari segelintir peneliti Jawa abad ke-19, khususnya tentang keberadaan upah yang diterapkan dalam *onderneming* pada umumnya. Keraguan ini be rangkat dari dugaan:

<sup>3</sup> AKP 82/1 B: hal. 165.

Pemerintah kolonial menentukan, bahwa pajak tanah harus dibayarkan dengan kerja bakti di perkebunan-perkebunan. Itu berarti, bahwa para petani tidak akan menerima upah untuk pekerjaan di perkebunan, karena kerja bakti yang dilakukan sebagai ganti pajak-tanah. Dengan sendirinya pajak-tanah tidak perlu dibayar lagi oleh petani yang memiliki tanah.<sup>4</sup>

Landasan pijak pernyataan ini secara teoritis benar, karena asumsinya perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh *cultuurstelsel* adalah kerja rodi di bawah pengayoman lembaga-lembaga *heerendienst* maupun *cultuurdienst*. Namun pada saat pendapat ini dihadapkan dengan data primer, maka dugaan tersebut segera hapus dengan sendirinya, sebagai dapat dilihat dalam industri gula. Sebabnya, dalam regulasi-regulasi di awal *cultuurstelsel*, seperti *Resolutie der Hooge Regering* 5 Desember 1832 no. 1, yang menjadi landasan tulisan Van den Bosch,<sup>5</sup> terdapat penjelasan mengenai upah-upah yang dibayarkan kepada buruh *onderneming* gula. Seperti untuk *cultuurdienst*, upah-tanam (*plantloon*) diberikan dengan syarat, jika:

Ingeval het suikerriet *in massa* meer mogt opleveren dan 14 pikols per bouw, zal 1/3 dar van komen ten voordeele van gouvernement, 1/3 ten voordeele der chinesche mandours, en 1/3 ten voordeele van den planter.<sup>6</sup>

(Jika jumlah tebu gula dapat diserahkan 14 pikul per bau, 1/3 diberikan pada gubernemen, 1/3 diberikan pada mandor-mandor Cina, dan 1/3 diberikan pada penanam/buruh.)

Tentu timbul pertanyaan, mengapa upah tersebut harus dibayarkan hanya jika jumlah produksi tebu melebihi 14 *pikul* untuk tiap-tiap *bau*? Untuk menjawabnya perlu diajukan perhitungan-perhitungan yang dipakai gubernemen. Dalam pasal-pasal *suiker-contract* yang diajukan pada kaum tani, biasanya dinyatakan bahwa tanah yang diberikan pada petani mempunyai nilai uang sebesar 20 hingga

<sup>4</sup> Onghokham, 1977, "Pulung Affair: Pemberontakan Pajak di Desa Patik beberapa Aspek Politik Desa di Madiun Pada Abad ke-19," hal. 11. Hal serupa dinyatakan pula oleh Wertheim, 1959, dalam bukunya *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*, yang mengatakan: "The work had to be performed without pay." (hal. 469).

<sup>5</sup> Bosch 1834.

<sup>6</sup> *Ibid.*, bijlage B.

30 rupiah (*gulden*). Selain itu petani yang bersedia bekerja pada gubernemen juga dibebaskan dari beban membayar uang kuli *gladag* satu *gulden*. Kemudian, Bosch menambah dengan besarnya pajak-tanah pada tanah yang dibagikan tersebut sebesar 7,50 *gulden*. Jumlah keseluruhan uang tersebut diperhitungkan sebagai *hutang* yang harus dilunasi dengan serangkaian kerja menanam dan memelihara tebu yang untuk tiap *bau* kebun diperhitungkan menghasilkan sebanyak 14 *pikul*. Hal ini menjadi inti perhitungan pajak-kerja *cultuurstelsel*. Melalui logika-logika yang diperhitungkan dengan angka-angka fiktif tersebut, gubernemen bisa menyerap kerja gratis atau kerja dengan upah sangat murah dari petani.

Untuk mengganggampangkan mekanisme kerja di atas maka organisasi pengerahan kerjanya dilakukan dengan menetapkan kerja wajib bagi desa. Namun dengan sistem pengerahan kerja secara sedesa-sedesa timbul masalah, yaitu beban kerja berbeda-beda bagi masing-masing desa, sebagai dibicarakan oleh Burger:

Desa-desa yang dikenakan pajak tanah yang tinggi kadang-kadang melakukan pekerjaan yang lebih sedikit daripada desa-desa yang dikenakan pajak lebih rendah.<sup>7</sup>

Sehingga menjadikan regulasi yang dibuat Van den Bosch di atas sedikit dimodifikasi, yaitu dengan keputusan pemerintah kolonial yang intinya mengatakan:

... pembebanan itu hampir dimana-mana diganti dengan pembayaran upah tanam setjara perseorangan kepada orang-orang yang berkewajiban menanam, sehingga memungkinkan pembayaran menurut prestasinya...<sup>8</sup>

Selain *cultuurdienst*, kerja-kerja seperti penarik gerobak, pengumpul bambu, batu-bata, kapur dan kayu, dan kuli atau buruh dalam pabrik, ditetapkan upah *tanpa* beban kerja rodi atau gratis.<sup>9</sup> Kerja diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja, yaitu kemampuan setiap buruh dalam melakukan kerja menentukan besaran upah yang

<sup>7</sup> Burger, 1962, *op. cit.*, hal. 188.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Hingga tahun 1836 hanya pabrik gula saja yang mempunyai ordonansi perupahan tertulis. ("Fabriekenordonnantie", *ENI* 1917, hal. 697)

dibayarkan.

### *Planter* Menggugat Upah<sup>10</sup>

Dalam bulan Mei 1842 pada saat terjadi rotasi penanaman lahan tebu di kabupaten Batang, pada desa-desa Kaliepoetjang Koelon, Karangjar dan Wates Ageng. Lahan-lahan tebu tersebut akan diperluas penanamannya dan membutuhkan penyerahan tanah-tanah baru. Residen meminta tanah-tanah yang kondisinya lebih baik untuk dipakai menanam tebu dalam jangka dua tahun. Instruksi gubernemen ini disampaikan langsung oleh bupati Batang kepada para kepala desa.

Namun pada 22 Oktober, kontrolir Batang melaporkan, sejumlah 46 desa yang penduduknya melakukan *cultuurdienst* tebu untuk masa tanam tahun yang lalu belum dilunasi upahnya untuk kerja musim panen tahun ini. Sebabnya, mereka dianggap belum cukup memenuhi pajak *natura* tebu yang harus diserahkan, yang ada dalam kontrek-kerja tahun 1841 dengan upah sebesar 14,22 *gulden* per kepala.

Kedadaan menggantung, *planter* yang terlibat kerja *onderneming* tersebut tidak mau melunasi pajak *natura* yang dibebankan melainkan justru melakukan tuntutan untuk kenaikan upah dari 14,22 *gulden* menjadi 25 *gulden*.

Isyu untuk menuntut kenaikan upah dengan sangat cepat menyebar ke desa-desa lain. Sehingga pada 24 Oktober terdapat 600 *planter* dari 51 desa<sup>11</sup> bergabung langsung menghadap ke rumah residen menuntut kenaikan upah.

Terdapat tiga hal yang digugat *planter*, seperti dilaporkan Jaksa Besar, Prawiro Widjojio, pertama, *planter* menolak bagian tanah yang harus dikerjakan untuk ditanami tebu karena kondisi tanah tersebut buruk; kedua, menuntut kenaikan upah dari f 14,22 menjadi f25; ketiga, *planter* menolak menanam paparan tebu

<sup>10</sup> Penjelasan berikut ini semata-mata didasarkan pada *Besluit* 2 Februarij 1843. Namun karena dalam menyusun *besluit* dilakukan diskusi-diskusi yang terdiri dari *missive* antar lembaga, maka guna menyingkat penulisan sumber primer, untuk seterusnya peristiwa di bawah tidak mencantumkan *besluit* sumber.

<sup>11</sup> Dalam tahun tersebut di kabupaten Batang terdapat 88 desa yang dilibatkan *cultuurdienst* tebu.

karena pekerjaan untuk mengolah tanaman milik petani sendiri belum selesai, para *planter* bersedia menanam tebu kalau pekerjaannya telah selesai.<sup>12</sup> Sebelum tuntutan dipenuhi oleh gubernemen, *planter* akan tetap menolak untuk bekerja, atau “mogok” (*aanstaken*).

## Analisa Gubernemen dan tegaknya *Rust en Orde*

Dalam konteks tuntutan di atas, gubernemen menyangkal tuntutan pertama para *planter*. Menurut penyelidikan yang segera dilakukan, terbukti bahwa laporan tersebut hanya mengada-ada raja, sekedar alasan untuk melakukan tuntutan pada gubernemen.<sup>13</sup> Bagi gubernemen persoalan utama di sini adalah tuntutan *planter* untuk kenaikan upah saja.

Berangkat dari sini gubernemen mencoba melacak siapa biang dari “mogok” ini. Dalam pengusutan kemudian didapati empat orang penghasut yakni: Mangoondrio (kepala desa Kaliepoetjangkoelon), Sarie (penduduk desa Kaliepoetjangkoelon), Pakkembang (penduduk desa Baroslor) dan Tjawilah (penduduk desa Karanganyar). Alasan untuk menangkap ke empat orang ini adalah, bahwa tiga orang yang pertama senantiasa menolak bekerjasama dengan gubernemen, sedang yang keempat (Tjawilah) adalah orang yang sangat ditakuti penduduk sekitarnya, apa yang dikatakannya akan selalu dituruti oleh para petani lainnya.<sup>14</sup>

Tuduhan gubernemen terhadap ke empat orang tersebut sebetulnya secara riil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari *proces verbal* yang kemudian dibuat tidak nampak keterlibatan ke empat orang tersebut. Seperti, ketika para *planter* tersebut ditanya: “siapa, njang soedag adjar radja sama kowe orang,” mereka hanya menjawab dengan:

orang ketjiel darie mentak baijara satoe satoenja orang mentak f 25 itoe betool, kaloo orang besaar [residen] ada kassie darie njang adjar orang ketjiel poenja menjaootnja tiada darie satoepon lain dia poenja soekak kendirie orang ketjiel pegie klag die moeka Resident.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> *Proces verbal* 29 November 1842.

<sup>13</sup> *Missive Raad van Indie* kepada Residen Pekalongan, 10 Desember 1842.

<sup>14</sup> *Missive* Residen Pekalongan kepada Gubernur Jenderal, 12 Nov. 1842.

<sup>15</sup> Laporan Jaksa Besar, Prawiro Widjojo, 29 Nov. 1842.



Mungkin, tindakan gubernemen hanya mencari “kambing hitam” saja dari kalangan petani untuk menunjukkan wibawa, pengaruh dan kepentingan yang tidak bisa digugat atas kaum tani. Tindakan preventif yang kemudian dilakukan yaitu menangkap dan membuang ke empat tertuduh tersebut, merupakan cara menutup kemungkinan meluasnya tuntutan dari desa-desa lainnya. Dalam hal ini hukum buang, atau penjara hampir tidak dapat dipisahkan dari politik kolonial yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kelangsungan tindakan sepihak ini selalu absah bagi gubernemen sebagai cara menciptakan kondisi politik *rust en orde* (aman dan tertib) demi sistem eksploitasi yang diterapkan. Berdasarkan cara berpikir seperti itu maka penyelesaian peristiwa di atas ini dapat dianggap wajar, yaitu ke empat tertuduh dibuang dan dipenjara lebih dahulu tanpa pengusutan pada awal November 1842,<sup>16</sup> yang kemudian dipertegas oleh *Raad van Indie* di awal Desember dengan: “Ik adviseer ... over den tijd der verwijdering van der vier naar Samarang vertonden personen.”<sup>17</sup> (Saran saya ... tunjukkan pembuangan keempat orang itu ke Semarang sekarang)

Sedang proses pelacakannya melalui tanya-jawab—yang juga tidak bisa membuktikan kesalahan keempat orang tersebut—dengan para *planter* dilakukan pada saat setelah penangkapan, yaitu tanggal 29 November 1842.

Meskipun demikian pada dasarnya gubernemen setuju bahwa jumlah upah yang dibayarkan memang rendah,<sup>18</sup> sebab para *planter* yang dipekerjakan tersebut umumnya tidak memiliki (menguasai) tanah.<sup>19</sup> Namun gubernemen pun tetap bersikeras bahwa *planter* telah melakukan persetujuan kontrak kerja dengan upah sebesar 14,22 *gu1den*, dan janji tersebut harus tetap ditepati, tidak ada alasan untuk mengatakan tidak puas.<sup>20</sup> Tuntutan *planter* tersebut merupakan tindakan: “kurang ajar,” karena mengakibatkan

<sup>16</sup> *Missive* Residen Pekalongan 12 Nov. 1842.

<sup>17</sup> *Missive*, *Raad van Indie* 10 Desember 1842.

<sup>18</sup> *Missive*, *Raad van Indie* 10 Desember 1842; *missive* Residen Pekalongan kepada *Directeur der Kultures*, 4 Januari 1843.

<sup>19</sup> *Missive* Residen Pekalongan kepada *Directeur der Kultures* 4 Januari 1843.

<sup>20</sup> *Missive* *Raad van Indie* 10 Des. 1842.

terbengkalainya kebun-kebun tebu.<sup>21</sup>

Hanya dua *missive* yang menangkap persoalan secara agak jelas tentang penyebab peristiwa di atas, pertama dari Residen Pekalongan yang menjelaskan bahwa terjadi ketidak beresan dalam pembayaran upah di desa-desa,<sup>22</sup> yang kemudian dianalisa oleh *Directeur der Kultures*. Adanya kesewenang-wenangan yang terjadi dalam desa-desa oleh kepala desanya, terutama dalam melakukan penunjukkan tanah dilakukan secara tidak adil, kemudian *plantloon* yang dibayarkan tidak merata karena diberikan melalui lurah, menjadikan banyak *planter* tidak menerima upah sebagaimana mestinya. Di luar pokok masalah ketidak beresan pembayaran upah dalam desa, *Directeur der Kultures* mengusulkan kepada Residen agar membayar penuh upah yang semestinya diberikan kepada *planter* sebesar 17,77 *gulden*, sesuai dengan proposal.<sup>23</sup>

Meskipun pada akhirnya segala usul berhenti sebagai usul saja, karena Direktur *Algemeene Secretarie* telah menolaknya<sup>24</sup> sehingga tindakan yang dipilih adalah pemulihan kondisi *rust en orde* bagi para *planter* (atau gubernemen). Akan tetapi terlepas dari penilaian baik-buruk pembuangan ke empat orang tersebut, yang jelas *planter* kini kembali bekerja dan tidak melakukan tuntutan lagi.<sup>25</sup> Paling tidak pembuangan tersebut menjadi tindakan tepat bagi gubernemen.

## Upah Riil

Dalam bagian ini akan dibahas dua hal, pertama analisa penulis terhadap peristiwa di atas, dan kedua, melihat kondisi besar upah jika diperhitungkan dengan biaya kebutuhan hidup sehari-hari.

Ada hal yang sebenarnya cukup penting dalam tuntutan *planter* di atas namun diabaikan dalam analisa gubernemen terhadap

<sup>21</sup> *Missive* Residen Pekalongan 4 Januari 1843.

<sup>22</sup> *Missive*, 12 November 1842.

<sup>23</sup> *Missive Directeur der Kultures* kepada Residen Pekalongan, 13 Januari 1843.

<sup>24</sup> *Missive* kepada Residen Pekalongan, 16 November 1842.

<sup>25</sup> Hal ini menjadi penegasan akhir dari “diskusi” antar lembaga di atas dan disimpulkan dalam *Besluit 2 Februarij* 1843. Ke empat penghasut kemudian dipindah dari penjara Semarang ke Krawang.

peristiwa *planter* menggugat. Karena, gubernemen hanya memusatkan persoalan pada satu dari tiga tuntutan *planter*, yaitu upah saja. Sedang penolakan *planter* untuk menanam lahan yang dianggap berkondisi buruk, dan menolak atau menunda menanam paparan tebu karena pekerjaan untuk mengolah tanaman milik petani sendiri belum selesai, diabaikan begitu saja. Selain itu meskipun dugaan gubernemen bahwa salah seorang dari penghasut gugatan upah di atas adalah orang berpengaruh di desa, atau lurah, namun analisa gubernemen hanya sampai pada menilai sikap sewenang-wenang dari elit desa tersebut terhadap rakyatnya; sedang alasan mengapa seorang kepala desa menghasut, yang menjadi pangkal dari *planter* menggugat, justru tidak terungkap.

Berdasarkan penjelasan yang tercakup dalam bab III di muka maka orang-orang bumiputra berpengaruh telah terlibat dengan produksi barang-dagangan, seperti para bupati, para kepala distrik, dan berlanjut pada lapisan orang yang ber hak istimewa dalam desa. Singkatnya telah muncul kesadaran *entrepreneur* di kalangan bumiputra, yaitu tanah bisa dijadikan alat yang menghasilkan laba lebih besar bila diolah sendiri. Tentu timbul pertanyaan berapa selisih labanya jika sebidang tanah diolah sendiri dengan jika diolah bagi kepentingan gubernemen? Dari penghitungan yang dilakukan bupati Wirio Dhi Negoro, bila sebidang tanah ukuran satu *bau* ditanami padi atau ketela atau jagung setelah mengeluarkan ongkos-ongkos bibit dan upah bagi pengerjaannya sekitar 1,44 *gulden* maka hasilnya bisa dijual sebesar 21 hingga 22 *gulden*. Jika tanah tersebut dipakai untuk menanam tebu bagi penggilingan-penggilingan Tionghoa yang masih beroperasi akan mendapat 80 *gulden*.<sup>26</sup> Dan paling tidak untuk tanaman bukan tebu, setahun bisa memanen tiga kali, jadi pendapatan bersih dari satu *bau* tanah adalah 61,68 *gulden*. Kalau tanah tersebut dipakai untuk tebu gubernemen, selama 2 tahun, hanya diberikan

<sup>26</sup> Lihat laporan tahun 1635: "Njang terseboet die bawa snie menoendjoeken atoeran sawa, dieija orang poenja pakerdjaan bolenja tanem apa-apa, die dalem ietoengan njang satoe baoc." (AKP 7/1) Hal serupa juga dilaporkan oleh Residen Praetorius dalam laporan perbandingan sebelum dan setelah diberlakukannya *cultuurstelsel* (AC 46). Beberapa tahun sebelumnya kaum "*fabrikant*" Tionghoa malah menjanjikan jumlah uang lebih besar bagi para penanam tebu, untuk satu *bau* lahan tebu diberi ongkos pengganti sebesar f 125 (AKP 82/1 B). Hal inilah yang kiranya lebih mendorong kaum petani-kaya tidak atau segan membantu proyek penanaman tebu gubernemen.

pengganti sebesar 56,88 *gulden* (upah bagi 4 orang pengolah yang masing-masing menerima 14,22 *gulden*), suatu jumlah pendapatan riil yang jauh berbeda.

Dari deskripsi ini menjadi cukup beralasan jika petani-kaya lebih memilih mengusahakan tanahnya sendiri untuk suatu produk pertanian ketimbang jika memberi waktu dan tenaganya untuk *onderneming* gubernemen. Sehingga cukup beralasan jika mereka mengorganisir *planter* lainnya dengan cara menghasut, untuk mengajukan tiga tuntutan seperti telah disebutkan di atas. Tuntutan pertama, sebagai cara mendapatkan hasil tebu lebih banyak *planter* menolak bidang sawah yang berkualitas buruk, karena hanya dengan mengolah sawah-sawah yang berkualitas baik saja akan didapat suatu panen yang melebihi target per *bau* yang mana kelebihan tersebut akan dibayarkan kepada para penggarap.<sup>27</sup> Tuntutan kedua, sudah cukup jelas yaitu kenaikan jumlah upah. Dan tuntutan ketiga, menunjukkan bahwa petani-kaya tidak ingin dirugikan dengan hilangnya waktu untuk mengerjakan tanahnya sendiri karena harus mengerjakan tanaman tebu gubernemen.

Persoalan utama yang melandasi analisa gubernemen adalah masalah upah. Namun tidak dijelaskan mengapa gubernemen tetap bertahan pada tingkat upah yang dianggap tidak memadai kalau pada dasarnya disadari bahwa upah tersebut terlalu rendah. Di lain sisi seolah-olah gubernemen cukup sadar untuk menerima kondisi bahwa upah mesti dibayarkan sesuai dengan kondisi biaya hidup setempat. Hal ini pernah diutarakan pada awal didirikannya pabrik-pabrik modern, antara tahun 1837-38, Residen Pekalongan telah membuat surat edaran, yang secara singkat mengingatkan pada kaum *fabriekant* bahwa upah yang mesti dibayarkan dalam karesidenan ini lebih tinggi dari di tempat lain: “*Dat de koelielooenen in deze Residentie hooger dan Djapara zijn.*”<sup>28</sup> (Upah kuli di Karesidenan ini lebih tinggi dari di Jepara) Namun di lain sisi *Raad van Indie* melihat pemberian upah kepada para *planter* telah memadai tanpa melihat kondisi riil, perbandingan antara upah dengan harga pasar:

<sup>27</sup> Lihat kutipan regulasi dari Van den Bosch, dalam bab ini di atas.

<sup>28</sup> *Missive* Residen Pekalongan kepada *Directeur der Kultures* 6 Nov. 1837, AC 1624.

onder opmerking dat door de bevolking (van Java over het algemeen genomen) voor den oogst van 1840 van de Suiker is genoten als maximum f 32.73, en als minimum f 6.41 per huisgezin... Zoo dat f 14.22 verre ander gemiddelde van 1840 is.<sup>29</sup>

(memperhatikan bahwa penduduk (Jawa pada umumnya) untuk tahun 1840 di [industri] gula maksimal menikmati f 32.73, dan minimal f 6.41 setiap keluarga... sehingga f 14.22 jauh di atas rata-rata tahun 1840.)

Kalau demikian tentu timbul pertanyaan, bagaimana orang-orang tersebut di atas memperhitungkan tinggi atau rendahnya jumlah upah yang mesti dibayarkan pada buruh-buruh bumiputra? Mengapa pendapat yang satu menjadi tidak konsisten bila dihadapkan dengan pendapat yang lain?

Secara teoritis upah ditentukan *nominal*, yaitu sejumlah uang tunai yang diterima oleh buruh. Namun perhitungan seperti ini seringkali mengabaikan kondisi riil harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari, yang bisa didapat dari jumlah nominal yang diterima buruh tersebut. Jadi, upah seharusnya ditentukan secara riil, atau kondisi harga kebutuhan riil menentukan besarnya upah nominal. Bagi buruh, upah riil lebih besar artinya daripada upah *nominal*, sebab seandainya upah *nominal* naik, sedang pada saat yang sama harga-harga kebutuhan hidup juga naik dengan prosentase yang sama, maka upah riil akan tetap tidak berubah.<sup>30</sup> Secara singkat masalah ini pernah dinyatakan dengan kata-kata sebagai berikut:

*Harga-tenaga* kaoem boeroeh sama dengan keperluan penghidoepanja oentoek mengembalikan tenaga jang terpakai (reproductie kekoeatannja). Dan keperluan penghidoepan ini boekan sadja *makanan peroet*, akan tetapi djoega *makanan otak*. Oleh karenanja maka harga tenaga itoe tidak tetap, akan tetapi toeroen-naik, berubah.<sup>31</sup>

Pemerintah kolonial mestinya cukup sadar tentang sistem upah yang diterapkannya. Namun untuk mencegah terjadinya pelonjakan yang akan mengkacaukan harga produk dan juga laba

<sup>29</sup> *Missive* 10 Des. 1842.

<sup>30</sup> Zwijndregt dan Schoonenberg, 1954, *op. cit.*, hal. 121.

<sup>31</sup> Sjahrir, 1933, *Pergerakan Sekerdja*, hal. 2. 32.

yang dikeduk dari Jawa, maka gubernemen menetapkan besar upah maksimal secara sepihak:

Pemerintah mendjaga agar upah-upah itu djangan meningkat. Pemerintah mempertimbangkan untuk mengatur upah-upah kerdja itu dengan kekuasaan tertinggi.<sup>32</sup>

Namun yang terjadi di Karesidenan Pekalongan selama tahun-tahun awal beroperasinya *onderneming-onderneming* gula adalah kemerosotan produksi tanaman pokok yang mengakibatkan pelonjakan harga beras.<sup>33</sup> Sehingga hal ini dapat menjadi salah satu penyebab yang memudahkan menyulut para *planter* gurem, tuna-tanah, untuk menuntut upah lebih besar.

Kelabilan (fluktuasi) pada harga kebutuhan pokok, memaksa gubernemen setiap tahun melakukan penetapan regulasi-regulasi baru untuk tingkat upah maksimal. Seperti selama tahun 1840-an upah bertahan antara 12 hingga 15 *duit*, dan sejak 1850 antara 15 sampai 20 *duit*, sedang untuk kuli yang bersedia kerja nonstop siang-malam sekaligus mendapat 40 *duit*. Tetapi untuk kerja-kerja pengawas atau mandor upah per hari jauh lebih besar sekitar 40 *duit*.<sup>34</sup> Apa yang diregulasikan tidak harus sesuai dengan apa yang dipraktekan, seperti dalam pertengahan abad, ke tiga pabrik di Pekalongan membayar upah untuk kerja siang hari antara 15 (Sragie) hingga 18 *duit* (Kalimatie dan Wonopringo); dan untuk kerja malam hari antara 18 dan 20 *duit*.<sup>35</sup> Jelas meski jumlah selisih upah antara regulasi dengan yang diberikan pabrik sangat kecil, antara 2-5 *duit*, namun jumlah upah seperti ini ternyata tidak pernah memunculkan gugatan protes baru, selain peristiwa di atas hingga berakhirnya *cultuurstelsel*. Padahal sejak 1850 untuk *plantloon* terjadi penurunan dari 14,22 *gulden* di tahun 1840-an, menjadi sedikit lebih dari 13 *gulden*.<sup>36</sup>

<sup>32</sup> Burger, 1962, *op. cit.*, hal. 188.

<sup>33</sup> Lihat penjelasan dalam bab III di muka.

<sup>34</sup> *Lijst van Ingekochte Materialen en Verwerkte Arbeidsloonen 1842-1859*, AKP 20/1; *Kultuur Verslag 1962* sub "Dagloon", AC 1624.

<sup>35</sup> AC 1624.

<sup>36</sup> *Verslag betreffende de suiker cultures, met aantoning der uitkomsten 1861*, RA 120.

Bagaimanapun memang ada kaitan erat antara besar upah dengan harga kebutuhan sehari-hari. Sebagai dinyatakan oleh Residen dalam tahun 1852:

“De levens middelen zijn over het algemeen goedkoop en een man kan zich gemakkelijck roeden met 10 a 12 duiten daags.”<sup>37</sup>

(Bahan pangan pada umumnya murah dan seorang tiap-tiap hari dapat mencukupi diri dengan 10 atau 12 *duit*).

Karena harga kebutuhan pokok minimal kini bisa ditekan tanpa mengalami kelabilan (fluktuasi) yang berdampak terhadap besarnya upah. Misalnya, harga minyak kelapa bertahan antara 25-30 sen per *kattie*, ikan laut antara 15-20 sen per *kattie*, dan terutama harga beras distabilkan sekitar 40-55 sen per *gantang*.<sup>38</sup> Hal ini menunjukkan bahwa gubernemen pun cukup sadar atas kondisi riil para buruhnya. Sehingga ketika *Commissie* Umbgrove, yang kemudian harus merancang perbaikan-perbaikan dalam *cultuurstelsel* mennganjurkan untuk mempertahankan pembayaran upah-upah itu,<sup>39</sup> hal tersebut dapat terlaksana. Umbgrove sendiri melihat kenyataan yang ditemui selama penelitian komisi tersebut, bahwa terdapat buruh-buruh tak bertanah mengakibatkan mereka harus memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari dengan membeli. Sehingga, upah menjadi sangat diperlukan.

<sup>37</sup> AC 1624.

<sup>38</sup> *Algemeen Verslag* tahun 1860-an, AKP 69/4.

<sup>39</sup> AC 1584. Selama penelitiannya di Pekalongan, *Commissie* Umbgrove mencatat upah-upah yang diberikan pabrik-pabrik gula tersebut sebagai berikut: upah penarik gerobak 15 *duit*; kuli pabrik untuk kerja satu *shift* (siang atau malam saja) sebulan f 5,40; pengumpul bambu 10 *duit* per gerobak; untuk pengangkutan batu-bata 45 *duit* per 1.000 biji (harga batu-bata tersebut f 3,50); dan untuk mengangkut kapur 32 *duit* per *koyang*.

# Bab VI: Kesimpulan

Lembaga-lembaga yang dibangun selama *cultuurstelsel* telah menjadi kondisi yang memungkinkan investasi dan pengembangan modal. Terutama di sekitar penggunaan tenaga kerja dan tanah murah, atau bahkan gratis seperti *heerendienst* yang dipertahankan hingga akhir abad 19.<sup>1</sup> Van den Bosch telah menciptakan infrastruktur dan kemungkinan terbaik bagi pengelolaan daerah jajahan yang telah gagal dilakukan oleh penerap kebijaksanaan politik-ekonomi dalam kurun-kurun sebelumnya. Karena persoalan utama bagi pemerintah Hindia Belanda adalah bagaimana mengelola koloni, maka prinsip-prinsip “murni” kapitalisme jelas tidak dilangsungkan. Seperti, dijumpainya fenomena *Javasche Courant* (dan juga *Javasche Bank*) memberi pinjaman tanpa bunga; tidak ada prinsip-prinsip kompetitif (liberalisme) yang melandasi perdagangan dengan ditunjuknya NHM sebagai lembaga monopoli. Di lain sisi gubernemen juga cenderung melestarikan ikatan-ikatan perhambaan pada masyarakat bumiputra yang direkrut untuk bekerja pada gubernemen; dan juga sebagian tenaga kerja bumiputra yang digunakan dalam posisi menguasai tanah.

Bagi masyarakat bumiputra Jawa hadirnya kolonialisme beserta lembaga-lembaga bentukannya sangat besar pengaruhnya, terutama di sekitar hadirnya industri agrikultur dan sistem upah yang berujud pabrik gula. Kemajuan relasi sosial yang dihasilkan melalui *cultuurstelsel* dalam membentuk masyarakat Jawa pada umumnya dan khususnya di Karesidenan Pekalongan, *pertama* sistem ini telah berhasil ditegakkan dengan menghancurkan lapisan elit setempat sebagai pengusaha bumiputra (domestik) yang mulai tumbuh, - yang menjadi kompetitor efektif bagi industri agrikultur gubernemen -sekarang tidak lebih hanya menjadi pejabat bergaji dalam barisan *Pangreh-Praja*. *Kedua*, industri gula yang menyerap

<sup>1</sup> *Staatsblad* 1894 no. 181, menjelaskan 4 kerja gratis yang bisa diminta kepada penduduk setempat, 1) mengerjakan perbaikan dan pemeliharaan jalan-jalan, 2) perawatan dan pemeliharaan saluran air (dam), 3) pembuatan gardu penjagaan, dan 4) menjaga pintu-air.



tanah, air, dan tenaga kerja secara besar-besaran telah membawa dampak hancurnya kebutuhan pokok petani, beras. Hal ini mendorong dampak *ketiga*, yaitu terjadi proletarianisasi yang secara riil terwujud dengan munculnya kuli dan atau *wong boeroeh*. Suatu kelas buruh yang timbul sebagai jawaban atas kepadatan penduduk yang mulai tidak bisa diatasi oleh sistem perekonomian pedesaan Jawa lama. Tegasnya terjadi transformasi pada masyarakat bumiputra, yakni penglepasan petani dari hak mengolah tanah desa dan kini menjadi penjual tenaga kerja. Dengan munculnya buruh Jawa, maka pengerahan tenaga dalam bentuk kerja kontrak (*suiker-contract*) menjadi tidak diperlukan lagi.<sup>2</sup>

Namun tidak seluruh lapisan petani menjadi kaum penjual tenaga. Seperti dalam hubungan kerja antara pabrik gula dengan lapisan petani-kaya (*grootste-sikep*), kaum tani-kaya dapat menikmati pendapatan tunai lebih besar dalam perkawannya dengan *onderneming* gula, hanya dengan menyewakan hewan-hewan penarik gerobak. Yang dimaksudkan dengan *perkawanan* adalah penguasaan alat untuk menghasilkan produksi. Berarti kedudukan kaum tani-kaya seiring dengan pemilik pabrik.

Sehingga dalam konteks diferensiasi petani di pedesaan, dengan hadirnya modal dan industri di lingkungan mereka, petani tidak bisa hanya dilihat sebagai “*cukupan*” dan “*kekurangan*” saja (“*have*” dan “*have-nots*”).<sup>3</sup> Tetapi lebih merupakan jurang-sosial karena sifat dari petani-kaya yang menyewakan kuda jelas berbeda dengan petani-gurem yang menjual tenaga untuk upah. Hal lain yang mempertegas diferensiasi petani dapat dilihat pada pembagian tanah tahunan, yang tidak bisa dilihat semata-mata sebagai cara redistributif: “kemiskinan yang dibagi” (*shared poverty*). Seperti telah diulas dalam bab III, tidak dapat begitu saja mencampurkan antara regulasi gubernemen dengan masalah riil yang dihadapi petani. Yaitu di satu sisi petani-kaya dan lapisan supra desa berdasarkan hak-hak “istimewa” yang ada pada mereka dapat

<sup>2</sup> Hal ini menjadi antitesa dari perkembangan yang berlangsung di Sumatera. Kalau pola pengerahan tenaga kerja di Sumatera landasan utamanya adalah kerja kontrak, atau *kuli kontrak*, yang didatangkan dari Jawa. Sedang perkembangan di Jawa justru kebalikan dari di Sumatera, yaitu kerja kontrak tergeser dengan melimpahnya buruh bumiputra.

<sup>3</sup> Geertz, 1976, *op. cit.*, hal. 106.

menjarah dan memilih tanah-tanah subur, sementara lapisan petani kelas bawah hanya mendapat tanah tanah olah-gilir kualitas buruk sehingga cenderung untuk menolak pemberian tanahnya.

Pemasyarakatan uang (*moneterized*) telah merasionalkan tata hubungan sosial pedesaan. Seperti, lapisan petani-kaya lebih senang memperlakukan tanah “milik”nya, melalui sistem persewaan yang diadakan dengan lapisan petani-menengah, *wong meratjang*. Hubungan kerja bagi-basil, *memaro*, lebih sering dilakukan dalam lalu-lintas uang, yaitu pihak pengolah tanah harus membayar uang dalam jumlah tertentu kepada pemilik tanah yang disebut *sromo*.<sup>4</sup> Artinya ikatan-ikatan “adat” lama mulai *ditinggalkan* atau diberi sifat baru, dan kini berlangsung hubungan yang lebih “murni” ekonomi.

Di lain sisi akibat kemiskinan yang mendadak mencekik kaum tani-gurem, lapisan tani ini terpaksa mencari pendapatan di luar pertanian. “Lari”-nya mereka dari lingkungan “adat” desa kemudian mereka disongsong oleh pabrik gula yang menawarkan sejumlah upah tunai.

Di awal pembukaan *onderneming*, tahun 1830, memang gubernemen khawatir bahwa buruhnya akan meninggalkan pekerjaan wajibnya. Sehingga dibuatlah barak-barak buruh. Namun dalam perkembangan selanjutnya, tampaknya, hal ini sudah tidak diperlukan lagi sebab berlangsung cara yang tidak merepotkan kaum *fabriekant* yaitu dengan mengkondisikan kebiasaan hidup boros para buruh. Gejala perjudian, prostitusi, candu dan minuman keras yang selalu didatangkan pada musim-musim panen menjadi sarana yang penting untuk mengkondisikan buruh akan terjerat sebagai buruh. Bagi buruh, berbagai kesenangan sesaat tersebut menjadi kebutuhan hiburan satu-satunya, setelah mereka tertekan secara fisik dan psikologis dalam alur kegiatan pabrik yang melelahkan dan menjemukan. Mereka tidak tahu bagaimana menggunakan uang dengan “benar”, karena tidak ada kesempatan memikirkannya. Hal-hal yang menggiurkan tersebut akan selalu muncul dan disodorkan kepada mereka bersamaan dengan saat mereka menerima upahnya. Sebagaimana digambarkan Lulofs untuk kuli kontrak dari Jawa yang diserap ke

<sup>4</sup> Laporan *Commissie Umbgrove*, AC 1854.

Sumatera:

“Bagi mereka uang hanyalah alat untuk berjudi. Dan perbedaan antara banyak dan sedikit uang bagi mereka hanya berarti waktu berjudi lebih lama atau lebih singkat.”<sup>5</sup>

Dengan terserapnya buruh pada ritme kerja dan penghamburan uang tersebut, maka pada akhirnya barak-barak buruh hilang dengan sendirinya. Sebab kini para buruh itu sendiri yang mencari atau membuat tempat tinggalnya di sekitar pabrik, sebagai upaya tinggal dekat tempat bekerja. Muncul kampung-kampung industri yang melingkungi pabrik dengan komunitas buruh. Buruh-buruh tersebut telah tercabut dari akar desanya. Kehidupan desa tampaknya sudah tidak lagi “Gemah ripah loh jinawi”.

Adalah wajar jika dalam jaman modal swasta (1870-1930) timbul berbagai pemogokan buruh, sekelompok buruh tampaknya mulai sadar bahwa kelangsungan pabrik-pabrik tergantung pada tenaga mereka. Secara riil mereka menyaksikan para tuan pabrik yang mempekerjakan mereka hidup mewah dengan rumah megah, memiliki mobil, bermain bilyar (kamar bola), sering berpesta, dan memelihara gundik. Sementara para buruh ber-kemeja lusuh, miskin, kelaparan setelah habis diperas namun tidak menerima imbalan yang sesuai. Jurang sosial ini yang, tampaknya, mendorong buruh bergerak menuntut hak-haknya.

Perubahan-perubahan besar inilah yang kemungkinan menjadi titik pandang Hoevell dalam pertengahan abad, sehingga ia menyebutnya secara dramatis dengan:

‘a complete reformation – yes, I dare to say, a revolution of Javanese society’.<sup>6</sup>

(sebuah reformasi lengkap – ya, dapat saya katakan, satu revolusi masyarakat Jawa)

Masyarakat Jawa telah meninggalkan bentuk tatanan sosial dan produksi lama yang tidak mementingkan laba, ke tatanan sosial baru yang mengutamakan produksi untuk pasar. Dan, meluasnya

<sup>5</sup> M.H. Szekely-Lulofs, 1985, *Berpacu Nasib Di Kebun Karet*, Grafitipers, hal. 11.

<sup>6</sup> Hoevell 1851, dalam Penders, 1977, *loc. cit.*, hal. 36.

penggunaan uang sebagai alat tukar. Sifat hubungan sosial di pedesaan Jawa telah di tata kembali, diintegrasikan dengan perubahan-perubahan yang dipaksakan kolonialisme, petani dicakup dalam arus perputaran modal. Namun demikian, memang terdapat kekhasan dari tatanan sosial desa dalam menanggapi pabrik yang tumbuh di sekitar mereka. *Pertama*, kondisi riil tidak bisa menempatkan petani dalam hubungan telah diproletarisasikan sepenuhnya, karena masih terdapatnya mekanisme desa dalam menyediakan kesempatan pelestarian sistem produksi lama. Namun pabrik gula dan ikatan-ikatan penghambaan yang digunakan dalam merekrut tenaga kerja oleh *cultuurstelsel* telah membantu penggiringan petani untuk menjadi klas buruh dalam arti yang sesungguhnya.

*Kedua*, dengan berlakunya sistem produksi kapitalis konsekuensinya adalah diporak-porandakannya sistem produksi lama. Yaitu kaum tani bumiputra yang mewujudkan klas-klas sosial lama dalam diferensiasi di antara mereka, ditempelkan dalam bentuk dan sifat baru yang diciptakan oleh kapitalisme kolonial. Bentuk klas-klas baru tersebut adalah petani-kaya telah tidak menikmati surplus produksi yang didapat melalui sistem bagi-hasil, melainkan menyewakan tanah dan hewan peliharaannya. Sedang petani-gurem menjadi buruh upah (klas buruh). Sehingga *cultuurstelsel* bisa disebut sebagai media transisi menuju kapitalisme yang berlaku “konsekuen” sejak diundangkannya *Agrarische Wet* 1870.<sup>7</sup>

Meskipun pada akhirnya *cultuurstelsel* harus menyerah oleh serangan kaum Liberal - sebagai antitesis dari politik-ekonomi konservatif - yang lebih “manusiawi”. Namun yang perlu ditegaskan dari adanya sistem ini adalah, bahwa Van den Bosch telah memberi terobosan bagi kebebasan kemungkinan mengelola Jawa sebagai daerah jajahan yang diawali dengan fenomena negara sebagai pengusaha. Meskipun sejak 1870 ruang gerak kaum investor swasta menjadi cukup leluasa, namun di bawah *Suiker-Wet* negara masih berperan hingga 1879, dan setelah itu negara mundur dari aktifitas

<sup>7</sup> Petani-kaya diberi hak pemilikan Barat, *eigendom*, bagi tanah-tanah yang dimilikinya; dan kaum investor asing harus menyewa tanah dari kaum pemilik tanah bumiputra ini. Sedang petani-gurem, dengan adanya pemilikan tanah ini, menjadi sosok sebenarnya sebagai buruh, penjual tenaga kerja.

pengelolaan langsung industri gula. NHM mengubah diri menjadi *cultuurbanken*, dan terlibat infestasi memproduksi barang-dagangan yang tidak mempunyai prospek keuntungan besar, seperti dalam eksplorasi pertambangan dan kehutanan, dan juga prasarana pendukung perkebunan seperti pembuatan jalan, rel kereta api dan sistem irigasi.

*Cultuurstelsel* merupakan produk sejarah yang paling baik, dalam hal melakukan penghisapan kapitalisme yang efektif. Negara tidak hanya menguasai segi politik makro dari suatu sistem politik-ekonomi yang diterapkan, melainkan secara mikro juga terlibat kegiatan investasi sebagai pengusaha. Gejala negara sebagai pengusaha agaknya tidak pudar dengan perginya kolonialisme dari bumi Indonesia. Suatu gejala “gaya” baru dan dikembangkan negara Indonesia pasca kolonial adalah munculnya PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Kemunculan PIR tidak terlepas dari strategi negara dalam pengelolaan industri perkebunan di bawah naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang lahir sejak *nasionalisasi* perusahaan-perusahaan asing pada tahun 1957. Pola kelangsungan PIR adalah pengambil-alihan tanah petani oleh negara, kemudian tanah tersebut dibagi-bagikan kembali dalam persil-persil yang lebih kecil, dan kemudian di atas tanah tersebut wajib ditanami tanaman tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Sebuah pola yang juga berlangsung selama kurun *cultuurstelsel*.

Mungkin memang terlalu anakronis untuk mempersamakan perkembangan yang terjadi di jaman kolonial dengan perkembangan yang terjadi di masa setelah kemerdekaan. Kondisi-kondisinya jelas berbeda, begitu pula dengan pola-pola kelangsungannya. Namun hal mendasar yang perlu dipertanyaan adalah sampai sejauh mana PIR-BUMN memang tidak mengikuti pola kolonial? Dan, seberapa jauh negara dapat dinilai “steril” dari aktifitas perekonomian? Menjadi catatan penutup kesimpulan ini, sebagai persoalan yang perlu direnungkan dan dicari jawabnya.

# Kepustakaan

Singkatan:

AC: *Archieven Cultures*

AKP: Arsip Karesidenan Pekalongan

BKI: *Bedragen Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.*

ENI: *Encyclopaedie van Nederlandsche-Indie*

ESS: *Encyclopaedia of the Social Sciences*

Nb: nomor box

MISI: *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*

RA: *Residentie Archieven*

RIMA: *Review of Indonesia and Malaysia Affairs*

## Sumber Yang Tidak Diterbitkan

*Arsip Nasional Republik Indonesia Karesidenan Pekalongan, nomor sudut 9, (AKP).*

69/1-5 Nb. 35: Politiek verslagen v.d. Residentie Pekalongan over de jaren 1855 tot 1861, 1852-1862.

77.6 Nb. 42: Surat menyurat dengan Raden Ayoe Ario Weriodhinegoro, Adhipatie Wirjonegoro dengan resident Pekalongan a.l. mengenai hal warisan 1852-1868.

7/1-4: Inkomende Uitgande Regten.

20/1: Lijst van Ingekochte Materialen en Verwerkte Arbeidsloonen 1842-1859.

73/1 Nb. 39: Suiker Contracten tussen de Gouvernment en resident Pekalongan en de dessa's hoofden, 1830-1833.

82/1 B: Statistiek van de Residentie Pakalongan 1820.

83/B/3/Nb. 45: Statistiek v.d. residentie Pekalongan in het algemeen 1862.

85/4 Nb. 47: Register v.d. taxatie der eigendommen in de Reesidentie

Pekalongan, 1847-1849.

127/7: Dag Boeken Controleur 1851.

133/10 Nb. 77: Jaarlijkse afrekening met de suiker en koffie.

Bosch 1834: *Eenige Zakelijke Extracten uit een Algemeen overzicht, door Z.E. den Kommissaris Generaal Van Den Bosch, te zamen gesteld, gedagteekend 24 Januarij 1834*. Disisipkan dalam AKP 7/1-4.

*Archieven Cultures 1816-1900, (AC)*

46: Memori Residen Pekalongan mengenai ikhtisar perbandingan yang diminta Batavia tentang keadaan sebelum dan sesudah diadakannya sistem Tanam Paksa, ditujukan kepada Gubernur Jenderal. Salinan 1835.

408: Verbal [gula] direktur perkebunan.

499: Extract uit het Register der Besluiten van den Gouverneur General van Nederlandsch-Indie.

518: Daftar-daftar perkebunan-perkebunan di Jawa 1869.

532: Daftar-daftar pekerjaan di pabrik gula Wonopringo pada tahun-tahun 1845, 1846, 1847 dan tanpa tahun, kira-kira 1848.

1584: Angket mengenai tanah, desa, penduduk, jalan dan lain-lain, yang dijawab oleh lingkungan pengusaha perkebunan keresidenan Pekalongan, dengan daftar-daftar kira-kira 1854. [*Commissie Umbgrove*].

1624: Laporan Tahunan Keresidenan Pekalongan 1834-1865.

*Residentie Archieven 'Pasar Ikan' 1800-1920, (RA)*.

119: Suiker-oogst en aanplant Rapporten Fabriek Sragie, Wonopringo en Kalimatie Taoon 1862.

120: Verslag betreffende de suiker cultures, met aantoning der uitkomsten 1861.

### *Besluit-besluit:*

Besluit 3 Januari 1837 No. 4.

Besluit 2 Februari 1843 No. 11.

Besluit 4 Desember 1845 No. 4.

Besluit 8 Februari 1847 No. 1.

Besluit 16 October 1848 12. 12.

## Sumber Yang Diterbitkan

### Arsip dan Dokumen

#### *Eindresumé (2).*

- 1880 *Eindresumé van het bij Gouvernements besluit dd. 10 Juli 1867 no. 2 bevolen Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op den Grond op Java en Madoera.* Diedit oleh Bergsma. Batavia-Ernst & Co. Bab "Pekalongan," h. 81-92.

#### *Gedenkboek.*

- 1924 *Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924.* Door de directie uitgegeven te Amsterdam op den 29 Maart 1924 ter gelegenheid van het Honderd-Jarig Bestaan der Maatschappij.

#### *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda Tahun 1839-1848.*

- 1973 Arsip Nasional Republik Indonesia No. 5. Jakarta.

#### *Memorie.*

- 1860 *Memorie Behoorende bij het rekest van Suiker contracten op Java, gerigt aan den Koning, gedagteekend 23 Februari 1860.*

#### *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat).*

- 1976 Arsip Nasional Republik Indonesia No. 8. UGM Press. Jakarta.

#### Penders, CLM.

- 1977 *Indonesia Selected Documents oon Colonialism and Nationalism, 1830-1942.* University of Queensland.



*Staatsblad van Nederlandsch-Indie:*

Tahun 1831 No. 47. "Intrekking der korting op den accijns in Nederland, voor de Oost-Indische suiker."

Tahun 1831 No. 50. "Bewijzen van oorsprong voor de in Indie voorgebragte en naar Nederland uitgevoerd wordende suiker."

Tahun 1894 No. 181. "HEERENDIENSTEN. PEKALONGAN. *Regeling der heerendiensten in de residentie Pekalongan.*"

## Buku dan artikel yang dikutip

Aas, Svein.

1984 "Relevansi Teori Makro Chayanov untuk Kasus Pulau Jawa." Dalam Sediono MP. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (peny.), *Dua Abad Penguasaan Tanah*. PT. Gramedia, Jakarta. H. 112-44.

Abdullah, Taufik.

1985 "Ke Arah Penulisan Sejarah Nasional di Tingkat Lokal." Dalam Taufik Abdulah (ed.) *Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan*. Gajahmada Universitas Press. H. 309-23.

Adisewojo, R. Sodo.

1971 *Bertjotjok Tanam Tebu*. Cetakan ke III. Sumur Bandung.

Adresboek

*Adresboek voor Java-Suikerindustrie*. Tanpa Tahun. Cetakan ke-6. C. Huysman Bagong 77, Soerabaia.

Alatas, S.H.

1988 *Mitos Pribumi Malas: Citra orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam Kapitalisme Kolonial*. Terjemahan Achmad Rofi'ie. LP3ES. Jakarta.

Alavi, Hamzah.

1982 "The Structure of Peripheral Capitalism." Dalam

Hamzah Alavi dan Teodor Shanin (eds.) *Introduction to the Sociology of "Developing Societies,"* The Macmillan Press Ltd. H. 172-192.

Allen, George C. dan Donnithorne, Audrey G.

1957 *Western Enterprise in Indonesia and Malaya: A study in Economic Development.* George Allen & Unwin Ltd. London.

Blommestein, H. van.

1847 *Suikerfabriekaat.* Terbitan lepas dari *Redactie van het Tijdschrift voor Neerlands Indie.*

Breman, Jan.

1986 *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial.* LP3ES, Jakarta.

Burger, D.H.

1939 *De Ontsluiting van Java's Binnenland voor het Wereldverkeer.* H. Veeman & Zonen. Wageningen.

---

1962 *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia.* Jilid I, cetakan ke-3. Disadur oleh Prajudi. Pradnjaparamita. Djakarta.

Deer, Noel.

1949 *The History of Sugar* (vol. 1 & 2). Chapman and Hall Ltd. London.

Djojosoewardho, Apoen S.

1983 "Bagaimana caranya agar Anda dapat melaksanakan pembukaan tanah sistem Reynoso dengan benar." *Paket Informasi*, no. 1, Juni. Balai Penelitian Perusahaan Perkebunan Gula. H. 51-66.

Doorn, Jacques A.A. dan Hendrix, Willem J.

1979 "Timbulnya Ekonomi Tergantung: Kensekuensi Pembukaan Priangan Barat Terhadap Proses Modernisasi." *Cakrawala*, no. 1, th. XI. Salatiga. H. 37-63.

*Eindresumé* (2)

1880 *Eindresumé van het bij Gouvernements besluit dd. 10 Juli 1867 no. 2 bevolen Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op den Grond op Java en Madoera.* Diterbitkan oleh Bergsma. Batavia-Ernst & Co. Bab Pekalongan, hal. 81-92.

Elson, Robert.

1978 "The Impact of Government Sugar Cultivation in the Pasuruan Area, East Java, During the Cultivation System Period." *RIMA*, vol. 12, number 1, June. University of Sydney. H. 26-55.

---

1984 *Javanese Peasants and the Colonial Sugar Industry: Impact and Change in an East Java Residency, 1830-1940.* Oxford University Press. Singapore.

"Fabriekenordonnantie."

1917 ENI, jilid I. J. Paulus (red.). Martinus Nijhoff, Leiden. H. 697-8.

Fasseur, C.

1975 *Kultuurstelsel en Kolonial Baten: De Nederlandse Exploitatie van Java 1840-1860.* Universitaire Pers Leiden.

*Gedenkboek.*

1924 *Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924.* Door de directie uitgegeven te Amsterdam op den 29 Maart 1924 ter gelegenheid van het Honderd-Jarig Bestaan der Maatschappij.

Geerligs, H.C. Prinsen.

1912 *The World's Cane Sugar Industry Past & Present.* Manchester, England.

Geertz, Clifford.

1976 *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia.* Terjemahan S. Supomo. Bhratara Karya Aksara.

Jakarta.

“Geschiedenis van de suiker op Java.”

1905 ENI, jilid IV. Oleh Joh. F. Snelleman (ed.). Martinus Nijhoff, Leiden. H. 146-51.

Hoetink, B.

1923 *Ni Hoe Kong Kapiteein Tionghoa di Betawie dalem tahun 1740* (disalin oleh Liem Koen). Tjetakan I. Naamloz Vennotschap Handel – Mij & Drukkerij “De Pertoendjangan,” Batavia.

Hook, Andrew van.

1964 “Sugar Growing and Sugar Making.” *The Encyclopedia Americana International Edition*, vol. XXV. New York. H. 804-13.

*Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda Tahun 1839-1848.*

1973 Arsip Nasional Republik Indonesia No. 5. Jakarta.

“Javashe Courant.”

1918 ENI, jilid 2, cetakan ke II. S. de Graaff dan D.G. Stibbe (eds.). Martinus Nijhoff. ‘s Gravenhage-Leiden. H. 221.

Knight, Gordon R.

1975 “John Palmer and Plantation Development in Western Java during the Earlier Nineteenth Century.” BKI vol. 131, h. 309-37.

---

1980 “From Plantation to Padi-field: The Origin of the Nineteenth Century Transformation of Java’s Sugar Industry.” *Modern Asian Studies*, 14, 2, h. 177-204.

---

1982 “Capitalism and Commodity Production in Java.” Dalam Hamzah Alavi dkk. (eds.) *Capitalism and Colonial Production*. Croom Helm, London & Canberra. H. 119-58

Kolff, G.H. van der.

- 1953 "An Economic Case Study: Sugar and Welfare in Java." Dalam Phillips Ruopp (ed.), *Approaches to Community Development: A Symposium introductory to problem and methods of village welfare in underdeveloped areas*. 's Gravenhage. H. 188-206.

Mansvelt, W.M.F.

- 1924 *Geschiedenis van de Nederlandsche Handelmaatschappij*. Jilid I. Dicitak oleh Joh Enschede en Zonen Haarlem.

*Memorie.*

- 1860 *Memorie Behoorende bij het rekest van Suiker contracten op Java, gerigt aan den Koning, gedagteekend 23 Februarij 1860.*

*Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat).*

- 1976 Arsip Nasional Republik Indonesia No. 8. UGM Press. Jakarta.

Mikush, Gustav.

- 1953 "Sugar." ESS, vol. 13-14, cetakan ke-10. Macmillan Company, New York. H. 450-5.

Onghokham.

- 1977 "Pulung Affair: Pemberontakan Pajak di Desa Patik beberapa Aspek Politik Desa di Madiun Pada Abad ke-19." MISI Jilid VII, no. 1, Januari.

- 
- 1984 "Perubahan Sosial di Madiun Selama Abad XIX: Pajak dan Pengaruhnya terhadap penguasaan tanah. Dalam Sediono MP. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (peny.), *Dua Abad Penguasaan Tanah*. PT. Gramedia, Jakarta. H. 3-27.

Penders, CLM.

- 1977 *Indonesia Selected Documents on Colonialism and Nationalism, 1830-1942*. University of Queensland.

Polak, J.B.A.F. Mayor.

- 1961 "Tentang Cultuurstelsel dan Penggantiannya." *Penelitian Sedjarah*, no. 4, th. II, September. H. 13-25.

Raffles, Thomas Stamford.

- 1817 *The History of Java*. Yang digunakan terbitan Oxford University 1982, pengantar oleh John Bastin. Kuala Lumpur.

Riclefs, M.C.

- 1982 *The History of Modern Indonesia*. Southeast Asia Reprint. The Macmillan Press Ltd. London.

Sheltema, AMPA.

- 1985 *Bagi Hasil di Hindia Belanda*. Yayasan Obor Indonesia.

Schrieke, BJO.

- 1974 *Penguasa-penguasa Pribumi*. Terjemahan Soegarda Poerbakawaca. Bhratara. Jakarta.

Sjahrir.

- 1933 *Pergerakan Sekerdja*. Daulat Ra'jat. Djakarta.

"Suikerindustrie."

- 1921 ENI, jilid IV, D.G. Stibbe (red.). Martinus Nijhoff, Leiden. H. 176-84.

Suroto, Suri.

- 1985 "Gerakan Buruh dan Permasalahannya." *Prisma*, no. 11. H. 25-34.

Sutjipto, F.A (ed.).

- 1975 *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid IV. Seri Sartono Kartodirdjo, dkk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Toer, Pramoedya Ananta.

- 1962 *Panggil Aku Kartini Sadj*. Jilid I. NV Nusantara.

Bukittinggi-Djakarta.

Yasuo, Uemura.

- 1986 “Perkebunan Tebu dan Masyarakat Pedesaan di Jawa.” Dalam Akira Nagazumi dan Taufik Abdullah (eds.) *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. H. 42-76.

Wertheim, W.F.

- 1959 *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*. Cetakan kedua. Den Haag.

White, Benjamin.

- 1987 “Involusi Pertanian’: Sebuah Obsesi dalam Studi Masyarakat Pedesaan Jawa.” *Tanah Air*. Th. I, no. 1, edisi April. Amsterdam. H. 104-23.

Wiradi, Gunawan.

- 1983 “Kuli Kenceng di Pedesaan Jawa – apa masih ada?” *Kompas*, 23 Maret.

Zwijndregt, J. van dan Schoonenberg, B.H.

- 1954 *Peladjaran Ekonomi*. Disadur oleh Hasan Amin. Cetakan ke II. J.B. Wolters, Jakarta.

# Biodata Penulis

**E**di Cahyono, lahir 23 Maret 1962. Lulus sarjana sejarah pada Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia pada Juni 1988. Pengalaman kerja menjadi peneliti di Pusat Kurikulum dan Sarana Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (pusbang kurrandik-balitbang-Depdikbud) (Desember 1988-Agustus 1996); *Programme Assistant* pada divisi Civil Society Empowerment-Alternative Development (CSE-AD), International NGOs Forum on Indonesia Development (INFID) Jakarta (Oktober 1996-Januari 2000). Mempelajari cara menjalankan koperasi di beberapa koperasi di Vancouver dan Vancouver Island (Kanada) pada Mei 1995; pada Mei-Juli 1997, mengikuti *short-term-course* tentang International Policy Advocacy, disponsori oleh School for International Training, World Learning, Vermont (Amerika Serikat). Menyelesaikan penelitian tentang “Transnational Relocation Industry in Indonesia, a Case Study From PT Great River Industries (garment) and PT Harapan Daya Utama (electronic) a Political-Economy Study,” kerjasama Yayasan Maju Bersama dengan Murdoch University (Western Australia) (Agustus 1994). Beberapa karya-tulis diterbitkan dalam *Prisma*, *Diponegoro 74* (terbitan YLBHI), buletin *Cerita Kami*, *Annual Labour* (keduanya publikasi Yayasan Maju Bersama), dan menulis “The Unjuk Rasa Movement,” dalam buku *State and Labour in New Order Indonesia*, diedit oleh Rob Lambert, © 2000 Asia Research Centre, Murdoch University, Western Australia. Penulis adalah juga pendiri Yayasan Studi Masyarakat (1987), Yayasan Maju Bersama (1989), Koperasi Bina Pekerja (1989) Koperasi Maju Bersama (1993), dan Yayasan Penebar (2001). Sejak tahun 2000 ada dalam *Board of Management* dari Labour Education Center (LEC-Bandung). Dan sejak 2002 menjadi anggota *Executive Committee* dari Labour Working Group (LWG-Bandung). Beberapa publikasi yang disunting oleh penulis adalah buletin *Cerita Kami* (Yayasan Maju Bersama); dua buah terbitan INFID, “Indonesia: Demokratisasi di Era Globalisasi” (1998), dan “Menggadaikan Bumi” (1999). Dan terbitan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia “Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2000.” Menikah dengan Nur Rachmi (Anung) dan dikaruniai putra Imam Marco Cahyono (Marco).

ooo0ooo